JIPOSSTER: Jurnal Ilmu Politik dan Studi Sosial Terapan
Volume: 4 Nomor: 2 (Juni 2025)
E-ISSN 2964-9595
P-ISSN 2964-1322



Dampak Revitalisasi Terhadap Kondisi Pedagang Sayur Pasar Datah Manuah Di Kota Palangka Raya
Anggelica Cleo Patra, Sonia Eprilia Kristina Elia Damayanti, Muhammad Zusanri Batubara, Saputra Adiwijaya 179-188

Strategi Bertahan Hidup Pedagang Kaki Lima Pasca Relokasi Ke Pasar Mini Datah Manuah, Di Jalan Yos Sudarso Kota Palangka Raya
Selfi Yunus, Grace Dea Christina Hutagalung, Elia Damayanti 189-197

Pengawasan Pemilu 2024 oleh Bawaslu Jakarta Selatan: Tinjauan Kepatuhan Hukum
Geby Monica Simbolon, M Ajie Prakoso 108-120

Analisis Persepsi Masyarakat Pinggiran Kota Palangka Raya Tentang Kebijakan Kementerian Esdm Yang Mengatur Pembelian Gas Dengan Antrean. Studi Kasus: Masyarakat Petuk Katimpun
Doni Dores, Erina, Ayu Wulansari, Elia Damayanti, Saputra Adiwijaya, Muhammad Zusanri Batubara 207-215

Perubahan Sosial Akibat Game Online Pada Anak-anak Kota Palangka Raya (studi Komparatif Anak-anak Dikawasan G. Obos Dan Flamboyan Bawah)
Afri Ananta, Muhammad Hayyan Akbar, Zuwariyah Kartini, Elia Damayanti, Muhammad Zusanri Batubara, Saputra Adiwijaya 216-225

Perubahan Makna Sungai Kahayan Bagi Masyarakat di Desa Langkai, Kec.Pahandut Kota PalangkaRaya
Kamelia Simamora, Vanny Purba, Angga, Elia Damayanti, Muhammad Zusanri Batubara, Saputra Adiwijaya 226-235

Tata Kelola Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung: Analisis Multi-Aspek terhadap Data, Kebijakan, dan Implementasi (2018-2024)
Ulfa Umayasari, Goestyari Kurnia Amantha 236-243

Volume	Nomor	Halaman	Tahun
4	2	179-243	2025

Penerbit:
POLSTAC REPOSITORI RISET
BERKARYA MEMBANGUN BANGSA
email: jurnal@polstac.or.id

ISSN 2964-1322
9 772964 132004

ISSN 2964-9595
9 772964 959007

Vol. 4, No. 2, Juni 2025
e-ISSN: 2964-1322
p-ISSN: 2964-9595

JIPOSSTER: Jurnal Ilmu Politik dan Studi Sosial Terapan

Dampak Revitalisasi Terhadap Kondisi Pedagang Sayur Pasar Datah Manuah Di Kota Palangka Raya

Anggelica Cleo Patra[(1)*], Sonia Eprilia Kristina[(2)], Elia Damayanti[(3)], Muhammad Zusanri Batubara[(4)], Saputra Adiwijaya[(5)]
[(1)(2)(3)(4)(5)]Sosiologi, Universitas Palangka Raya,Palangka Raya, 73112, Indonesia
Email : agglcptr1227@email.com

A B S T R A K

Penelitian kualitatif deskriptif ini memberikan analisis pengaruh revitalisasi fisik Pasar Datah Manuah Palangka Raya terhadap pedagang sayur. Revitalisasi yang dilakukan meliputi penataan ulang pasar, perbaikan bangunan, dan fasilitas. Akibatnya menunjukkan pengaruh positif terhadap fasilitas dan lingkungan pasar. Akan tetapi, ada tantangan seperti penurunan pendapatan pedagang sayur karena mengalami penurunan konsumen pasca-revitalisasi karena penataan ulang kios dan perubahan lokasi. Begitu juga, pemulihan diharapkan dapat memperbaiki citra dan sisa pengunjung pasar tradisional di masa depan, mendukung keberlanjutan ekonomi penjual. Penelitian ini mengusulkan kerjasama pemerintah, penjual, dan masyarakat untuk mempertahankan kualitas layanan dan kebersihan pasar

Kata kunci: *Dampak, Revitalisasi, Kondisi, Pedagang, Sayur*

A B S T R A C T

This descriptive qualitative research provides an analysis of the effect of physical revitalization of Datah Manuah Market Palangka Raya on vegetable traders.The revitalization carried out includes the rearrangement of the market, building improvements, and facilities. The result shows a positive influence on facilities and the market environment. However, there are challenges such a sa decrease in the income of vegetable sellers because they experienced a decrease in consumers post-revitalization due to the rearrangement of stalls and changes in location. Likewise, the recovery is expected to improve the image and remaining visitors to traditional markets in the future, supporting the economic sustainability of sellers. This research proposes the cooperation of the government, sellers,and the community to maintain the service quality and cleanliness of the market.

Keywords: *Impact, Revitalization, Condition, Traders, Vegetables*

Submit:	Revised:	Accepted:	Available online:
31.05.2025	27.06.2025	28.06.2025	30.06.2025

PENDAHULUAN

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, Revitalisasi merupakan perilaku memvitalkan kembali suatu langkah, tahap, atau berbagai model aktivitas suatu kesenian yang tradisional

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

digunakan dalam rangka kebangkitan seni kebudayaan yang lama. Menurut Danisworo dalam Sipayung & Kisno, (2022). adapun kebangkitan adalah hasil kerja dan usaha untuk menghidupkan di suatu daerah atau bagian kota yang terdahulu penting/hidup, dan barulah mengalami penurunan. Revitalisasi adalah upaya menghidupkan kembali kawasan atau bagian kota yang pernah semarak tetapi kini mengalami kemunduran atau degradasi. Proses revitalisasi suatu kawasan mencakup perbaikan fisik, ekonomi, dan sosial.Revitalisasi.pasar memperlihatkan kembalinya aktivitas perdagangan di pasar. Pasar tradisional harus mengalami revitalisasi dalam era globalisasi saat ini. Giat dalam menghidupkan kembali keadan di suatu wilayah atau bagian kota yang sudah kehilangan vitalitasnya akibat dari perkembangan zaman yang disebut revitalisasi. Semua bagian kehidupan masyarakata bisa dipengaruhi dengan faktor pembangunan.

Revitalisasi merupakan suatu kegiatan yang sangat kompleks, yang melalui beberapa tahap dan memerlukan waktu tertentu, antara lain sebagai berikut:

1) Rehabilitasi Ekonomi
   Fisik perbaikan daerah yang merupakan jangka pendek diperkirakan dapat menampung kegiatan ekonomi informal dan formal, sehingga dapat memberikan nilai tambah pada daerah kota. Revitalisasi yang dimulai dengan proses peremajaan artefak urbia harus mendukung proses rehabilitasi kegiatan ekonomi. Dalam situs revitalisasi perlu dirancang fungsi campuran yang dapat mendorong terjadi aktivitas ekonomi dan sosial.
2) Revitalisasi Sosial
   Restorasi sebuah wilayah akan diukur apabila berjasa dalam menciptakan lingkungan menarik, bukan sebatas menciptakan good place saja. Memangnya, aktifitas tersebut harus bisa memberikan pengaruh positif juga berjasa untuk meningkatkan dinamika dan kehidupan sosial masyarakat.

Pasar adalah salah satu wadah adanya transaksi jual beli aktivitas barang atau jasa.. Dipasar juga terjadi transaksi dan kesepakatan antar penjual dan pembeli. Dalam kegiatan transaksi meliputi harga,uang,transfer,barang,penjual,pembeli. Selain itu, dalam pasar hal yang biasa adanya tawar menawar dengan tujuan barang yang di inginkan di sepakati oleh pembeli dan penjual. Menurut Tengah, (2024) Selain itu di pasar ada yang menyediakan jasanya seperti tukang angkut barang,tukang jahit Sepatu, pakaian, tas. Jasa ini biasanya diminati oleh ibu-ibu. Pasar Datah Manuah khas dengan penjual yang hangat dan ramah tamah, interaksi yang dilakukan pembeli dan penjual pun sangat baik karena pembeli kebanyakan adalah langganan yang ada di sekitar pasar datah manuah. Stigma yang beredar di Masyarakat terhadap pasar datah manuah, bahwa pasar ini barang-barang jualannya mahal, penjualannya tidak lengkap, tempatnya kotor, becek, tidak terawat ,bau.

Dari berbagai stigma tersebut Masyarakat Palangka Raya mulai enggan ke pasar ini. dampak yang ada dilapangan di PasarDatah ManuahMenurut hasil yang diperoleh peneliti dari pemilik kios dan pedagang di Pasar Datah Manuah, terjadi penurunan pendapatan yang cukup tajam. Salah satu faktornya adalah pasar modern melayani penjual dan pembeli. untuk melaksanakan transaksi dimana proses jual beli terbentuk yang mana mempermudah pembeli dalam transaksi dan juga barang yang dicari lebih lengkap jila dipasar modern. Lewat adanya program revitalisasi pasar ini dapat diperlihatkan untuk memdayakan pasar tradisional dan menciptakan pasar tradisional bersih, sehat, aman, tertib, jujur, ramah di lingkungan pasar serta dapat meningkatkan daya saing pasar tradisional itu sendiri sehingga dapat bersaing dengan pasar modern.

Program Revitalisasi harus menjadi komitmen dan keseriusan terhadap visi dan misi pembangunan ekonomi yang memberi manfaat bagi seluruh masyarakat. Begitu pula dengan Mini Market Datah Manuah di Kota Palangkaraya yang tidak luput dari langkah pemerintah untuk mewujudkan belanja kerakyatan, yakni dengan menjadikan masyarakat lebih senang berbelanja di satu tempat, memenuhi segala kebutuhan dalam satu ruangan sehingga lebih

efisien dari segi waktu, sekaligus menjadi sarana penunjang kenyamanan para pembeli. Oleh karena itu, dengan dilaksanakannya rencana revitalisasi ini, pasar tradisional siap menghadapi dampak pasar modern. Pasar tradisional akan lebih disukai oleh pembeli/konsumen, meskipun reputasinya kurang baik. stick dengan mereka beredar atau sudah hilang.

Kuncinya adalah pasar mini datah manuah harus ditata dan dijaga kebersihannya dan juga kiranya jualan tradisional khas Kalimantan seperti sayur-sayuran Dayak lengkap terjual agar mengundang pembeli membeli dagangannya dan semoga kedepannya daging-daging di pasar mini lengkap terjual apalagi daging yang sering diminati daging non-halal seperti daging babi. Dengan cara ini, situasi pengunjung dapat menjadi yaman yang bersih dan layak, termasuk menjaga kualitas kesehatan produk yang dijual, dan banyak konsumen dapat meluncurkan untuk membeli dan meningkatkan pendapatan dealer. Jumlah pelanggan memiliki dampak positif pada penjualan dengan menambahkan pelanggan yang membeli atau pelanggan baru sepanjang tahun. Revitalisasi pasar mini dilakukan sehingga pasar tradisional dan manusia tidak akan punah dan tidak ditunda oleh dinamika pasar modern dan target resusitasi mengkaji dan menelaah dari judul diatas "Dampak Revitalisasi Terhadap Kondisi Pedagang Sayur Pasar Mini Datah Manuah Di Kota Palangka Raya ".

METODE PENELITIAN

Tempat penelitian yang telah dilakukan adalah di Pasar Datah Manuah Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dan waktu penelitian dilaksanakan pada bulan April 2025, Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif , pengumulan data dan menganalisis data melalui berbagai metode seperti observasi lapangan, wawancara dan mengunjungi secara langsung pedagang pasar, dokumentasi objek keadaan pasar yang sebenarnya, dianalisis secara kualitatif dengan rangkaian kata-kata yang disusun didalam teks yang diperluas dan memahami keadaan yang telah ditinjau dilapangan, fenomena yang ada seperti interaksi jual beli pedagang dan penjual subjek yang diteliti (Manusia) seperti perilaku, proses jual beli, keadaan ekonomi pasar datah manuah. menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi di lapangan.

Menurut Saputri, (2021) Jenis data yang digunakan untuk melakukan penelitian ini merupakan data primer, Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan oleh peneliti (Hasan 2002). Dalam data primer ini diperolehkan dari pedagang pasar Datah Manuah kota Palangka Raya yakni sebagai sumber informan dengan melalui sebuah wawancara , dokumentasi dan panduan wawancara. Fokus kajian ini yaitu melihat dampak ekonomi pedagang terhadap revitalisasi pasar datah manuah. Dan juga menggunakan studi literatur dan studi preseden dengan memperoleh dengan mempelajaru sumber pustaka dari berbagai refrensi melalui media elektronik terkait dengan judul revitalisasi pasar. Hasil yang didapatkan yaitu mengenai teori-teori pasar tradisional, pola pasar dan aktivitas pasar. Dan dari jurnal dan artikel-artikel untuk mendapatkan acuan dalam perencanaan pasar tradisional dan berdasarkan temuan pasar modern dan pasar tradisional, pembeli lebih banyak membeli di pasar modern. Peneliti juga menemukan bahwa kondisi pada masyarakat di pasar datah manuah di kota Palangka Raya harus melakukan penelitian yang bersifat kualitatif dikarenakan masyarakat berharap dengan penelitian ini akan memberikan dampak positif pada bantuan yang diberikan oleh pemerintah kota Palangka Raya. Oleh sebab itu, tidak hanya data yang diperlukan, tetapi juga wawancara mendalam dengan para penjual di pasar datah manuah kota palangka raya.

PENELITIAN TERDAHULU

Dalam penelitian Pasar Datah Manuah ini peneliti terdahulu sebagai acuan dan rujukan. *Pertama*, penelititian yang pernah dilakukan oleh William Chrysostom Gonta Tahun 2017 dari Universitas Sebelas Maret dengan judul "Pengaruh Revitalisasi Pasar Terhadap Aktivitas Pedagang di Pasar Klewer Kota

Surakarta" penelitian ini menggunakan teori revitalisasi kawasan (Danisworo, 2002) dan teori aktivitas pedagang (Adisasmitha, 2005) yang menekankan revitalisasi fisik dan aktivitas pasar. Hasil penelitian menunjukan Sama-sama meneliti revitalisasi pasar tradisional dan dampaknya terhadap pedagang dan perbedaan Penelitian ini memfokuskan pada aspek aktivitas pedagang pasca revitalisasi, termasuk distribusi barang dan interaksi sosial di Pasar Klewer Surakarta.

Kedua. Penelitian yang dilakukan oleh Oktriyandi Alhudha & Karjuni Dt. Maani pada tahun 2020 dari Universitas Negeri Padang dengan judul "Revitalisasi Pasar Tradisional dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Pedagang di Kota Padang Panjang" penelitian ini menggunakan teori Revitalisasi pasar, termasuk revitalisasi fisik, manajemen, budaya. Hasil dari penelitian menunjukan Revitalisasi pasar tradisional belum optimal: kondisi fisik sudah lebih baik, namun pendapatan pedagang banyak yang stagnan atau menurun akibat lokasi kios yang kurang strategis perbedaan Penelitian ini menyoroti aspek pendapatan pedagang dan manajemen kios (penempatan kios dan pengelolaan pasar) di Pasar Kota Padang Panjang yang mempengaruhi aktivitas ekonomi pedagang pasca revitalisasi

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Grace Elika Pingkan Wullur & Edy Mulyantomo pada tahun 2018 dari Universitas Semarang dengan judul "Dampak Revitalisasi Pasar Terhadap Pendapatan Pedagang dan Kepuasan Pelanggan di Pasar Peterongan" dengan menggunakan teori revitalisasi yang menitikberatkan pada perbaikan kualitas fisik pasar dan dampak ekonomi bagi pedagang serta kepuasan pelanggan. Hasil penelitian menunjukan Revitalisasi meningkatkan kenyamanan pasar, namun beberapa pedagang mengalami penurunan pendapatan akibat perubahan pola belanja pelanggan dan keterbatasan fasilitas pendukung,membahas pengaruh revitalisasi pasar tradisional terhadap pendapatan pedagang dan kepuasan pembeli perbedaan Penelitian ini tidak hanya fokus pada pedagang, tetapi juga pada kepuasan pelanggan, serta perubahan preferensi belanja pasca revitalisasi di Pasar Peterongan Semarang (misalnya, pengaruh parkir, kios, dan online shop).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Pasar Datah Manuah di Kota Palangka Raya

Pasar Datah Manuah atau yang sering disebut Pasar Mini berada di jalan Yos Sudarso, Kecamatan Jekan Raya, kelurahan Menteng, Di kota Palangka Raya. Pasar ini ada sejak tahun 1980-an. Aktivitas pasar beroperasi sejak jam 08.00 wib pagi sampai dengan malam jam 21.00 wib. Dulunya disebut pasar Mini Tunjung Nyaho dan mengalami renovasi pada tahun 2013. Sistem pasar berjualan secara enceran atau grosiran baik jualan sembako, pakaian, sayuran, daging, dll. Pasar ini merupakan salah satu aset milik Pemerintah Kota. Pasar datah manuah kondisinya sekarang memprihantinkan. Dibanding pasat pasar lain yang ada di Palangka Raya, seperti pasar kahayan, pasar besar, pasar PU, Pasar Datah Manuah lebih sepi pengunjung, dan membuat yang berjualan pun semakin sedikit dan pindah tempat jualan. Kondisi bangunan memprihatikan seperti gagang pintu lepas, troli jualan rusak, properti seperti meja kursi patah, koridor/selasar jualan jadi tempat parkir, banyak kotoran hewan dilantai-lantai karena kosong, atap jebol, dinding retak dan berlumut. Karena kondisi itu para pembeli pun pikir-pikir untuk kesana. berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Stynes dilihat dari beberapa indikator Nayoan et al., (2021).

a) Perubahan level harga
b) Perubahan mutu dan jumlah barang dan jasa
c) Perubahan penyediaan properti dan variasi pajak
d) Sosial dan lingkungan perubahan

Sinaga (2006) mengatakan bahwa pasar modern adalah pasar yang dijaga dengan manajemen modern biasanya umumnya ada di kawasan perkotaan sebagai penyedia barang dan jasa dengan kualitas dan pelayanan yang baik kepada pembeli. Berbeda dengan pasar modern, pasar tradisional sejatinya memiliki keunggulan dalam bersaing secara langsung yang tidak dimiliki oleh pasar modern. Lokasi yang strategis, area penjualan yang luas, keragaman barang yang lengkap, harga yang rendah, sistem tawar menawar, harga yang murah yang menunjukkan keakraban antara penjual dan pembeli merupakan keunggulan yang dimiliki oleh pasar tradisional. Menurut Paskarina (2010) dalam jurnal adminisrasi publik, dasar pertimbangan melakukan kerjasama merevitalisasi pasar tradisional antara lain berubahnya stigma pasar yang tidak hanya sebagai pusat interaksi ekonomi, namun juga sebagai ruang publik yang

difokuskan pada upaya memperbaiki jalur distribusi pasar yang Diperjual belikan. Sekarang lokasi baru yang dijadikan tempat relokasi bagi para PKL yang berada di Jl. Yos Sudarso pada saat penelitian ini berlangsung banyak pedagang berpindah berjualan di pasar datah manuah karena tidak diperbolehkan lagi berjualan di depan TVRI masyarakat pun mulai ramai.

2. Kondisi Pedagang Di Pasar Datah Manuah

Berdasarkan hasil penelitian yang telah kami peroleh, data yang didapatkan melalui hasil survei dan wawancara pedagang sayur di pasar datah manuah. Hasil dari wawancara kami dengan pedagang sayur, informan menjelaskan bahwa ”setiap tahun pasar datah manuah pengunjungnya semakin menurun, pendapatan pegadang sayur semakin tidak stabil”. Padahal sebelum revitalisasi dulu banyak pedagang sayur yang berjualan disana, tetapi setelah revitalisasi pedagang sayur hanya ada 2 orang pedagang yang masih berjualan, jika dilihat bangunan di pasar datah manuah masih bagus dan layak masih banyak blok kosong tempat jualan yang kosong. posisi pasar datah manuah berada di lokasi strategis di kota palangka raya, tetapi masyarakat palangka raya lebih memilih berbelanja di pasar besar/pasar PU di jalan A. Yani. Alasan pedagang sayur masih bertahan dipasar datah manuah walaupun sepi yaitu karena “sewa tempat murah, lingkungannya nyaman, sudah terterbiasa berjualan di pasar datah manuah”. Melihat keadaan pasar Datah Manuah masih kurang berfungsi secara strategis seperti pasar pada umumnya. Dimana Pasar Datah Manuah memiliki pengaruh dalam pendapatan asli daerah palangka raya.

a) Ibu pedagang sayur (S) umur (48 tahun) lama berjualan 10 tahun jenis jualan yang di jual (sayuran lokal dayak seperti kalakai, pakis, bajei, singkah, ujau, rimbang, umbut rotan, sulur,dll) tetapi ada juga sayuran dari luar seperti kol,wortel,timun,pakcoy,selada.
b) Ibu Pedagang sayur (E) umur (32 tahun) lama berjualan 7 tahun menjual sembako seperti gula,beras,bawang kebutuhan rumah tangga lainnya dan juga sayuran dari luar seperti bayam, sayur manis, umbut, kangkung, dan sayuran lokal dayak yaitu buah marau, sulur, sirih ,rimbang, ujau, singkah, dll.

Revitalisasi mengubah penerimaan pedagang Rata-rata penerimaan pedagang sebelum revitalisasi Rp.15.000.000 dan Rp. Rp.7.800.000/bulan dan Setelah revitalisasi Rp. 7.800.000 dan Rp.5.200.000 dari sini dapat diliat penurunan yang signifikan untuk pendapat pedagang di karenakan menurunya pembeli di pasar datah manuah. tingkat keuntungan bagi pedagang sayur dapat disimpulkan dengan mengalami penurunan pada tingkat pendapatan. Adapun sumber yang didapat hasil dari salah satu pedagang sayur di pasar datah manuah dengan ibu (Surtina) beliau mengatakan memang ada penurunan dari sebelum dan sesudah revitalisasi pada pendapatan dan keramain pengunjung ke tempat mereka berjualan.



Gambar 1. Pedagang Sayur Datah Manuah

Menurut Silitonga & Mulyadi,(2021) Berdasarkan Data Dari Informan yang yang diperoleh dari pedagang sayur dipaparkan bahwa tingkat penjualan memang menurun tapi tidak juga drastis. Beliau (ibu penjual sayur) menjelaskan bahwa penurunan tingkat penjualan yang terjadi di pasar disebabkan karena beberapa hal. Salah satunya dapat disebabkan oleh minat beli masyarakat yang menurun, Selain itu disebabkan karena letak berjualan yang tidak startegis dan menyebabkan sepinya pasar. Hal ini terjadi sebelum revitalisasi masih kios pedagang sayur yang berjualan dan sekarang berubah banyak pedagang sayur yang pindah dari pasar datah manuah tersebut dan hanya tersisa 2 pedagang sayur saja yang tersisa. Karena perubahan tempat/stand berjualan juga yang membuat jualan mereka sepi pengunjung, sehingga pendapatan mereka tingkatnya menurun dari sebelum dan sesudah dilakukan program revitalisasi ini disamping itu dikarenakan memang minat dari pembeli berkurang, karena ada beberapa sayur yang kurang lengkap.

3. Karateristik Pedagang

Menurut Aprilia, (2018) Pengecer pasar adalah kemunculan komunikasi antara perusahaan dan orang yang memiliki lokasi permanen, dan antara penjual dan pembeli, mengarah pada keputusan - pembelian barang ke dealer yang menjual di pasar Dutah Manuah. Informan yang dipilih ketika penelitian ini dilakukan adalah Glockers hijau untuk dijual di Pasar Data Kota Palankaraya. Studi ini menjelaskan karakteristik dealer di pasar Dutah Manuah. Ada berbagai jenis sayuran yang dijual di dealer ini, penerbitan panjang, dan usia penjual. Berdasarkan hasil dari penelitian mengindikasikan Menurut Ayuningsasi, (2011)mayoritas pedagang sayur di pasar Datah Manuah adalah sebagian besar penduduk asli kota palangka raya. Dominasi pedagang oleh wanita dari suku dayak ngaju. Lama berjualan sekitar 10 tahun, penjual sayur A ibu berusia 48 tahun dan penjual sayur B wanita berusia 32 tahun dengan dengan lama jualan 7 tahun, mayoritas informan berstatus kawin yang berkedudukan sebagai ibu rumah tangga. Dalam hal ini menunjukkan bahwa pekerjaan berjualan sayur yang dilakukan oleh mayoritas informan merupakan sebagai penghsilan utama melainkan sebagai penghasilan tambahan.

Lokasi dagangan sayur yang berada di belakang tertutup bangunan-bangunan toko, membuat orang-orang yang lewat mungkin tidak mengetahui disana ada orang berjualan. Dampak revitalisasi tidak sepenuhnya sesuai harapan. Penurunan pendapatan pedagang, Kemerosotan produk sebagian besar pedagang menunjukkan bahwa sementara pedagang telah pindah ke lokasi dan fasilitas baru, klien atau pengunjung baru belum dan dengan demikian, sistem barang-barang atau produk yang sebelumnya ada telah berkurang. Dengan demikian, masuk akal bagi pasar untuk secara kritis mengevaluasi strategi pemasarannya dan mencari cara yang lebih efektif untuk "menjual" kembali pasar kepada pelanggan dan memungkinkan mereka kembali terbeli barang.. Produk dan pelayanan yang lebih baik dari sejumlah pedagang pedagang menunjukkan bahwa tindakan revitalisasi bisa memicu krisis kembali yang benar. Semua orang adalah bagian nipis kecuali banyak pedagang apalagi mempunyai keahlian atau sumber daya untuk potensi pasar, dan dengan demikian, ada motivasi yang kuat untuk membiayai bimbingan baginya.

pelatihan pedagang adalah hal yang perlu ditindaklanjuti untuk mendukung mereka yang ada agar dapat melalui fasilitas. Yang berjualan sayur di pasar datah manuah yang kami wawancara dan juga teliti merupakan seorang ibu-ibu paruh baya dari suku dayak . Dia biasanya berjualan bergantian dengan anak perempuannya dan juga seorang perjual lainnya wanita orang jawa, hanya mereka berdua yang berjualan sayur di pasar datah manuah. Walaupun kondisi pengunjung pasar sepi tapi tetap berjualan. Mayoritas pedagang berjualan di datah manuah menjual yaitu alat elektronik ,pakaian, peralatan rumah tangga, makanan, sayuran dan daging. Di Kota Palangka Raya, terdapat pasar tradisional menjual berbagai beragam produk kebutuhan sehari-hari dan bahan makanan seperti beras, terigu, gula, garam, sayuran, bawang, cabai, ikan, ayam, dan lain-lain. Pasar ini memiliki keunggulan karena menyediakan barangbarang dengan harga terjangkau oleh pembeli seperti pada kebiasaan pasar yang lazim. Di pasar tradisional, ada kesempatan bagi penjual dan pembeli untuk berunding dan mencapai kesepakatan mengenai harga yang menguntungkan bagi keduanya. Pemerintah setempat telah melakukan pengembangan pasar tradisional ini agar lebih modern dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang ingin berbelanja dan melakukan transaksi jual beli.

Kebijakan Sewa

Bangunan pasar datah manuah atau bisa di sebut pasar mini memiliki 2 bangunan dimana bagian depan yaitu bangunan dengan jualan seperti baju,kain,alat elektronik,dll. Dan

bangunan belakang bangunan B berjualan seperti sayuran dan daging di bangunan B pengunjungnnya sepi karena tertutup dan juga minat pengunjung pasar kurang. Di bangunan Adi sewakan ruko atau tempat dengan kisaran Rp.300.000-Rp.600.000. tergantung besar dan kondisi tempat dan kualitas ruangan. Sementara di gedung B belakang banyak tempat-tempat tidak berisi dan bentuknya pun tidak beragam sehingga, hanya ada 2 orang penjual sayur yang berjualan disitu dengan biaya sewa Rp.50.000 per/bulan. Hal ini jelas mencerminkan kualitas, namun dengan adanya biaya sewa barang yang dijual pun ikut naik.

Segmentasi Pembeli

Pasar datah manuah ini dekat sekali dengan pemukiman mahasiswa mahasiswi yang sedang tinggal ngekos, keberadaannya yang ada di tengah-tengah kota membuat para mahasiswa kebanyakan berbelanja disana untuk kebutuhan dapurnya. Mengingat pasar yang lokasinya strategis dekat dengan kampus dan berada di tengah-tengah kota. Dan tidak jarang banyak juga mahasiswa yang bekerja di pasar mini. Ibu rumah tangga merupakan segmen pembeli terbesar di pasar datah manuah, mereka berbelanja secara rutin untuk kebutuhan dapur dan kebutuhan keluarga. Masyarakat sekitar pelanggan tetap, yaitu prlanggan yang sudah berlangganan mereka biasanya mendapatkan harga khusus karena hampir setiap hari berbelanja di pasar datah manuah. Pembeli mementingkan kualitas kesegaran dan kualitas sayuran, pembeli yang berbelanja yang baru pertama kali atau orang luar tidak akan sadar dengan perbedaan harga sayur tetapi bagi pelanggan yang asli dari palangkaraya akan merasa perbedaan harga sayuran. Pendapatan pedagang sebelum revitalisasi Rp.500.000/hari dan perbulan sekitaran Rp. 15.000.000 dan sesudah revitalisasi Rp.300.000/hari dan perbulan sekitar Rp.7.800.000

4. Kebersihan dan sanitasi

Bangunan gedung A lebih cukup terawat karena mungkin ada petugas kebersihan yang di bayar oleh para pedagang yang berjualan disitu ini mencerminkan adanya menejemen kebersihan yang berbeda. Tetapi di gedung lantai atas gedung A pedagangnya sepi bahkan bisa di katakan kosong dan sangat-sangat kotor lantainya banyak kotoran tikus dan burung, properti jualan juga rusak dan juga bangunan banyak yang tidak layak seperti pintu yang lepas dan rolling door yang lepas dan rusak. Kebersihan berpengaruh pada pembeli yang berbelanja apabila dirasa nyaman maka pembeli tidak hanya sekali kesana, tapi berkali-kali dan juga berpengaruh pada citra pasar. Sementara bangunan gedung B di belakang karena yang jualan hanya sedikit maka hanya para pedagang sayur yang membersihkan sampah-sampah sendiri, ketika pagi mereka membersihkan lokasi tempat mereka berdagang dan ketika ingin tutup mereka mereka menyapu, membuang sampah dan membakar sampah sisa jualan, dan juga terlihat perbedaaan kebersihan antara dua gedung depan dan belakang, ini sangat mempengaruhi daya tarik pengunjung pasar.

Dampak Revitalisasi Terhadap pedagang sayur setelah revitalisasi

Dengan adanya perbaikan revitalisasi pada pasar datah manuah tidak hanya membawa dampak pada aspek sosial dan fisik saja, tetapi juga berdampak pada perekonomian pedagang sayur tersebut. Berdasarkan pada penelitian ini yaitu pendapatan pedagang sayur pendapatan yang didapat dalam perhari tidak stabil. Pedagang dengan pendapatan yang tidak stabil tersebut mengalami perubahan yang cukup besar setelah adanya revitalisasi pada bangunan. Sesudah revitalisasi tempat berjualan para pedagang terutama pedagang sayur di tata ulang supaya menjadi lebih rapi. Berdasarkan jenis jualan dan dagangan para pedagang dikumpulkan, dan pedagang yang lokasi di depan jalan raya akan lebih mudah dan banyak konsumen mengalami perubahan meningkatnya pendapatan dan toko menjadi ramai pengunjung. Dalam hal ini menimbulkan pedagang yang lain tidak medapati lokasi yang transparan bagi konsumen terutama bagi pedagang sayur yang mengalami keterbatasan pembeli akibat dari keterbatasan tempat bagi penjual yang lain untuk memgembangkan usahanya.

Pada program revitalisasi di pasar datah manuah ini memang banyak meningkatkan perubahan pendapatan yang cukup bagi pedagang kios yang lain, tetapi pada keadaan yang di alami pada pedagang sayur di pasar datah manuah adalah tidak terlalu ada perubahan yang meningkat setelah terjadi revitalisasi. Output pasar datah manuah dengan adanya program revitalisasi dari hasil observasi lapangan

yang dilakukan informan memaparkan bahwa dampak dari revitalisasi berimpact pada pendapatan yang mereka dapatkan dalam sehari. Pendapatan yang pedagang sayur cukup menurun setelah revitalisasi karena para konsumen tidak terlali berbelanja di jualan mereka. Dalam hasil dari informan menyatakan bahwa dengan revitalisasi pendapatan pedagang sayur akan meningkat tetapi pada realita yang ada program revitalisasi cukup menimbulkan kurangnya konsumen dan dan pendapatan berkurang. Program revitalisasi pasar datah manuah yang dilakukan oleh pemerintah kota palangka raya untuk melakukan perbaikan dan pembenahan dalam penataan pasar datah manuah kota palangka raya.

Revitalisasi pasar datah manuah mengakibatkan perubahan terhadp tempat maupun pada posisi pedagang kios. Ada, beberapa pedagang yang tingkat pendapatannya menurun terutama terjadi pada pedagang sayur yang lokasi berjualan pada belakang bangunan yang besar di pasar datah manuah dengan posisi jualan yang tertutup bangunan depan pasar tersebut menyebabkan konsumen tidak terlalu belanja sayur di tempat tersebut. Pendapatannya akan menurun setelah dilakukan perbaikan pasar, informan menyatakan adanya penurunan pendapatan yang disebabkan oleh program revitalisasi dan perubahan. Menurut Annisa Indah Mashita, (2010) Dampak dari revitalisasi yang dilakukan di pasar datah manuah kota palangka raya hilangnya pelanggan yang dimilki pedagang sayur akibat penempatan stand /kios yang berubah, sebagian dari para pedagang yang "tidak beruntung " untuk tempat yang cukup strategis untuk berjualan terutama bagi pedagang sayur sehingga para pedagang menempat stand/kios yang tertutup dengan masyarakat yang ramai dan menyebabkan terbatas untuk para pengunjung untuk membeli jualan mereka. Dalam hal ini memberikan pengaruh kepada keberadaan para pembeli mereka. Dampak revitalisasi inilah yang dirasakan oleh pedagang sayur.

Menurut Cyntia Pratiwi & Kartika,(2019) Revitalisasi yang telah dilaksanakan yakni revitalisasi kondisi fisik pasar Datah Manuah supaya menjadi lebih bersih dan nyaman bagi para pengunjung yang datang untuk berbelanja dagangan mereka, supaya yang diharapkan selama mampu memperbaiki dan meningkatkan jumlah kunjungan para konsumen ke pasar Datah Manuah untuk berbelanja di pasar Datah Manuah sehingga pendapatan pedagang meningkat. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa program revitalisasi berdampak kepada peningkatan pendapatan para pedagang . peningkatan pendapatan pada program revitalisasi hanya berdampak pada pedagang yang lain tidak untuk pedagang sayur. Dalam hal ini menunjukkan perubahan pada implikasi kondisi pasar yang nyaman dan aman akan meningkatkan jumlah kunjungan sehingga pendapatan pedagang meningkat.

KESIMPULAN

Pengaruh revitalisasi terhadap pedagang sayur di pasar datah manuah kota palangka raya menunjukan komplesitas dan tantangan beragam yang ada yang membuat penghambat kemajuan semakin lebih baik, terutama di era persaingan pasar modern. Penelitian ini terlihat jelas bagaimana perbedaan yang mencolok Bangunan fisik gedung pasar datah manuah A dan B. Dari sini dapat mempresentasikan keadaan pedagang dimana terjadi proses revitalisasi pasar, Kondisi pasar yang tidak di terlalu di kontrol dan tidak terawat, seperti fasilitas yang masih minim, berdampak pada kualitas dan pengunjung pasar, harga sewa yang lumayan tetapi pengunjung pasar sepi membuat barang atau produk yang dijual pun juga ikut mahal, itu semakin membuat pengunjung berpikir-pikir belanja. Dengan adanya berbagai macam pasar modern membuat penurunanan pada pasar datah manuah. Oleh karena itu perlunya pendekatan pemerintah dengan pedagang dan masyarakat untuk bekerja sama membangun citra pasar tradisional itu lagi,dengan layanan, kebersihan yang terjaga,dan perbaikan tata kelola yang berkelanjutan dan baik untuk masa yang akan datang tetap terjaga.

Perubahan harga pasca revitalisasi menjadi lebih berbeda yang dulunya harga pasaran. Sekarang jadi lebih naik dari harga awal karena pelanggang yang sepi dan juga bayaran sewa tempat jualan. Kenaikan harga sayuran membuat pengunjung memilih berbelanja di pasar besar walaupun jaraknya jauh. Ini berdampak pada pendapatan pedagang. Perbedaaan penyediaan fasilitas dan properti tempat. Adanya perbedaan antara gedung bangunan depan dan bangunan belakang, bangunan depan lebih terawat dengan sewa yang lumayan jauh harganya yaitu Rp.300.000,00-Rp.700.000,00 perbulan, daripada gedung jualan sayur di belakang yaitu Rp.50.000.00 perbulan. Perubahan sosial dan lingkungan mempengaruhi aktivitas jual beli kurangnya pendagang sayur dan juga harga yang naik merubah pelanggan jadi berpindah tempat belanja. Dan juga kesadaran pedagang akan kebersihan yang sekarang mulai meningkat cukup

baik diharapkan dapat memberi kenyamanan bagi para pembeli dan juga sampah-sampah yang tidak sembarangan. Jadi pengaruh revitalisasi memiliki dampak yang negatif bagi aktifitas pedagang dan belum tepat sasaran jika revitalisasi diharapkan menjadi lebih baik.

Ucapan Terima kasih

Kami mengucapkan Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kasihnya kami bisa menyelesaikan artikel penelitian pasar datah manuah juga berterimakasih juga kepada dosen pembimbing penelitian kami yaitu Ibu Elia Damayanti, S.P.,M,SI dan kepada pedagang pasar datah manuah yang meluangkan waktunya untuk kami wawancara dan memberikan informasi yang bermanfaat.

REFERENSI

Annisa Indah Mashita. (2010). Dampak Sosial Ekonomi Revitalisasi Pasar Tradisional Terhadap Pedagang. *Jurnal Sosek Pekerjaan Umum*, *Vol. 2 No.*(November).

Aprilia, R. (2018). Dampak Revitalisasi Pasar Tradisional Terhadap Pendapatan Pedagang di Pasar Bulu Semarang. *Economics Development Analysis Journal*, *6*(2), 215–220. https://doi.org/10.15294/edaj.v6i2.22219

Ayuningsasi, A. A. K. (2011). Analisis Pendapatan Pedagang Sebelum Dan Sesudah Program Revitalisasi Pasar Tradisional Di Kota Denpasar. *Piramida*, *7*(1), 1–12. https://erepo.unud.ac.id/id/eprint/27574

Azizah, S. N. (2016). Analisis dampak program revitalisasi pasar tradisional di pasar tumenggungan terhadap pendapatan pedagang dan evaluasi manajemen tata kelola pedagang pasar tumenggungan pasca program revitalisasi menurut persepsi pedagang. *Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi*, *15*(2), 22-36.

Cyntia Pratiwi, K., & Kartika, I. N. (2019). Analisis Efektivitas Program Revitalisasi Pasar Tradisional Dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Pedagang Dan Pengelolaan Pasar Pohgading. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, *7*, 805. https://doi.org/10.24843/eeb.2019.v08.i07.p06

Kota, D., Raya, P., Dakhi, H. F., Tamba, K., Siregar, R., & Widiyasyar, A. (2024). *Determinan Pendapatan Pedagang Pasar Tradisional*. *2*(1).

Jannah, R. (2021). *Strategi dan implementasi pengembangan pasar pemerintah datah manuah kota palangka raya* (Doctoral dissertation, IAIN Palangka Raya).

Nayoan, T., Lengkong, F. D. J., & Londa, V. Y. (2021). Dampak Ekonomi Kebijakan Revitalisasi Pasar (Studi di Pasar Rakyat Desa Poopo Utara Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, *7*(103), 43–52.

Saputri, G. Y. (2021). Analisis Dampak Revitalisasi Pasar Tradisional Terhadap Pendapatan Pedagang Pasar Tradisional Bobotsari Analysis Impact Traditional Market Revitalization

on Trades Income Bobotsari Traditional Market. *Paradigma Multidisipliner*, *1*(1), 1–12. http://smkn1magelang.sch.id/jpm/index.php/jpm/article/view/1/1

Silitonga, T. S., & Mulyadi, A. W. E. (2021). Analisis Dampak Ekonomi Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional (Studi Kasus pada Revitalisasi Pasar Tanggul Surakarta. *Wacana Publik*, *1*(2), 398. https://doi.org/10.20961/wp.v1i2.54603

Sipayung, R., & Kisno, K. (2022). Manajemen Belajar Swapacu Dalam Jaringan (Self-Paced Learning) dengan Guru Binar. *Jurnal Pendidikan, Sains Sosial, Dan Agama*, *8*(2), 573–582. https://doi.org/10.53565/pssa.v8i2.538

Satia, M. R., Selawaty, D., Riyanti, N., & Rahman, S. (2024). Kajian Strategis Tata Kelola Kolaboratif Pasar Tradisional Datah Manuah Kota Palangka Raya. Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 14(3), 87-94.

Kurniadi, M. A., & Ulzikri, A. R. (2022). Memetakan Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Daerah: Kajian Literatur. *JIPOSSTER: Jurnal Ilmu Politik Dan Studi Sosial Terapan*, *1*(1), 30–34.

Sipayung, R., & Kisno, K. (2022). Manajemen Belajar Swapacu Dalam Jaringan (Self-Paced Learning) dengan Guru Binar. *Jurnal Pendidikan, Sains Sosial, Dan Agama*, *8*(2), 573–582. https://doi.org/10.53565/pssa.v8i2.538

Lubis, M. F., & Sosiologi, P. (2023). *Analisis Perilaku Sosial Dalam Dunia Digital*. *2*(1), 1–14.

Tengah, K. (2024). *Journal of Government Insight*. *4*(2), 73–81.

Hasan, M. (2018). *Dampak ekonomi atas implementasi peraturan daerah terhadap relokasi usaha warung tenda di kawasan Yos Sudarso Palangka Raya* (Doctoral dissertation, IAIN Palangka Raya).

Vol. 1, No. 2, Juni 2025
e-ISSN: 2964-1322
p-ISSN: 2964-9595

JIPOSSTER: Jurnal Ilmu Politik dan Studi Sosial Terapan

Strategi Bertahan Hidup Pedagang Kaki Lima Pasca Relokasi Ke Pasar Mini Datah Manuah, Di Jalan Yos Sudarso Kota Palangka Raya

Selfi Yunus[(1)*], Grace Dea Christina Hutagalung[(2)], Elia Damayanti[(3)]
[(1)(2)(3)] Sosiologi, Universitas Palangka Raya, Palangka Raya, 73112, Indonesia
Email : fieyunus12@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui strategi bertahan hidup yang dilakukan oleh pedagang kaki lima (PKL) pasca relokasi ke Pasar Mini Datah Manuah, Jalan Yos Sudarso, Kota Palangka Raya. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan PKL meliputi pemanfaatan media sosial seperti TikTok, Facebook, Instagram, dan WhatsApp untuk promosi, menambah waktu dan lokasi berjualan, serta membangun relasi sosial dengan komunitas pemuda agar lebih dikenal. Strategi ini menunjukkan bahwa para PKL mampu beradaptasi dan tetap berusaha meskipun menghadapi perubahan. Namun, tanpa dukungan pemerintah berupa fasilitas yang memadai dan pelibatan pedagang dalam proses kebijakan, relokasi justru dapat memperburuk kondisi ekonomi mereka. Oleh karena itu, perlu adanya kerjasama antara pemerintah dalam penataan kota dengan program pemberdayaan ekonomi agar kebijakan relokasi tidak hanya fokus pada keindahan kota, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan dan keberlangsungan usaha para PKL.

Kata kunci: *Pedagang Kaki Lima, Strategi, Relokasi*

ABSTRACT

This research was conducted to find out the survival strategies carried out by street vendors (PKL) after relocation to Datah Manuah Mini Market, Jalan Yos Sudarso, Palangka Raya City. The method used is descriptive qualitative research with data collection techniques through interviews, observation, documentation, and literature studies. The results showed that the strategies applied by street vendors include utilizing social media such as TikTok, Facebook, Instagram, and WhatsApp for promotion, increasing selling time and location, and building social relationships with youth communities to be better known. These strategies show that street vendors are able to adapt and keep trying despite facing changes. However, without government support in the form of adequate facilities and involvement of traders in the policy process, relocation can actually worsen their economic conditions. Therefore, there is a need for cooperation between the government in urban planning and economic empowerment programs so that relocation policies do not only focus on the beauty of the city, but also pay attention to the welfare and business sustainability of street vendors.

Keywords: *Street Vendors, Strategy, Relocation*

Submit:	Revised:	Accepted:	Available online:
05.06.2025	18.06.2025	28.06.2025	30.06.2025

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan pengusaha sektor informal, ada yang berjualan pada lokasi tertentu, ada pula yang berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain (menggunakan pikulan, kereta dorong atau semacamnya) menjajakkan bahan makanan, minuman dan barang-barang konsumsi lainnya secara eceran (Larasati, 2021). Selain menawarkan produk dan layanan dengan biaya yang terjangkau, keberadaan pedagang kaki lima juga berfungsi sebagai sumber pendapatan bagi banyak orang yang tidak dapat mengakses ke sektor ekonomi yang resmi. Akan tetapi, pertambahan jumlah pedagang kaki lima di berbagai daerah juga sering kali menimbulkan masalah baru, seperti kemacetan, pelanggaran aturan, dan penurunan kebersihan lingkungan.

Pedagang kaki lima merupakan sebuah fenomena yang tidak terpisahkan dari perekonomian di Indonesia (Anjasmari & Hasna, 2023). Maka dari itu dalam mengatasinya Pemerintah Kota Palangka Raya pun melakukan Penataan Pedagang Kaki Lima dengan dibentuknya Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 13 tahun 2009 tentang pengaturan, penertiban dan pengawasan Pedagang Kaki Lima yang bertujuan untuk mewujudkan Kota cantik Palangka Raya yang tertib, bersih, aman dan tentram. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Satpol PP Kota Palangka Raya dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima yang melanggar ketentuan, termasuk melakukan pembongkaran paksa setelah beberapa kali mengeluarkan perintah untuk pindah ke lokasi yang telah dipersiapkan pemerintah Kota Palangka Raya.

Menurut (Nugraha, 2019) Pemerintah Kota Palangka Raya mengupayakan tempat relokasi bagi pedagang kaki Lima yang dinilai strategis. Di Kota Palangka Raya, pemerintah telah merelokasi PKL ke Pasar Mini Datah Manuah, Jalan Yos Sudarso sebagai bagian dari kebijakan penataan kota. Langkah ini bertujuan untuk menata kota agar lebih tertib dan terorganisir dan untuk menyediakan tempat usaha yang lebih layak bagi pedagang sekaligus menjaga keteraturan serta estetika kota. Menurut (Octaviani & Puspitasari, 2022) banyaknya pedagang kaki lima (PKL) yang menempati lokasi strategis perkotaan tidak jarang menimbulkan permasalahan yang ada.

Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) berakibat akan keindahan dan penataan perkotaan yang terganggu, serta wajah kota yang terkesan kumuh. Pasar Datah Manuah dibangun pada masa pemerintahan bapak Letnan Kolonel INF Kadiyoto ditahun 1980 dibangunlah pasar yang bernama Pasar Mini Tanjung Nyahu. Pada tahun 1986 Pasar Mini Tanjung Nyahu kemudian dibangun kembali oleh bapak Drs. Lukas Tingkes yang pada saat itu menjabat menjadi Wali Kota Palangka Raya dan menganti nama tersebut menjadi Pasar Datah Manuah (Jannah, 2021).

Tujuan penelitian ini adalah relokasi pedagang kaki lima (PKL) merupakan salah satu langkah atau kebijakan pemerintah untuk menata kota supaya lebih teratur, rapi, dan terstruktur. Akan tetapi, langkah atau kebijakan relokasi ini juga sering kali menciptakan masalah baru bagi para PKL, maka dari itu peneliti ingin mengetahui lebih dalam tentang strategi yang diterapkan oleh para PKL untuk bertahan hidup setelah relokasi. Melalui penelitian ini, diharapkan diperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai dampak kebijakan relokasi terhadap kehidupan PKL di Palangka Raya.

Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rekomendasi bagi pemerintah dalam merancang kebijakan yang lebih berpihak pada keberlanjutan ekonomi PKL. Dengan demikian, kebijakan relokasi tidak hanya menjadi solusi dalam penataan kota, tetapi juga tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sektor ekonomi informal(Ulzikri, 2020). Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi serta wawancara kepada enam pedagang kaki lima yang telah direlokasi ke Pasar Mini Datah Manuah. Pedagang tersebut menjual beragam jenis dagangan, mulai dari gorengan, lalapan, mi instan, bakso, mi ayam, jagung bakar, crepes, hingga minuman seperti pop es dan kopi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dokumentasi dan literatur seperti artikel dan bahan bacaan lainnya. Wawancara dilakukan dengan pedagang kaki lima yang direlokasi untuk mengetahui pengalaman, tantangan, dan strategi bertahan hidup mereka serta cara mereka beradaptasi dengan lingkungan usaha

yang baru. Observasi di lokasi Pasar Mini Datah Manuah akan dilakukan guna mengamati aktivitas perdagangan, kondisi pasar, dan bagaimana aktivitas ekonomi PKL berlangsung setelah relokasi. Selain itu, dokumentasi menguatkan temuan dengan bukti dari dokumen resmi berupa foto, rekaman video, serta dokumen resmi terkait kebijakan relokasi akan dikumpulkan sebagai pendukung hasil penelitian dan sebagai bukti empiris dari kondisi yang diamati.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Sebelum dan Sesudah Relokasi

Sebelum direlokasi ke pasar Mini, para pedagang kaki lima berjualan dilokasi yang sangat strategis. Lokasi tersebut memberikan keuntungan ekonomi yang cukup besar, banyak pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di lokasi yang dianggap menggangu ketertiban jalan dan merusak pemandangan cantik kota Palangka Raya. Menurut hasil penelitian kebanyakannya adalah laki - laki dengan usia rata -rata sekitar 30 hingga 50 tahun. Mereka datang dari latar belakang ekonomi menengah, dan kebanyakan dari mereka bergantung pada hasil usaha dagangan mereka. Berbagai jenis yang ditawarkan sangat beragam, dengan berbagai macam makanan mulai dari makanan ringan seperti jasuke, sate, gorengan, pop es, kopi dan makanan berat lainnya seperti mie ayam bakso dan lalapan. Lokasi tersebut memberikan keuntungan ekonomi yang cukup besar, dalam hasil wawancara yang dilakukan salah satu pedagang mengatakan:

> "*dulu tempat jualan sebelum relokasi, pembelinya ramai terus. Tapi pasca relokasi menurun sangat drastis 50%".* (wawancara dengan A, 27 April 2025).

Permasalahan atas keberadaan (PKL), dimana bila keberadaannya tidak diatur dan tidak dibina akan menimbulkan permasalahan dibidang pembangunan, tata ruang maupun gangguan ketertiban umum. Untuk itu Pemerintah Kota Palangka Raya membuat suatu Kebijakan Perda Kota Palangka Raya Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pengaturan, Penertiban, dan Pengawasan Pedagang Kreatif Lapangan. Untuk mensosialisasikan kebijakan ini maka perlu adanya koordinasi antara Pemerintah Kota Palangka Raya dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) (Rivaldo & Ulfah, 2021).

Kondisi ini tidak hanya dialami oleh satu pedagang, melainkan juga dirasakan oleh beberapa pedagang lainnya dan bahkan mereka lebih nyaman di tempat sebelum dilakukannya relokasi, karena memiliki akses yang mudah dijangkau oleh masyarakat sehingga ramai pembeli bahkan tempatnya cukup luas dan memiliki area parkir yang cukup luas. Akan tetapi banyak dari mereka dianggap melanggar aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga mereka diharuskan untuk pindah ke Pasar Mini Datah Manuah. Namun, setelah pindah ke Pasar Mini Datah Manuah, kini berubah mengalami penurunan pelanggan dan pendapatan, karena lokasi pasar yang dianggap tidak strategis,. Situasi ini memberikan tekanan ekonomi bagi para PKL. Walaupun begitu dari beberapa pedagang yang diwawancarai ada satu pedagang yang mengatakan:

> *"lebih enakkan di sini karena kami dapat peningkatan penghasilan dan pelanggan"* (wawancara dengan B, 26 April 2025).



Gambar 1. Dokumentasi wawancara pedagang warung lalapan

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pedagang kita bisa mengetahui bahwasanya kebijakan relokasi yang dilakukan oleh pemerintah tidak hanya merugikan tetapi juga menguntungkan bagi sebagian pedagang.

2. Tantangan yang Dihadapi Pasca Relokasi

Sebelum pindah, para PKL berdagang di tempat yang dianggap sangat strategis karena mereka terletak di sisi jalan dekat kerumunan dan mudah diakses oleh konsumen. Akan tetapi, setelah pindah ke pasar Mini Datah Manuah, mereka menghadapi berbagai tantangan seperti penurunan jumlah pelanggan, fasilitas pasar yang kurang memadai, area parkir yang terbatas, lokasi pasar yang kurang strategis, penerangan tempat berdagang yang minim, bahkan penurunan jumlah pendapatan, bahkan hampir seluruh pedagang mengatakan:

> *"Dari kebijakan relokasi yang dilakukan oleh pemerintah, para pedagang mengalami penurunan pendapatan yang di mana sebelum relokasi pendapatan perhari mencapai Rp1.000.000-Rp2.000.000 keatas tetapi pasca relokasi pendapatan menurun drastis. Bahkan, beberapa pedagang hanya memperoleh sekitar Rp200.000-500.000 perhari.Walaupun begitu, pengunjung agak ramai pada hari-hari tertentu (akhir pekan), sehingga pendapatan dapat sedikit meningkat, tetapi masih belum menyamai dengan kondisi sebelum relokasi. Akan tetapi, jumlah ini tidak pasti dan kadang-kadang terjadi, sehingga pedagang masih merasa sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari -hari mereka".* (wawancara dengan B, 26 April 2025).

Pedagang kaki lima juga sama dengan orang kebanyakan yang memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi. Kenaikan berbagai harga yang ada juga tentu mempengaruhi pekerjaan dan kebutuhan hidup bagi pedagang kaki lima. Belum lagi kebutuhan - kebutuhan primer dan pribadi yang dimiliki oleh pedagang kaki lima. Dengan kebutuhan yang cukup banyak, maka muncul pemenuhan kebutuhan yang banyak pula (Subkhi Mahmasani, 2020). PKL yang direlokasikan ke Pasar Mini Datah Manuah mereka menghadapi berbagai tantangan, yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan untuk kelangsungan buat usaha mereka.



Gambar 2. Dokumentasi wawancara pedagang sate

Tidak semua PKL memiliki keterikatan dengan lokasi usaha tertentu (menetap), dan beberapa pedagang menjalankan usaha untuk berpindah ke berbagai tempat. Pedagang yang berpindah memiliki jangkauan wilayah kerja yang sangat luas daripada pedagang yang menetap. Menurut (Setia, 2009) perpindahan PKL dapat dibagi menjadi pedagang jalanan yang terus berpindah ke berbagai lokasi yang secara tidak menentu, dan juga para PKL di berbagai tempat untuk menetap di berbagai lokasi yang tertentu. Menurut salah satu pedagang mengatakan:

> *"jauh lebih menguntungkan di tvri dibandingkan di pasar Mini, jauh lebih bagus soalnya tempatnya lebih luas"* (wawancara C, 26 April 2025).

Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwasanya para PKL tidak sepenuhnya dapat keuntungan melainkan mengalami penurunan drastis, selain itu beberapa tantangan lainnya seperti, pendapatan yang diterima tidak dapat dibandingkan dengan biaya operasional dan modal yang dikeluarkan. Namun, beberapa PKL mengatakan bahwa kondisi keamanan untuk lokasi pasca relokasi sangat baik, lingkungan pasar dianggap aman damai. Selain itu, biaya operasi seperti listrik dianggap terjangkau sehingga tidak membebani pedagang secara finansial dalam menjalankan usaha mereka. Akan tetapi lokasi tersebut sangat tidak stategis dan kurang menarik pelanggan seperti tanggapan para PKL menganggap pemerintah hanya memindahkan tetapi kurang dalam memperhatikan kebutuhan pedagang dalam menjalankan usaha dagang mereka pasca relokasi tersebut.

3. Strategi Bertahan Hidup Pasca Relokasi

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, para PKL mengembangkan berbagai strategi untuk bertahan hidup setelah relokasi. Strategi-strategi ini muncul sebagai respons mereka terhadap tantangan baru yang mereka hadapi setelah meninggalkan lokasi lama yang dianggap lebih strategis dan ramai pengunjung, dan pedagang kaki lima juga mempunyai potensi untuk dapat menunjang perekonomian dengan menciptakan lapangan pekerjaan serta mampu sebagai sumbang pendapatan daerah apabila dimanfaatkan dengan baik. Jika pemerintah mampu melakukan penataan serta pembinaan kepada para pedagang kaki lima (PKL) dengan baik maka sektor ini dapat memberikan donasi pada penyelesaian masalah sosial seperti pengangguran (Nurhidayanti & Akbar, 2023). Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan terhadap pedagang kaki lima yang telah direlokasi ke Pasar Mini Datah Manuah, terdapat berbagai strategi bertahan hidup yang mereka terapkan, antara lain:

1. Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Promosi Usaha

   Para pedagang memanfaatkan media sosial, seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, dan TikTok, sebagai alat untuk mempromosikan produk mereka dan menjangkau konsumen lebih luas. Menurut (Hamizar, 2023) pedagang kaki lima juga dapat memanfaatkan media sosial dan teknologi informasi untuk mempromosikan produk dan menjangkau konsumen yang lebih luas. Salah satu contoh adalah dengan memanfaatkan platform e-commerce atau media sosial untuk memasarkan produk dan menerima pesanan dari konsumen. Dengan transformasi digital ini membantu dalam proses pengelolaan digital sehingga mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi (Febriansyah & Husnayanti, 2024). Dalam wawancara yang telah dilakukan, salah satu informan mengatakan bahwasanya media sosial terutama Tiktok, sangat membantunya memperluas pemasaran usahanya:

   > "*saya sendiri masukkan ke Tiktok usaha sate saya"* (wawancara D, 30 Mei 2025).

   Strategi ini mencerminkan adaptasi mereka terhadap era digital dan merupakan langkah penting dalam memperluas jaringan pemasaran. Menurut (Lubis, 2023) teknologi merupakan hasil dari upaya manusia untuk memudahkan aktivitas di berbagai sektor yang akhirnya mampu untuk memaksimalkan dan mengefisiensi waktu. Selain itu juga, teknologi merupakan hasil dari implementasi keistimewaan manusia sebagai makhluk hidup yang melebihi yang lainnya. Sebab teknologi menghasilkan sebuah dunia baru melalui penciptaan media sosial yang saat ini selalu digunakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menggunakan teknologi digital, pelaku sektor informal menunjukkan bahwa mereka tidak tertinggal dalam hal inovasi. Sebaliknya, mereka berhasil menggunakan alat komunikasi ke dalam praktik ekonomi sehari-hari.

2. Membangun Hubungan Sosial dengan Komunitas Sekitar

   Ada juga pedagang membangun hubungan yang akrab dengan komunitas pemuda yang sering bermain bola. Strategi ini berfungsi untuk menarik minat para pemuda dalam membeli jualannya, sehingga menciptakan promosi dari mulut ke mulut yang berdampak positif terhadap peningkatan jumlah pelanggan. Seperti yang disampaikan oleh salah satu pedagang mengatakan:

   > "*Ada kegiatan turnamen bola anak-anak batak, terus saya ikuti mereka supaya mereka lebih kenal dengan saya. Karena kalau mereka kenal sama saya pasti mereka bilang oh itu warungnya"* (wawancara E, 26 April 2025).

   Kedekatan dengan komunitas pemuda, juga memiliki efek positif pada promosi usaha dagangan. Hubungan sosial yang baik ini membantu memperluas pemasaran usahanya, dengan begitu dagangan jadi lebih cepat laku dan pembeli pun semakin banyak.

3. Menambah Waktu dan Tempat Berjualan untuk Menambah Penghasilan

   Pedagang memilih untuk mengoptimalkan pendapatan mereka dengan berjualan dalam dua sesi waktu. Dengan mulai berjualan di pagi hari di lokasi tertentu seperti di sekitar lingkungan sekolah, lalu melanjutkan aktivitas berdagang di Pasar Mini Datah Manuah pada sore hingga malam hari seperti yang dikatakan oleh salah satu pedagang:

> "*Paling nanti kalau anak-anak ke sekolah baru jalan lagi untuk jualan di sekolah, terus malamnya berjualan lagi di Pasar Mini*". (wawancara F, 30 Mei 2025).

Strategi yang diterapkan oleh PKL menunjukkan bahwa proses relokasi tidak hanya memerlukan penyesuaian fisik terhadap lokasi baru, tetapi juga membutuhkan adaptasi dalam aspek sosial, ekonomi, dan teknologi. Selain itu ada juga keluhan dari para pedagang yang mengatakan bahwasanya kebijakan relokasi ini tidak memberikan keuntungan bagi para pedagang.Walaupun begitu, tidak semua pedagang mengalami hal yang sama ada pedagang yang justru mendapat peningkatan jumlah pelanggan dan pendapatan jenis dagangannya disukai banyak orang.

Hal ini bisa disebabkan oleh letak lapak yang kurang strategis, jenis dagangan yang kurang diminati. Perbedaan ini menunjukkan bahwa dampak relokasi tergantung pada banyak hal, termasuk strategi pedagang dan kondisi di sekitar tempat berdagang. Oleh karena itu, kebijakan relokasi yang dilakukan oleh pemerintah seharusnya disertai dengan dukungan fasilitas seperti lampu, tenda, bantuan dana dari pemerintah dan lapak yang cukup luas untuk tempat berjualan dan kebijakan relokasi yang dilakukan pemerintah sebaiknya tidak hanya berorientasi pada estetika dan penataan kota, tetapi disertai dengan kerjasama antara kebijakan penataan perkotaan dan program pemberdayaan ekonomi sehingga usaha para pedagang tetap berjalan walaupun mereka menghadapi perubahan lingkungan usaha dan juga agar menciptakan kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pedagang kaki lima (PKL) ke pasar Mini Datah Manuah, jalan Yos Sudarso, Kota Palangka Raya, membawa dampak yang sangat beragam bagi kehidupan ekonomi para pedagang PKl. Beberapa pedagang mengalami penurunan jumlah pelanggan dan pendapatan karena lokasi baru, karena fasilitas pasar yang kurang memadai, area parkir yang terbatas, lokasi pasar yang kurang strategis, penerangan tempat berdagang yang minim. Di sisi lain, beberapa pedagang yang justru mengalami peningkatan jumlah pembeli, karena jenis dagangan yang diminati masyarakat. Ketika berhadapan dengan kondisi pasca relokasi, para PKL menunjukkan kemampuan beradaptasi yang tinggi dengan menerapkan berbagai strategi bertahan hidup yaitu:

a. Penggunaan media sosial seperti Tikok, Facebook, Instagram, WhatsApp untuk mempromosikan dagangannya
b. Membangun hubungan sosial dengan pemuda-pemuda sebagai bentuk promosi agar diketahui ramai orang, sehingga menciptakan promosi dari mulut ke mulut
c. Menambah waktu dan tetmpat berjualam untuk mengoptimalkan pendapatan dengan berjualan ke lingkungan sekolah untuk mendapatkan penghasilan lebih

Temuan ini menunjukkan bahwa proses relokasi tidak hanya membutuhkan adaptasi fisik ke lokasi baru, tetapi juga penyesuaian sosial, ekonomi dan teknologi. Dengan demikian diperlukan kerjasama antara penataan kota dan program pemberdayaan ekonomi informal agar relokasi bisa berjalan dengan adil dan berkelanjutan. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan relokasi tidak hanya diarahkan pada estetika dan penataan kota, tetapi juga memperhatikan kelangsungan hidup dan kesejahteraan para pedagang PKL di sektor informal. Hanya dengan pendekatan yang inklusif akan menjadi peluang dan tidak ada hambatan untuk pengembangan usaha pedagang kaki lima di masa depan.

Ucapan Terima kasih

Kami mengucapkan Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena Kasih dan Rahmat-Nya kami bisa menyelesaikan artikel penelitian ini dengan judul "Strategi Bertahan Hidup Pedagang Kaki Lima Pasca Relokasi Ke Pasar Mini Datah Manuah, Di Jalan Yos Sudarso Kota Palangka Raya".
Dan kami juga berterimakasih juga kepada dosen pembimbing penelitian kami yaitu Ibu Elia Damayanti, S.P.,M,SI dan kepada pedagang di Pasar Mini Datah Manuah yang sudah meluangkan waktunya untuk kami wawancara dan memberikan informasi yang bermanfaat.

REFERENSI

Anjasmari, N. M. M., & Hasna, N. O. (2023). Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pasar Paringin Kabupaten Balangan. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, *2*(10), 4457–4465. https://doi.org/10.55681/sentri.v2i10.1688

Husnayanti, A. (2024). *Keamanan Sistem Informasi Pemilu Melalui Computer Security Incident Response Team (Csirt) Pemilu Serentak 2024*. *3*(4), 65–82.

Jannah, R. (2021). Strategi dan implementasi pengembangan pasar pemerintah datah manuah kota palangka raya. *Journal Ekonomi Syariah*, hlm.1-90.

Larasati, D. C. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL). *JISIP : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, *10*(3), 193–201. https://doi.org/10.33366/jisip.v10i3.2313

Lubis, M. F., & Sosiologi, P. (2023). *Analisis Perilaku Sosial Dalam Dunia Digital*. *2*(1), 1–14.

Nugraha, Y. (2019). *Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah*. 13.

Nurhidayanti, D., & Akbar, E. E. (2023). Strategi Usaha Pedagang Kaki Lima (Pkl) Di Kota Metro: Pasca Pandemi Covid-19. *Jurnal Maneksi*, *12*(1), 149–157. https://doi.org/10.31959/jm.v12i1.1359

Octaviani, S. L., & Puspitasari, A. Y. (2022). Studi Literatur : Penataan Dan Pemberdayaan Sektor Informal: Pedagang Kaki Lima. *Jurnal Kajian Ruang*, *1*(1), 130. https://doi.org/10.30659/jkr.v1i1.19991

Rivaldo, F., & Ulfah, S. M. (2021). *ANALISIS KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) DALAM PENATAAN PEDAGANG KREATIF LAPANGAN (PKL) DI KOTA PALANGKA RAYA*. *10*(2), 74–84.

Setia, R. (2009). Ekonomi Informal Perkotaan: Sebuah Kasus Tentang Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung. *Akatiga*, 1–40.

Subkhi Mahmasani. (2020). *View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk*. *13*,

274–282.

Ulzikri, A. R. (2020). Perspektif Lembaga Swadaya Masyarakat Lokal dan Pemerintah Daerah Terhadap Sumberdaya Alam (Discourse Analisis dalam Kasus Eksploitasi Pasir di Perairan Krakatau Lampung Selatan). *Jurnal Public Policy*, *6*(2), 56. https://doi.org/10.35308/jpp.v6i2.1994

Vol. 4, No. 2, Juni 2025
e-ISSN: 2964-1322
p-ISSN: 2964-9595

JIPOSSTER: Jurnal Ilmu Politik dan Studi Sosial Terapan

Pengawasan Pemilu 2024 oleh Bawaslu Jakarta Selatan: Tinjauan Kepatuhan Hukum

Geby Monica Simbolon[(1)*], M Ajie Prakoso[(2)]
Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, Medan, Kode Pos 20155, Indonesia
Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Veteran Jakarta, Jakarta Selatan, 12450,Indonesia
Email : gebymonicasimbolon@gmail.com

ABSTRAK

Badan Pengawasan Pemilu merupakan salah satu lembaga penyelenggara pemilu yang memiliki keterkaitan langsung dengan Komisi Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Penelitian ini mengambil Bawaslu Jakarta Selatan sebagai objek untuk menganalisis peran Bawaslu dalam menjaga integritas Pemilihan Umum Indonesia 2024. Penelitian ini merupakan studi kasus yang mengkaji perilaku Bawaslu dalam menjalankan fungsi pengawasan serta menelaah struktur birokrasi yang ada di dalamnya. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, fokus penelitian ini adalah bagaimana sikap Bawaslu dalam mengawasi proses persiapan penyelenggaraan pemilu. Bawaslu juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pemilu dengan menjaga integritas serta membangun birokrasi yang patuh pada hukum. Meskipun memiliki kewenangan terbatas, Bawaslu dituntut untuk menjalankan tugas secara jujur dan tunduk pada hukum yang berlaku. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi Bawaslu dan implementasi kepatuhan hukum telah dijalankan secara maksimal oleh Bawaslu Jakarta Selatan.

Kata kunci: Bawaslu, integritas pemilu, kepatuhan hukum, pengawasan pemilu, struktur birokrasi

ABSTRACT

The Election Supervisory Agency is one of the institutions responsible for organizing elections, working in coordination with the General Elections Commission and the Election Organizer Honorary Council. This research takes the South Jakarta Election Supervisory Board (Bawaslu) as the object of analysis to examine its role in maintaining the integrity of the 2024 Indonesian General Elections. The study is a case study that analyzes the behavior of Bawaslu in carrying out its duties and explores the bureaucratic structure within the institution. Referring to Law Number 7 of 2017 on General Elections, this study focuses on how Bawaslu monitors the preparation phase of the election process. Bawaslu plays a significant role in enhancing the quality of election administration by upholding integrity and ensuring a bureaucracy that complies with legal standards. Despite its limited authority, Bawaslu holds a critical and sacred role, requiring honesty and strict adherence to legal norms. The results of this research show that the functions of Bawaslu and the implementation of legal compliance have been effectively conducted by South Jakarta Bawaslu.

Keywords: *Bawaslu, bureaucratic structure, election integrity, election supervision, legal compliance*

Submit:	Revised:	Accepted:	Available online:
28.06.2025	29.06.2025	29.06.2025	30.06.2025

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan indikator penting dalam mewujudkan negara demokratis yang sehat, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat. Hal ini selaras dengan nilai-nilai dasar Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta prinsip demokrasi yang jujur dan adil. Dalam konteks tersebut, fungsi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjadi sangat vital, yaitu mengawasi, menjaga, mencegah, serta menindak setiap bentuk pelanggaran yang terjadi dalam proses Pemilu. Dalam sistem demokrasi, birokrasi berperan penting sebagai pelaksana kebijakan publik, termasuk dalam menjamin proses Pemilu yang transparan dan akuntabel (Priyatna, 2022).Pemilu memang menjadi fenomena yang melekat pada negara demokratis, namun keberadaan Pemilu saja tidak cukup menjamin terlaksananya demokrasi. Demokrasi membutuhkan lebih dari sekadar rutinitas elektoral; ia memerlukan partisipasi aktif masyarakat dan sistem birokrasi yang kuat dalam menjamin integritas serta keabsahan proses politik(Ulzikri, 2019). Dalam hal ini, kehadiran lembaga birokrasi seperti Bawaslu menjadi instrumen penting dalam pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum Pemilu (Efriza, 2012: 359).

Bawaslu Jakarta Selatan, sebagai bagian dari Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, memiliki peran yang sangat penting mengingat wilayah ini memiliki dinamika politik yang tinggi dalam setiap pelaksanaan Pemilu. Komitmen Bawaslu terhadap keterbukaan informasi, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, juga menunjukkan tekad lembaga ini dalam membangun transparansi dan meningkatkan partisipasi masyarakat.Namun, dalam pelaksanaan Pemilu 2024, muncul tantangan-tantangan besar yang berkaitan dengan lemahnya penegakan hukum, ketidakefektifan Posko Pengaduan Masyarakat, serta rendahnya minat masyarakat dalam melaporkan pelanggaran. Hal ini menciptakan ruang bagi ketidakpercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara Pemilu, dan pada akhirnya dapat mengganggu legitimasi hasil Pemilu itu sendiri.

Identifikasi masalah dalam penelitian ini merujuk pada bagaimana fungsi Bawaslu Jakarta Selatan dalam menjalankan peran pengawasan, khususnya dalam konteks implementasi *legal compliance* atau kepatuhan hukum selama Pemilu 2024. Permasalahan lainnya mencakup rendahnya efektivitas pengawasan terhadap pelanggaran Pemilu, serta kelemahan Bawaslu dalam membangun partisipasi dan kepercayaan publik secara menyeluruh.Hipotesis yang diajukan adalah bahwa efektivitas fungsi pengawasan Bawaslu Jakarta Selatan secara langsung dipengaruhi oleh sejauh mana lembaga ini mampu mengimplementasikan kepatuhan hukum dan membangun transparansi birokrasi secara konsisten.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana Bawaslu Jakarta Selatan menjalankan fungsi pengawasan Pemilu 2024 berdasarkan prinsip *legal compliance*, serta mengidentifikasi tantangan dan solusi dalam meningkatkan integritas Pemilu melalui penguatan birokrasi dan partisipasi publik. Dalam memahami peran Bawaslu sebagai bagian dari sistem pengawasan Pemilu, kajian pustaka menjadi penting untuk memberikan landasan konseptual. Efriza (2012) menyatakan bahwa Pemilu merupakan sarana legitimasi politik yang tidak hanya memilih pemimpin, tetapi juga menyatukan masyarakat dalam proses demokrasi. Lebih lanjut, Priyatna (2022) menjelaskan bahwa birokrasi dalam sistem demokrasi bertanggung jawab sebagai pelaksana kebijakan publik, termasuk dalam pengawasan Pemilu.Konsep *legal compliance* menjadi kunci dalam membangun integritas lembaga pengawas. Menurut Hadjon (2020), kepatuhan hukum merupakan bentuk ketaatan terhadap norma-norma hukum yang berlaku sebagai dasar legitimasi tindakan pemerintahan. Dengan demikian, rule of law tidak hanya menjadi prinsip dasar dalam sistem hukum yang adil, tetapi juga pilar dalam menciptakan birokrasi yang responsif dan demokratis.

Sebagai tambahan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memberikan kerangka hukum yang tegas mengenai fungsi dan wewenang Bawaslu. Namun, tumpang tindih regulasi seperti UU No. 10 Tahun 2016 masih menjadi hambatan dalam efektivitas penanganan pelanggaran pidana Pemilu oleh pemilih, yang berpotensi menurunkan kualitas demokrasi elektoral.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik kajian literatur sebagai metode utama. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman mendalam mengenai perilaku dan fungsi kelembagaan, khususnya dalam konteks pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Jakarta Selatan. Lokasi penelitian berfokus pada wilayah administrasi Jakarta Selatan, dengan subjek utama yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta Selatan, khususnya melalui wawancara langsung dengan Ketua Bawaslu Jakarta Selatan, Ibu Atiq.Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik wawancara langsung dan observasi, yang dilakukan terhadap aktivitas dan kinerja kelembagaan Bawaslu selama proses pengawasan Pemilu 2024. Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal ilmiah, serta berita-berita aktual yang relevan dengan isu integritas Pemilu dan kepatuhan hukum. Buku-buku yang digunakan antara lain *Legal Compliance: A Manager's Guide to Law and Regulation* karya Donald C. Dowling Jr., serta *Hukum Pemilu Indonesia* oleh Jimly Asshiddiqie.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, yakni dengan menjelaskan dan menginterpretasikan data terkait fungsi birokrasi Bawaslu serta menghubungkannya dengan fenomena pengawasan Pemilu. Melalui proses interpretatif ini, peneliti mencari korelasi antara fungsi kelembagaan dan fenomena yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang luas terhadap bagaimana Bawaslu Jakarta Selatan menjalankan perannya dalam menjaga integritas dan legalitas pelaksanaan Pemilu secara menyeluruh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Integritas pada Fungsi Bawaslu

Pemilihan umum dilaksanakan sebagai mekanisme untuk memilih pemimpin yang dianggap mampu membawa negara ke arah yang lebih baik serta mendorong peningkatan kualitas masyarakat. Undang-Undang No. 35 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah menyebutkan bahwa pelaksanaan kekuasaan Bawaslu mensyaratkan adanya pengawasan terhadap kewenangan politik dan administratif oleh Komisi Penyelenggara Umum, baik di tingkat pusat maupun daerah, guna memastikan bahwa pelaksanaan wewenang dan tugas pemerintah sejalan dengan kode etik serta hukum yang berlaku (Antari, 2018).

Winston Churchill menyatakan bahwa pemilihan pemimpin diperlukan sebagai bagian dari mekanisme pemerintahan dalam membangun demokrasi serta mendorong partisipasi masyarakat. Pemilu dapat dikatakan berjalan dengan baik apabila diselenggarakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Untuk menjamin hal tersebut, dibutuhkan lembaga pengawas, yakni Bawaslu.

Bawaslu Jakarta Selatan memiliki tanggung jawab atas lebih dari 10 kecamatan dan 65 kelurahan. Melalui slogan "Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu," Bawaslu menunjukkan komitmennya dalam pengawasan proses demokrasi. Lembaga ini juga telah mengeluarkan Peraturan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang memperkuat fungsinya sebagai salah satu unsur penting dalam sistem birokrasi pengawasan pemilu.

Secara teoritis, pengawasan didefinisikan sebagai suatu tindakan untuk menjamin bahwa tujuan pelaksanaan pemilu tercapai melalui pengelolaan kebijakan dan kewenangan secara struktural demi mewujudkan proses pemilu yang aman dan sesuai harapan (Yohanes Yahya, 2006:133). Penelitian ini juga dilakukan melalui studi lapangan, dengan narasumber Ibu Atiq Amala, Ketua Bawaslu Jakarta Selatan. Dalam pelaksanaannya, Bawaslu Jakarta Selatan memiliki sejumlah divisi, seperti Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas; Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi; Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan; serta Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, sebagaimana diatur dalam Perbawaslu No. 3 Tahun.

Penelitian ini berfokus pada bagaimana Bawaslu menjalankan tugasnya sebagai bagian dari birokrasi pemerintahan yang berlandaskan pada kepatuhan hukum. Fungsi Bawaslu Jakarta Selatan sering kali hanya dipandang sebatas pengawasan Pemilu dan Pilkada, padahal lembaga ini juga berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan proses demokrasi. Tingginya angka partisipasi masyarakat menjadi cerminan dari keberhasilan fungsi ini (Budiardjo, 2009).

Integritas merupakan elemen penting yang harus dijaga oleh Bawaslu. Secara umum, integritas diartikan sebagai keselarasan antara ucapan dan tindakan yang mencerminkan keteguhan dalam menjunjung nilai-nilai luhur dan keyakinan (Pedoman Simposium, 2016). Abhan (2017) menyatakan bahwa Bawaslu memiliki peran yang sangat strategis dalam mengawal demokrasi agar Indonesia dipimpin oleh figur yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila (Wahid, 2003).

Namun, dalam praktiknya, fungsi Bawaslu Jakarta Selatan tidak luput dari tuduhan dan dugaan pelanggaran yang dapat memicu beragam persepsi di tengah masyarakat. Berdasarkan Teori Kepatuhan Hukum, Bawaslu harus senantiasa menjalankan tugas sesuai dengan hukum yang berlaku. Soekanto menjelaskan bahwa kepatuhan sejati adalah hasil internalisasi nilai-nilai yang terbentuk melalui interaksi internal dan eksternal. Kepatuhan bukan hanya sekadar tindakan, tetapi mencerminkan nilai dalam perilaku individu. Interaksi sosial juga dapat memengaruhi pengetahuan, sikap, dan kebiasaan yang berdampak pada perilaku (Suadi, 2018:196).

Dari hasil wawancara, diketahui bahwa wilayah pengawasan Bawaslu Jakarta Selatan mencakup daerah dari Tebet (kode administratif 31.74.01) hingga Cilandak (31.74.06). Mengingat cakupan wilayahnya yang luas, dibutuhkan struktur organisasi yang terkoordinasi dan supremasi hukum yang kuat. Integritas tidak hanya menjadi visi, tetapi juga tujuan dan pegangan utama bagi kekuatan organisasi. Integritas mencerminkan kejujuran, keberanian dalam bertindak, serta dedikasi yang berkesinambungan terhadap nilai-nilai moral. Kesadaran akan pentingnya integritas ini berakar pada kebijakan dalam UU No. 7 Tahun 2017.

Bawaslu Jakarta Selatan menegaskan pentingnya integritas dalam pelaksanaan pemilu, sebagaimana diuraikan oleh Muck dan Verkuilen (2002):

1. Pemilu harus inklusif, memungkinkan semua warga negara menggunakan hak pilihnya secara efektif.
2. Pemilu harus bersih, yang berarti preferensi pemilih dihormati dan tercatat secara benar.
3. Pemilu harus kompetitif, memberikan pilihan adil antar kandidat kepada pemilih.
4. Jabatan publik harus diakses melalui pemilu berkala, dan hasilnya mencerminkan suara rakyat.

Dalam rangka memperkuat integritas, Bawaslu Jakarta Selatan perlu menganalisis berbagai tantangan aktual, seperti Indeks Kerawanan Pemilu (IKP). IKP merupakan instrumen untuk mendeteksi secara dini potensi kerawanan menjelang pelaksanaan pemilu atau pilkada. Segala hal yang berpotensi mengganggu demokrasi perlu dicegah dan diminimalkan. Tingginya angka IKP menjadi indikator penting yang harus mendapat perhatian serius dari Bawaslu (Rahmat Bagja, 2024).

Kerawanan pemilu sering kali dipicu oleh perbedaan kepentingan, motif tertentu, serta dinamika sosial yang berkembang (Selo Soemardjan, 2009). Oleh karena itu, menjaga integritas menjadi sangat penting agar Bawaslu tetap berpegang pada prinsip hukum. Kepatuhan terhadap hukum dapat memperkuat integritas serta menjamin kelangsungan pemilu yang sehat dan adil. Dengan membangun integritas yang kokoh, Bawaslu Jakarta Selatan mampu menjadi contoh dalam birokrasi yang taat hukum.

Sebagai lembaga pengawas, Bawaslu Jakarta Selatan memainkan peran sentral dalam memastikan proses demokrasi berjalan secara adil dan jujur. Dalam konteks Pemilu 2024, Bawaslu telah melakukan pengawasan aktif dan mendorong seluruh wilayah untuk memanfaatkan fungsi divisi-divisi yang telah dibentuk. Untuk menjamin integritas penyelenggara pemilu, Bawaslu juga menetapkan parameter melalui kode etik, yang menjadi pedoman utama dalam menjalankan tugas. Penegakan kode etik tersebut berada di bawah kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

B. Implementasi Legal Compliance

Penerapan penegakan hukum, yang juga dikenal sebagai kepatuhan hukum, merupakan wujud kesadaran yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas Bawaslu Jakarta Selatan selama Pemilu 2024, guna menjamin proses pemilu yang adil dan transparan. Bawaslu Jakarta Selatan harus memastikan bahwa setiap tahapan pemilu, mulai dari seleksi calon hingga pemungutan dan penghitungan suara, dilaksanakan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum merupakan proses bertindak atau menjalankan aturan sebagai pedoman hukum yang benar dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ia menekankan pentingnya norma hukum sebagai acuan dalam komunikasi publik dan administrasi. Kepatuhan terhadap hukum menjadi kunci utama untuk mewujudkan keadilan, kebenaran, serta

kemaslahatan dalam kehidupan sosial. Dalam pendekatan sosiologis, hukum mencakup berbagai elemen seperti rencana tindakan, perilaku, serta kondisi tertentu yang menyertainya.



Gambar 1. Jumlah Pelanggaran Pemilu di Bawaslu Jakarta Selatan (2019-2024)
Sumber: https://ppid.jakarta.bawaslu.go.id (diakses 27 Juni 2025)

Abdul Manan dalam *Aspek-aspek Pengubah Hukum* (2006), serta Asshiddiqie (2014), juga menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan secara konsisten sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini termasuk dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye, deteksi dini terhadap pelanggaran, serta penanganan aduan dan sengketa secara profesional dan objektif.Berdasarkan hasil wawancara, Bawaslu Jakarta Selatan menjadikan kepatuhan hukum sebagai prinsip utama dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pengawas independen. Ini menunjukkan pentingnya memastikan seluruh proses pemilu berjalan secara adil, transparan, dan sesuai hukum.Langkah normatif yang perlu ditempuh Bawaslu Jakarta Selatan antara lain memantau secara aktif potensi pelanggaran pemilu seperti politik uang, serangan fajar, atau intimidasi terhadap pemilih. Soerjono Soekanto (1986) menyebutkan tiga faktor utama yang mempengaruhi kepatuhan hukum masyarakat:

1. Kepatuhan – Masyarakat mematuhi hukum karena mengharapkan imbalan atau ingin menghindari hukuman, bukan karena yakin akan nilai aturan itu sendiri.
2. Identifikasi – Ketaatan muncul karena keinginan mempertahankan hubungan dengan kelompok atau figur tertentu.
3. Internalisasi – Kepatuhan timbul karena aturan dirasa sejalan dengan nilai-nilai pribadi, tanpa tergantung pada pengawasan dari luar.

Dalam menangani aduan dan sengketa, Bawaslu Jakarta Selatan memikul tanggung jawab besar untuk bertindak secara cermat dan adil sesuai dengan prosedur hukum yang telah ditentukan (Bawaslu, 2024). Mereka harus memeriksa laporan secara menyeluruh, mengumpulkan bukti yang relevan, dan memastikan proses penanganan dilakukan tanpa diskriminasi. Setiap tahapan, mulai dari penerimaan laporan, penyelidikan, pembuktian, hingga pengambilan keputusan, harus dijalankan dengan ketat dan berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Yang tak kalah penting, Bawaslu harus menjalankan fungsi pengawasannya tanpa intervensi politik, agar keputusan yang diambil bersifat netral dan adil. Ini penting untuk memastikan hasil pemilu benar-benar mencerminkan kehendak rakyat dan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

Untuk mendukung pelaksanaan kepatuhan hukum secara efektif, langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan Bawaslu Jakarta Selatan antara lain:

- Penyusunan Pedoman dan Prosedur: Menyusun petunjuk teknis dan prosedur yang sistematis sesuai dengan ketentuan hukum dalam setiap tahapan pengawasan pemilu.
- Pelatihan dan Edukasi: Memberikan pembekalan kepada seluruh anggota Bawaslu mengenai kepatuhan hukum, pengenalan aturan pemilu, serta teknik penanganan sengketa secara objektif.

- Pemantauan dan Evaluasi: Melakukan pemantauan secara kontinu serta evaluasi kinerja internal untuk memastikan pelaksanaan tugas berjalan sesuai hukum.
- Kolaborasi dengan Pihak Terkait: Menjalin kerja sama dengan lembaga lain seperti KPU dan aparat kepolisian guna memperkuat koordinasi serta penegakan hukum dalam pengawasan pemilu.
- Transparansi dan Akuntabilitas: Menjamin keterbukaan dan pertanggungjawaban publik melalui publikasi laporan pengawasan, penanganan pelanggaran, dan keputusan sengketa secara terbuka.

Bentuk-Bentuk Implementasi Legal Compliance

Implementasi kepatuhan hukum mencakup penyusunan pedoman dan prosedur teknis yang mendetail sebagai acuan pelaksanaan pengawasan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Ini mencakup pula pelatihan internal yang membekali anggota Bawaslu dengan pemahaman hukum, teknik pengawasan, serta metode penanganan sengketa yang adil dan objektif.

Aspek lain adalah pemantauan dan evaluasi rutin, kolaborasi lintas lembaga seperti dengan KPU dan kepolisian, serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kegiatan. Semua ini bertujuan agar Bawaslu Jakarta Selatan mampu membangun pengawasan pemilu yang legal, adil, dan dipercaya masyarakat.



Gambar 1. Dokumentasi setelah wawancara dengan Bu Atiq Amalia selaku Ketua Bawaslu Kota Jakarta Selatan

Sumber: Dokumentasi Penulis

B. Tantangan yang Dihadapi Bawaslu Jakarta Selatan dalam Implementasi Legal Compliance

Sebagai bagian dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Bawaslu Jakarta Selatan memiliki peran penting dalam menjalankan tugas pengawasan pemilu di tingkat daerah. Sebagai bagian dari birokrasi negara, lembaga ini menghadapi berbagai tantangan dalam memastikan pelaksanaan hukum secara konsisten. Penelitian ini menggali lebih dalam berbagai kendala yang dihadapi serta langkah-langkah yang ditempuh untuk mengatasinya.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi Bawaslu Jakarta Selatan adalah menangani pelanggaran hukum selama proses pemilu. Bentuk pelanggaran ini dapat berupa praktik politik uang, intimidasi terhadap pemilih, hingga penyalahgunaan fasilitas negara untuk kepentingan politik

tertentu. Menegakkan kepatuhan dalam kondisi seperti ini tentu bukan perkara mudah, terlebih karena adanya benturan kepentingan politik dan ekonomi yang sering kali saling bertentangan.

Selain itu, koordinasi yang kompleks dengan berbagai pemangku kepentingan juga menjadi tantangan tersendiri. Bawaslu Jakarta Selatan perlu menjalin kolaborasi dengan banyak pihak, seperti instansi pemerintah, partai politik, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan masyarakat sipil agar pengawasan dapat berjalan secara efektif. Koordinasi yang baik sangat penting untuk memastikan penyampaian informasi yang akurat dan tepat waktu, sekaligus menghindari terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan penegakan hukum.

Tidak hanya dari sisi eksternal, tantangan internal pun menjadi perhatian serius. Keterbatasan anggaran dan jumlah personel sering kali menghambat efektivitas pengawasan. Pengawasan yang komprehensif membutuhkan dukungan sumber daya yang mencukupi, termasuk untuk kegiatan investigasi dan pengumpulan bukti terhadap pelanggaran pemilu.

Di sisi lain, tekanan politik serta pengaruh opini publik menjadi tantangan eksternal yang signifikan. Dalam situasi tertentu, tekanan dari pihak berkepentingan dapat memengaruhi netralitas dan independensi Bawaslu dalam mengambil keputusan.Sebagai respons atas berbagai tantangan tersebut, Bawaslu Jakarta Selatan telah mengambil sejumlah langkah strategis. Salah satunya adalah memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk lembaga pemerintah, partai politik, LSM, dan masyarakat sipil. Kolaborasi ini bertujuan untuk memperkuat posisi Bawaslu dalam menjalankan tugasnya serta meningkatkan efektivitas pengawasan pemilu.Selain itu, Bawaslu juga terus meningkatkan kapasitas sumber daya yang dimiliki, baik dari segi anggaran maupun personel. Upaya ini termasuk memberikan pelatihan dan pengembangan kompetensi kepada jajaran Bawaslu Jakarta Selatan agar memiliki keterampilan dalam teknik investigasi, penyidikan, serta penanganan pelanggaran secara profesional.



Gambar 2. Ketua Bawaslu Jaksel Atiq Amalia memberi keterangan kepada media di Jakarta, Selasa (13/2/2024).

Sumber: Publikasi ANTARA/ Khaerul Izan

Transparansi dan akuntabilitas pun menjadi prinsip utama yang dijalankan secara konsisten. Bawaslu Jakarta Selatan harus memastikan seluruh proses pengawasan berlangsung secara terbuka dan dapat diawasi oleh publik. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini dapat terus ditingkatkan. Bawaslu juga harus siap mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang diambil, baik kepada pemerintah maupun kepada masyarakat sebagai bentuk nyata dari akuntabilitas kelembagaan.

KESIMPULAN

Transparansi dan akuntabilitas pun menjadi prinsip utama yang dijalankan secara konsisten. Bawaslu Jakarta Selatan harus memastikan seluruh proses pengawasan berlangsung secara terbuka dan dapat diawasi oleh publik. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini dapat terus ditingkatkan. Bawaslu juga harus siap mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang diambil, baik kepada pemerintah maupun kepada masyarakat sebagai bentuk nyata dari akuntabilitas kelembagaan.

Ucapan Terima kasih

Penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Atiq Amalia selaku Ketua Bawaslu Jakarta Selatan atas kesediaan beliau menjadi narasumber dalam penelitian ini. Kontribusi informasi, pandangan, serta waktu yang diberikan sangat membantu dalam memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait implementasi fungsi pengawasan dan kepatuhan hukum oleh Bawaslu Jakarta Selatan dalam konteks Pemilu 2024. Dukungan dan kerja sama yang diberikan menjadi bagian penting dalam tersusunnya artikel ini

REFERENSI

Antara News. (2022). *Bawaslu Jakarta Selatan buka meja layanan pemantau Pemilu*. https://www.antaranews.com/berita/2933173/bawaslu-jakarta-selatan-buka-meja-layanan-pemantau-pemilu-2024

Asshiddiqie, J. (2014). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Bawaslu.go.id. (n.d.). *Profil tugas, wewenang, dan kewajiban*. https://www.bawaslu.go.id/id/profil/tugas-wewenang-dan-kewajiban

Dowling Jr., D. C. (2010). *Legal Compliance: A Manager's Guide to Law and Regulation*. New York: LexisNexis.

Efriza. (2012). Birokrasi dan Demokrasi dalam Pemilu Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 15(3), 358–370.

Hadjon, P. M. (2020). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Universitas Airlangga Press.

Irwan, A. L. (2008). Pelaksanaan otonomi daerah dalam mendukung pelaksanaan good governance di Indonesia. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 1(1), 89–98.

Josviranto, M. (2022). Penguatan Bawaslu dalam penegakan hukum pada Pemilu serentak tahun 2024. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 4–5.

Jonathan, P. (2023). *Mendagri copot Pj Bupati Kampar, salah satu alasannya tak netral dalam Pemilu*. https://www.liputan6.com/pemilu/read/5485801/mendagri-copot-pj-bupati-kampar-salah-satu-alasannya-tak-netral-dalam-pemilu

Khopipah, S., Susilowardhani, D., Djuhardi, L., Lubis, A., & Putri, A. (2023). Manajemen kampanye humas Bawaslu Kota Jakarta Selatan melalui media online sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu 2024. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 23(1), 8.

Pedoman Simposium. (2016). *Integritas sebagai Nilai Moral Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: Bawaslu RI.

Priyatna, A. (2022). Peran Birokrasi dalam Menjamin Akuntabilitas Demokrasi. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, 9(2), 112–125.

Pradana. (2024). *Bawaslu awasi melekat penetapan hasil Pemilu 2024: Berikut catatan hasil pengawasannya*. https://bawaslu.go.id/id/berita/bawaslu-awasi-melekat-penetapan-hasil-pemilu-2024-berikut-catatan-hasil-pengawasannya

Rahmatunnisa, M. (2017). Mengapa integritas Pemilu itu penting. *Jurnal Bawaslu*, 3(1), 2–6.

Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Soemardjan, S. (2009). *Dinamika Sosial*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Suadi. (2018). *Perilaku Hukum dan Masyarakat*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

Ulzikri, A. R. (2019). Politik Nahdlatul Ulama Dalam Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden 2019 (Studi Pada Warga Nahdlatul Ulama Kota Bandar Lampung) [Universitas Lampung]. In *Digital Repository Universitas Lampung*. http://digilib.unila.ac.id/56674/

Wardhana. (2024). *Menjaga integritas demokrasi: Peran krusial Bawaslu dalam mengawal Pemilu*. https://mazwardhana.medium.com/menjaga-integritas-demokrasi-peran-krusial-bawaslu-dalam-mengawal-pemilu-0d8e280dfb52

Yohanes Yahya. (2006). *Pengawasan dalam Sistem Pemerintahan*. Yogyakarta: Liberty.

Yuhandra, J., Jalaludin, A., Akhaddhian, B., Budiman, & Andriyani. (2021). Efektivitas fungsi pencegahan Badan Pengawas Pemilu dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu. *Jurnal Ius Constituendum*, 8(1), 5–7.

Wahid, A. (2003). *Demokrasi Kita*. Jakarta: Grasindo.

Vol. 4, No. 2, Juni 2025
e-ISSN: 2964-1322
p-ISSN: 2964-9595

JIPOSSTER: Jurnal Ilmu Politik dan Studi Sosial Terapan

Analisis Persepsi Masyarakat Pinggiran Kota Palangka Raya Tentang Kebijakan Kementerian ESDM Yang Mengatur Pembelian Gas Dengan Antrean. Studi Kasus: Masyarakat Petuk Katimpun

Doni Dores [(1)*], Erina[(2)], Ayu Wulansari[(3)], Elia Damayanti[(4)], Saputra Adiwijaya[(5)], dan Muhammad Zusanri Batubara[(6)].
[(1, 2, 3, 4, 5, 6)] Sosiologi, Universitas Palangka Raya, Palangka Raya, 73112, Indonesia
Email : [(1*)]donidores4420@gmail.com

A B S T R A K

Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg merupakan salah satu kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari khususnya pada bidang memasak. Gas LPG 3 kg yang diperuntukan bagi masyarakat golongan bawah, sehingga pemerintah memberikan subsidi terhadap penjualan LPG 3kg sebagai bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat. Penelitian ini menggunakan teknik metode kuantitatif yang mana peneliti langsung terjun ke masyarakat dengan bantuan kuesioner untuk melihat bagaimana dan seperti apa persepsi masyarakat di Kelurahan Petuk Katimpun terhadap kebijakan pemerintah khususnya Kementerian ESDM, untuk melihat persepsi masyarakat terhadap kebijakan tersebut jadi, pembandingnya melihat dari segi ekonomi yaitu masyarakat golongan atas dan bawah. Secara garis besar, hasil yang didapatkan dari penelitian yang dilakukan, bahwa masyarakat setuju dengan adanya kebijakan ini karena memudahkan mereka untuk mendapatkan LPG tanpa harus merasa takut tidak kebagian, serta dengan adanya kebijakan ini pendistribusian gas bersubsidi dapat terealisasi secara merata dan tepat sasaran kepada masyarakat.

Kata kunci: Kebijakan, Gas LPG, Kelangkaan

A B S T R A C T

Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg is one of the needs of the community in everyday life, especially in the field of cooking. 3 kg LPG gas is intended for lower-class people, so the government provides subsidies for the sale of 3 kg LPG as a form of government attention to the community. This study uses a quantitative method technique where researchers go directly to the community with the help of a questionnaire to see how and what the perception of the community in Petuk Katimpun Village is towards government policies, especially the Ministry of Energy and Mineral Resources, to see the public's perception of the policy so, the comparison looks at it from an economic perspective, namely the upper and lower classes. In general, the results obtained from the research conducted, that the community agrees with this policy because it makes it easier for them to get LPG without having to be afraid of not getting any, and with this policy the distribution of subsidized gas can be realized evenly and on target to the community.

Keywords: *Policy, LPG Gas, Scarcity*

Submit:	Revised:	Accepted:	Available online:
31.05.2025	04.06.2025	29.06.2025	30.06.2025

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg merupakan bahan bakar yang digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk memasak terutama masyarakat golongan bawah. Mengingat kehadiran LPG 3 kg yang memang diperuntukkan secara khusus bagi masyarakat yang tidak mampu, maka pemerintah pun memberikan subsidi terhadap penjualan LPG 3 kg sebagai bentuk kepedulian untuk meringankan beban pengeluaran masyarakat (Karmilawati Dwi Rahayu et al. 2023). Dengan adanya subsidi yang diberikan negara, maka harga LPG 3 kg yang diterima masyarakat sudah cukup murah dari harga aslinya. Selain memberikan keringanan berupa subsidi, pemerintah Republik Indonesia juga memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh LPG 3 kg dengan membebaskan para pedagang kecil untuk mendistribusikan LPG 3 kg dengan cara dijual di tempat usaha mereka. Dengan demikian, pemerintah berharap bahwa LPG 3 kg dapat didistribusikan secara merata dan tepat sasaran, dibutuhkan juga pengawasan dari pihak pemerintah agar penyaluran tersebut dapat terealisasi dengan tepat (Parhesia et al., 2025).

Pada pelaksanaannya di lapangan, ternyata LPG 3 kg dijual oleh pedagang eceran dengan harga normal tanpa subsidi yang tentunya sangat memberatkan masyarakat (Ade Lia Novitasari et al. 2023). Hal tersebut tentunya langsung menjadi polemik di kalangan masyarakat yang selama ini tidak mengetahui bahwa pembelian atas LPG 3 kg telah disubsidi oleh negara melalui PT. Pertamina selaku pihak yang membidangi pendistribusian LPG yang dalam hal LPG 3 kg. Banyak masyarakat yang kaget karena ternyata harga LPG 3 kg yang mereka anggap normal selama ini merupakan harga yang sangat mahal jika dibandingkan dengan harga setelah subsidi. Selain itu, masyarakat juga melihat bahwa subsidi terhadap LPG 3 kg tidak tepat sasaran karena ada beberapa orang yang seharusnya mampu tetapi malah membeli LPG 3 kg yang sejatinya mendapat subsidi dan diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu.

Dengan melebarnya berita tentang penjualan LPG 3 kg yang tidak sesuai dengan harga subsidi dan pendistribusian yang tidak tepat sasaran tersebut, maka pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengeluarkan kebijakan bahwa LPG 3 kg tidak boleh lagi dijual eceran melainkan hanya boleh dijual oleh pangkalan yang sudah ada dan sub pangkalan yang rencananya akan dibuka kembali sehingga masyarakat harus mengikuti sistem antrean jika ingin membeli LPG 3 kg. Langkah ini dilakukan oleh pemerintah guna memastikan bahwa subsidi yang diberikan oleh negara dapat tepat sasaran dan tidak ada lagi pihak yang menjual LPG 3 kg di luar harga yang telah ditetapkan. Biasanya harga LPG 3 kg dijual secara eceran dengan harga yang tinggi, serta jauh dari pangkalan karena terpengaruh tempat yang kurang strategis yang mengakibatkan harga eceran sangat beda jauh dengan harga yang aslinya (Safitri et al., 2024).

Petuk Katimpun merupakan salah satu kelurahan yang ada di pinggiran Kota Palangka Raya yang mayoritas masyarakatnya adalah nelayan tradisional. Selain sebagai nelayan, masyarakat setempat juga memiliki usaha berjualan (UMKM). Dengan kondisi masyarakat yang demikian, tentunya sangat bergantung terhadap subsidi dan ketersediaan LPG 3 kg. Dengan adanya kebijakan pemerintah yang mengharuskan pembelian LPG 3 kg di pangkalan dan sub pangkalan dengan sistem antrean, maka akan berpengaruh bagi masyarakat Petuk Katimpun baik secara langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan fenomena masalah tersebut, maka kami selaku tim peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang tanggapan masyarakat terhadap realitas-realitas yang ada di masyarakat semenjak kebijakan tersebut diberlakukan. Ketertarikan kami untuk meneliti permasalahan tersebut, kami muat dalam judul **"Analisis Persepsi Masyarakat Pinggiran Kota Palangka Raya tentang Kebijakan Pembelian Gas 3 kg dengan antrean".** Penelitian ini akan dilaksanakan di Kelurahan Petuk Katimpun, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 15 April 2025. Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk Mengetahui persepsi masyarakat terhadap kebijakan Kementerian

ESDM tentang pembelian LPG 3 kg dengan antrean, mengetahui perbedaan persepsi antara masyarakat kalangan menengah ke bawah dengan masyarakat golongan menengah ke atas tentang kebijakan pembelian LPG 3 kg dengan antrean, serta mengetahui realitas yang ada di masyarakat semenjak diberlakukannya kebijakan pembelian LPG 3 kg dengan antrean.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode kuantitatif, dengan didukung oleh data kualitatif, sebagai data tambahan untuk menjelaskan secara mendalam tentang persepsi masyarakat tentang kebijakan Kementerian ESDM yang mengatur pembelian gas secara antrean di kalangan masyarakat Petuk Katimpun. Selain itu, analisis deskriptif juga penting dilakukan untuk memberikan interpretasi dan narasi yang lebih mendalam terhadap data yang diperoleh (Ul'zikri, 2024). Metode penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian dengan proses mengumpulkan dan menganalisis data yang berupa angka. Metode ini pada dasarnya merupakan bentuk yang lebih operasional dari paradigma empirisme yang sering disebut pendekatan kuantitatif-empiris. Metode penelitian kuantitatif memiliki arah dan cara yang lebih jelas, sistematis, dan terstruktur dari pertama sampai akhir penelitian dilakukan, serta tidak dapat terpengaruh oleh keadaan yang ada pada lapangan (Priadana & Sunarsi, 2021). Sedangkan metode kualitatif adalah penelitian yang didasarkan atas pengamatan obyektif partisipatif dan melihat fenomena-fenomena sosial yang terjadi di masyarakat dengan cara observasi dan wawancara langsung ke lapangan dengan masyarakat (Harahap, 2020).

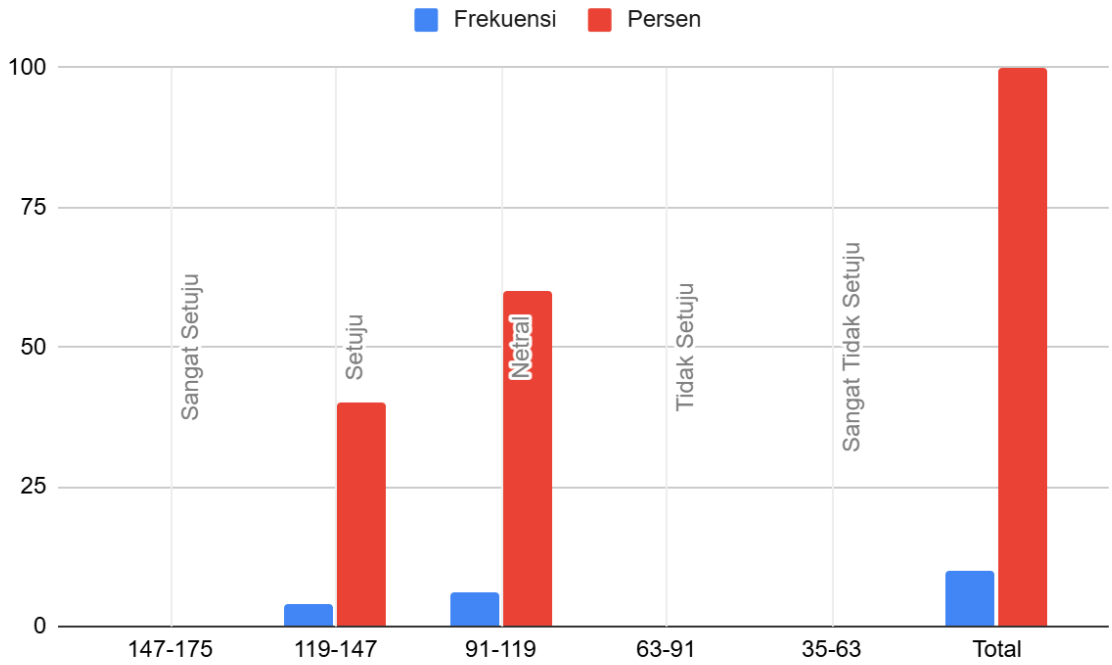
Proses penelitian yang kami lakukan yaitu wawancara langsung dengan masyarakat Petuk Katimpun untuk memperoleh data primer yang mendalam. Target populasi dan sampel pada penelitian ini adalah warga Kelurahan Petuk Katimpun yang menggunakan LPG 3kg dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini menggunakan jenis purposive sampling yaitu pengambilan sampel hanya untuk orang tertentu yang memiliki klasifikasi yang telah ditentukan oleh sang peneliti (Agustin et al. 2024). Kriteria purposive sampling pada penelitian kali ini terbagi menjadi dua, yaitu dari kalangan masyarakat menengah ke bawah dan masyarakat dari kalangan menengah ke atas. Penelitian ini menggunakan 20 orang sebagai sampel yang akan dikomparasikan dengan menganalisis persepsi dari kedua kriteria yang telah ditentukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejak awal tahun 2025 pemerintah terkhususnya Kementerian ESDM mengeluarkan kebijakan baru kepada masyarakat tentang pembelian gas LPG 3 kg (Gas Bersubsidi) yang hanya dilakukan di pangkalan resmi saja (Yang & Sasaran, 2025). Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No.37.K/MG.01/MEM.M/2023 tujuan kebijakan ini adalah supaya masyarakat lebih mudah untuk mendapatkan Gas LPG secara merata dan tepat sasaran, serta tidak adanya penyalahgunaan distribusi gas secara berlebihan (Manik et al, 2025). Semakin sulitnya untuk mendapatkan Gas bersubsidi, sehingga masyarakat lebih memilih untuk membeli di eceran dengan harga tinggi, karena semakin langka gas bersubsidi maka semakin tinggi harga jual (Sianipar, 2023). Tetapi, nyatanya implementasi kebijakan tersebut mendapatkan respon yang beragam dari masyarakat, khususnya masyarakat Kelurahan Petuk Katimpun.

Kebijakan ini menimbulkan perbedaan persepsi antara masyarakat golongan menengah keatas dengan masyarakat menengah kebawah yang memberikan dampak secara langsung terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari. Berikut adalah data yang didapatkan dari penelitian di masyarakat Kelurahan Petuk Katimpun.

Masyarakat Menengah Ke Atas



Gambar 1. Data Grafik Hasil Wawancara Masyarakat Menengah ke atas
Sumber: Diolah penulis (2025)

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan di Kelurahan Petuk Katimpun dengan purposive sampling yang melibatkan 10 orang dari kalangan menengah ke atas sebagai responden, maka didapatkan hasil yang disajikan dalam bentuk diagram di atas. Diagram tersebut menunjukkan data bahwa 40% orang setuju dengan kebijakan Kementerian ESDM tentang penjualan gas dengan antrean. Lalu, 60% sisanya memilih netral dalam merespon kebijakan tersebut. Persepsi masyarakat menengah ke atas dalam merespon kebijakan tersebut dominan netral karena tidak terlalu berpengaruh terhadap kehidupan dan perekonomian mereka secara langsung. Sebagian masyarakat golongan menengah ke atas juga setuju dengan kebijakan pembelian tersebut karena menganggap kebijakan ini dapat membantu pendistribusian gas secara merata dan memotong mata rantai penjualan gas dengan harga nonsubsidi yang sejatinya memberatkan masyarakat.

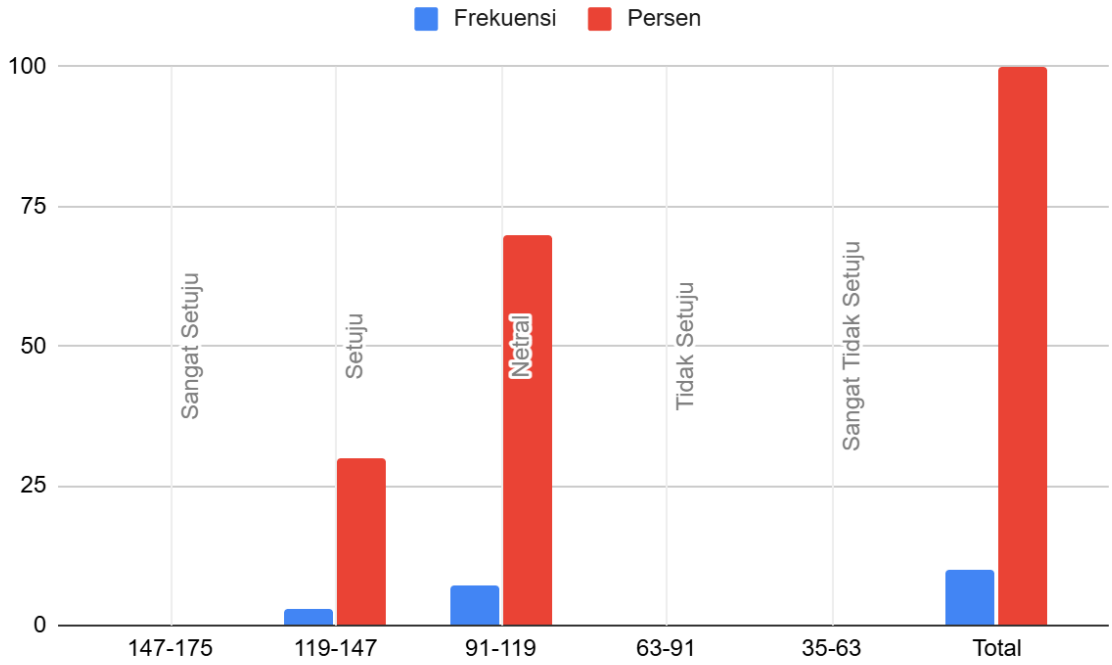
Hasil analisis berdasarkan data di atas yaitu masyarakat menengah ke atas tidak menolak hadirnya kebijakan pembelian LPG 3 kg dengan antrean melainkan sebagiannya justru setuju dengan kebijakan tersebut. Mengingat bahwa masyarakat kalangan menengah ke atas tidak bergantung pada subsidi LPG 3kg di pangkalan atau sub-pangkalan, maka kebijakan ini tidak terlalu berpengaruh bagi masyarakat kalangan menengah ke atas. Oleh sebab itulah, mayoritas dari mereka menjawab netral sebagai bentuk respon terhadap adanya kebijakan tersebut.

Responden dari 10 orang masyarakat menengah ke atas banyak memiliki netral karena berbagai alasan. Alasan masyarakat menengah ke atas banyak memilih netral karena menganggap kebijakan ini tidak terlalu berpengaruh langsung terhadap pekerjaan mereka, mereka juga menganggap bahwa pembelian gas di kedai atau warung jauh lebih mudah diakses dibandingkan harus membeli dengan harga lebih murah di pangkalan tetapi harus mengantri. Selain itu, masyarakat menengah ke atas juga memilih netral karena menganggap bahwa kebijakan ini sulit untuk terealisasi di daerah mereka karena kurangnya pangkalan ataupun sub-pangkalan dan

mereka juga menganggap bahwa kebijakan ini tidak dapat mencegah penumpukan gas yang tidak adil karena di warung atau kedai LPG 3 kg masih dijual secara bebas.

Kemudian, 40% responden dari kalangan menengah ke atas ada yang memilih setuju karena menganggap bahwa kebijakan ini sangat membantu pihak-pihak yang layak untuk mendapatkan subsidi dari pemerintah. Selain itu, mereka juga menganggap bahwa kebijakan ini dapat membantu masyarakat lebih teratur dalam pembelian gas karena dilakukan dengan sistem antrean. Lalu, masyarakat menengah ke atas juga memilih setuju karena kebijakan ini diharapkan dapat mencegah kelangkaan gas yang selama ini mereka alami.

Masyarakat Menengah Ke Bawah



Gambar 2. Data Grafik Hasil Wawancara Masyarakat Menengah Ke Bawah
Sumber: Data Diolah Penulis (2025)

Berdasarkan data diagram di atas, maka dapat diinterpretasikan bahwa hasil wawancara dengan 10 responden menengah ke bawah di Kelurahan Petuk Katimpun memuat 30% responden setuju dengan kebijakan tersebut dan 70% sisanya netral terhadap kebijakan pembelian LPG 3 kg dengan antrean. Angka tersebut tidak jauh berbeda dari respon masyarakat kalangan menengah ke atas pada data sebelumnya. Namun yang membedakan respon tersebut adalah analisis persepsinya. Masyarakat kalangan menengah ke bawah banyak yang memilih netral karena lebih memilih membeli LPG 3kg secara instan di warung atau kedai setempat sehingga mereka menganggap bahwa kebijakan Kementerian ESDM tersebut tidak terlalu mempengaruhi perekonomian dan kehidupan mereka sehari-hari. Selain itu, di wilayah Kelurahan Petuk Katimpun masih tidak memiliki pangkalan ataupun sub-pangkalan LPG sehingga masyarakat lebih memilih membeli dengan harga mahal di kedai atau warung dengan akses yang mudah tanpa harus antri di pangkalan atau sub-pangkalan wilayah lain.

Selain netral, masyarakat kalangan menengah ke bawah juga ada beberapa yang memilih setuju karena berharap dengan adanya kebijakan tersebut dapat meringankan belanja masyarakat terhadap LPG 3kg apabila subsidi dapat diakses secara merata. Lalu, masyarakat juga setuju

karena dengan adanya sistem antrean, mereka tidak perlu takut lagi akan kelangkaan gas karena dengan adanya sistem antrean di pangkalan atau sub-pangkalan, maka subsidi dapat tepat sasaran dan dapat memastikan pendistribusian LPG 3kg yang merata.

Data hasil wawancara dengan masyarakat menengah ke bawah di Kelurahan Petuk Katimpun tersebut didasari oleh macam-macam alasan. Responden yang memilih netral menganggap bahwa kebijakan ini terlalu rumit untuk diterapkan di wilayah mereka karena masyarakat secara umum lebih memilih untuk membeli LPG 3 kg di warung atau kedai dengan akses yang cepat dan mudah. Selain itu, responden juga berpendapat bahwa yang diinginkan masyarakat bukan hanya keringanan dari segi harga melainkan juga kemudahan dari segi akses pembelian. Lalu, responden juga memilih netral karena menganggap bahwa harga LPG 3 kg sulit untuk diturunkan meskipun sudah terkena subsidi dikarenakan alasan penjual yang mengatakan bahwa harga di Kalimantan masih berbeda dengan harga di Jawa. Alasan-alasan tersebutlah yang mendasari 70% responden menengah ke bawah memilih netral.

Kemudian untuk 30% sisanya memilih setuju karena menganggap bahwa kebijakan ini akan sangat membantu apabila dapat direalisasikan, terutama bagi mereka yang bidang usahanya berkaitan langsung dengan kebutuhan LPG, secara khusus LPG 3 kg. Keinginan mendapatkan harga yang lebih murah juga menjadi alasan responden memilih setuju terhadap kebijakan pembelian LPG 3 kg dengan antrean. Selain itu, responden juga menganggap bahwa kebijakan ini dapat mendistribusikan LPG 3 kg dengan subsidi secara merata dan lebih terarah kepada masyarakat yang memang layak untuk memperoleh subsidi. Sebagaimana dinyatakan oleh (Adhitya et al., 2024), Semakin banyak masyarakat yang dapat mengakses informasi publik berkat kemajuan teknologi informasi, maka juga akan meningkatkan harapan masyarakat terhadap layanan publik yang lebih mudah.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai kebijakan Kementerian ESDM yang mengatur pembelian gas dengan antrean, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Helva Rahmi dkk (2020) dengan judul penelitian "Implementasi Kebijakan Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga LPG 3 Kg di Kecamatan Pasar Muara Bungo" yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa kebijakan tersebut masih belum terealisasi atau dapat dikatakan kebijakan ini tidak berjalan dengan baik karena kurangnya pengawasan dan penertiban dari pihak PT. Pertamina dengan pihak Pemerintah Daerah terhadap program operasional di tingkat Kabupaten. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan saat ini yang dimana dari hasil penelitian terdahulu dan penelitian saat ini sama-sama menyatakan bahwa kebijakan yang dilakukan Pemerintah masih belum dapat berjalan dengan baik. Namun, terdapat beberapa perbedaan dari penelitian tersebut dan penelitian yang dilakukan yaitu penelitian terdahulu menggunakan metode kualitatif saja, sedangkan penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan didukung oleh data kualitatif, selain itu juga lokasi yang menjadi tempat penelitian pun berbeda dengan penelitian yang dilakukan sekarang. Serta, penelitian terdahulu tidak menggunakan teori sama sekali, sedangkan penelitian sekarang ini menggunakan teori rational choice.

Penelitian terdahulu selanjutnya dengan judul "Analisis Penyebab Kelangkaan Gas Elpiji 3KG Di kalangan Masyarakat Kabupaten Bengkalis" oleh Karmilawati, dkk (2023). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research). Hasilnya dari penelitian ini adalah melihat penyebab terjadinya kelangkaan gas 3 Kg di pulau Bengkalis, karena terhambatnya akses keluar masuk kendaraan dari luar daerah menuju pulau Bengkalis yang hanya melalui penyeberangan roro, dengan banyak nya antrian kendaraan umum dan kendaraan angkutan BBM dan LPG, ini lah penyebab penghambat proses distribusi, yang artinya penyebab dalam kelangkaan pada pendistribusian akibat dari jalur transportasi yang kurang memadai serta antrian yang sangat panjang di penyebrangan. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang sekarang dilihat dari metode dan hasil yang ditemukan, namun penelitian terdahulu dengan sekarang masih saling berkaitan dengan satu sama lainnya.

Rational Choice Masyarakat Petuk Katimpun Tentang Kebijakan Pembelian Gas

Penelitian dianalisis menggunakan teori Rational Choice dari James S. Coleman. Rational Choice merupakan suatu teori yang menyatakan bahwa setiap keputusan diambil oleh individu adalah keputusan yang melalui proses berpikir dan diambil berdasarkan pilihan rasional individu itu sendiri (Y et al., 2025). Teori Rational Choice menyatakan bahwa apabila seseorang dihadapkan pada suatu pilihan, maka ia akan memilih suatu opsi yang paling masuk akal menurut pemikirannya. Teori Rational Choice yang dikemukakan oleh James S. Coleman tidak hanya menerima ide yang ada dan berfokus pada faktor internal sistem. Gagasan dasar dari pilihan rasional Coleman ialah sebuah tindakan yang terbentuk karena ketidaksengajaan yang memiliki sebuah tujuan, serta tujuan yang terbentuk dari nila-nilai ataupun pilihan-pilihan. Coleman menekankan pemikirannya yang membutuhkan tatanan yang aksi aktor memilih tindakan yang akan bertujuan untuk memaksimalkan kegunaan, serta untuk memuaskan kebutuhan mereka (Putri, 2019).

Berdasarkan teori tersebut, maka data hasil penelitian pada jurnal ini dapat dianalisis menggunakan Teori Rational Choice karena masyarakat Petuk Katimpun selaku responden wawancara penelitian tentunya memilih berdasarkan pilihan rasional mereka masing-masing sehingga ditemukanlah data yang disajikan dalam bentuk tabel dan diagram di atas. Responden memilih setuju ataupun netral atas dasar kalkulasi rasional yang mereka anggap paling masuk akal untuk dipilih sesuai dengan situasi dan kondisi yang mereka alami. Oleh sebab itulah, hasil dari penelitian ini cukup unik dan berbeda dari dugaan penulis sebelum dilakukannya penelitian ini. Teori Rational Choice merupakan teori yang sangat relevan untuk membongkar dan menganalisis persepsi masyarakat selaku responden dalam wawancara penelitian ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan analisis data penelitian di Kelurahan Petuk Katimpun tentang persepsi masyarakat terhadap kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam mengatur pembelian gas secara antrean, terdapat beberapa pendapat yang berbeda dari masyarakat menengah ke atas dan masyarakat menengah ke bawah. Masyarakat menengah ke atas menyatakan bahwa mereka sama sekali tidak menolak dengan adanya kebijakan pemerintah, karena masyarakat ke atas merasa ada atau tidak adanya kebijakan ini tidak berdampak atau berpengaruh bagi mereka. Sedangkan, masyarakat menengah ke bawah yang menjadi salah satu pengguna gas lpg 3 kg, menyatakan bahwa mereka secara umum memilih netral dapat dikatakan mereka setuju dengan adanya kebijakan tersebut. Walaupun, mereka merasakan dampak secara langsung seperti sulitnya akses untuk mendapatkan gas bersubsidi dan antrean yang panjang, tapi sebagian dari mereka menyadarkan bahwa kebijakan tersebut juga sangat penting dalam pengendalian distribusi subsidi. Jadi, dengan adanya kebijakan ini diharapkan kepada pemerintah agar lebih memperhatikan pendistribusian gas bersubsidi secara merata dan tepat sasaran supaya akses masyarakat lebih mudah dalam mendapatkan gas bersubsidi, kelangkaan yang dapat teratasi, serta mendapatkan harga yang terjangkau dan tidak menjadi beban bagi masyarakat.

REFERENSI

Ade Lia Novitasari, Farah Laili Laksita Windy, and Friska Diah Mukaromah. 2023. "Kelangkaan Gas LPG 3 Kg Di Dukuh Kebumen, Kabupaten Pemalang." *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora* 2(2): 52–59.

Adhitya, M. A., Pratama, P., Rafdi, H., & Patty, N. (2024). Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah Dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan 2023). *Jurnal Ilmu Politik Dan Sosial Terapan*, *3*(4), 40–49. https://jurnal.polstac.or.id/index.php/jiposster/article/view/11/11

Agustin, Kristina Yoni, and Dedi Kurnia Syah Putra. "Relevansi Teori Agenda Setting Pada Film Dokumenter Dirty Vote Terhadap Warga Bandung Menjelang Pilpres 2024." EProceedings of Management, vol. 11, no. 6, 2024.

Harahap, Nursapia. Penelitian Kualitatif. 2020.

Lestari, L. D., et al. "Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Ke-Langkaan Gas LPG Subsidi Di In-Donesia." Journal of Economics And Social Sciences (JESS), vol. 2, no. 2, 2023, pp. 112–21.

Manik, Karpolin Mentari, et al. "TINJAUAN HUKUM MENGENAI KEPUTUSAN MENTERI ESDM No. 37. K/MG. 01/MEM. M/2023 TENTANG PENGGUNAAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) 3 KILOGRAM BERSUBSIDI YANG TIDAK SESUAI ATURAN." *LEX ADMINISTRATUM*, vol. 13, no. 2, 2025.

Novitasari, Ade Lia, et al. "Kelangkaan Gas LPG 3 Kg Di Dukuh Kebumen, Kabupaten Pemalang." JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora, vol. 2, no. 2, 2023, pp. 52–59.

Parhesia, K. P., Widanti, N. P. T., & Wiadnyani, I. A. P. S. (2025). PENGAWASAN DISTRIBUSI GAS LPG 3 KG PADA SUB AGEN DI KECAMATAN BANJARANGKAN, KABUPATEN KLUNGKUNG. *Manajemen Strategis Terkini*, *7*(1).

Priadana, M. S., & Sunarsi, D. (2021). *Metode penelitian kuantitatif*. Pascal Books.

Putri, Intan. PERSPEKTIF PILIHAN RASIONAL (LANSIA PEKERJA SEKTOR INFORMAL SEBAGAI TUKANG BECAK DI KOTA SURABAYA). Universitas Airlangga, 2019.

Rahayu, Karmilawati Dwi, et al. "Analysis Of The Causes Of The Scarcity Of 3 Kg LPG Gas Among The People Of Bengkalis Regency." HISTORICAL: Journal of History and Social Sciences, vol. 2, no. 4, 2023, pp. 151–61.

Rahmi, Helva, et al. "Implementasi Kebijakan Penyediaan, Pendistribusian, Dan Harga Lpg 3kg Di Kecamatan Pasar Muara Bungo." Jurnal Administrasi Sosial Dan Humaniora (JASIORA), vol. 4, no. 1, 2020.

Safitri, L. N., Dennis, T., & Yanti, R. T. (2024). ANALISIS PENGARUH HARGA DAN LOKASI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN GAS LPG 3 KG DI KOTA BENGKULU. *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE)*, *1*(3), 431–442.

Sianipar, R. (2023). Optimalisasi Ketahanan Energi Melalui Kebijakan Pengurangan

Konsumsi Gas Elpiji di Indonesia. *JDKP Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik*, *4*(1), 62–72.

Ul'zikri, A. R. (2024). *Mini Reserach Pendidikan Politik dan Demokrasi Lokal Melalui Kelas Online Menggunakan Pendekatan Model One-Group Pretest-Posttest Design Pada Mahasiswa Kabupaten Murung Raya*. *3*(4), 50–57. https://jurnal.polstac.or.id/index.php/jiposster/article/view/14/9

Y, A. M., Adnan, F., & Khaidir, A. (2025). *Teori Dan Implementasi Pengambilan Keputusan Dan Kaitannya Dengan Teori Rational Choice Dalam Administrasi Publik*.

Yang, K., & Sasaran, T. (2025). *Komisi xii*. *XVII*(3), 1–5.

Vol. 4, No. 2, Juni 2025
e-ISSN: 2964-1322
p-ISSN: 2964-9595

JIPOSSTER: Jurnal Ilmu Politik dan Studi Sosial Terapan

Perubahan Sosial Akibat Game Online Pada Anak-Anak Kota Palangka Raya (Studi Komparatif Anak-Anak Dikawasan G. Obos Dan Flamboyan Bawah)

Afri Ananta[(1)*], Muhammad Hayyan Akbar[(2)], Zuwariyah Kartini[(3)], Elia Damayanti[(4)], Muhammad Zusanri Batubara[(5)], Saputra Adiwijaya[(6)]
Sosiologi, Universitas Palangka Raya, Palangka Raya, 73112, Indonesia Email : afrianantaa@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat perubahan sosial yang terjadi pada anak-anak yang terpengaruh game online di Palangka Raya, khususnya daerah G Obos dan Flamboyan Bawah. Perkembangan sosial pada anak-anak sangat terpengaruh oleh orang tua dan lingkungan sekitar mereka. Dengan melihat perkembangan gedget yang tersebar luas di masyarakat sekitar, tentu banyak kalangan yang mendapatkan dampak postif dan negatif terkhusus lagi pada anak yang haus akan pengetahuan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif guna menganalisis dampak erubahan sosial yang terjadi pada anak-anak usia 6-12 tahun yang lenih memilih bermain game online dibandingkan dengan bermain dan berinteraksi secara langsung. Hasil penelitian ini menunjukan perbedaan yang signifikan antara anak-anak-anak G obos dan Flamboyan Bawah. Tujuan penelitiam ini untuk memahami bagaimana dampak modernisasi dan respon orang tua terhadap kemajuan teknologi yang terjadi terhadap perkembangan anak.

Kata kunci: Perubahan Sosial, Game Online, Anak-Anak.

ABSTRACT

This study aims to see the social changes that occur in children who are influenced by online games in Palangka Raya, especially in the areas of G Obos and Flamboyan Bawah. Social development in children is greatly influenced by their parents and their surroundings. By looking at the development of gadgets that are widespread in the surrounding community, of course many people get positive and negative impacts, especially children who are thirsty for knowledge. This study uses a descriptive quantitative method to analyze the impact of social changes that occur in children aged 6-12 years who prefer to play online games compared to playing and interacting directly. The results of this study show significant differences between children in G obos and Flamboyan Bawah. The purpose of this study is to understand how the impact of modernization and parental responses to technological advances that occur on child development.

Keywords: *Social Change, Online Games, Children.*

Submit:	Revised:	Accepted:	Available online:
31.05.2025	31.05.2025	29.06.2025	30.06.2025

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Individu anak, peran orang tua, lingkungan masyarakat, dan taman kanak-kanak sangat memengaruhi perkembangan sosial anak. Untuk memiliki kehidupan yang sukses dan menyenangkan di masa depan, penting untuk menerima lingkungan dan pengalaman positif lainnya dari berpartisipasi dalam aktivitas sosial. Apa yang ditanamkan pada anak-anak mereka saat mereka masih kecil akan berbuah di masa dewasa. Orang tua tidak hanya harus mendidik dan mengajarkan anak bagaimana bergaul dengan baik, tetapi mereka juga harus menjadi contoh yang baik bagi anak-anak mereka. Ini karena anak-anak usia dini senang meniru apa yang dilakukan orang tua mereka, termasuk cara mereka bergaul di luar rumah. Orang tua tidak hanya memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada anak mereka, mereka juga berperan dalam membangun keterampilan bergaul mereka, orang tua juga diharapkan memberi penguatan lewat pemberian rangsangan ganjaran atau hadiah jika anak bertingkah laku positif atau hukuman pada saat anak melakukan kesalahan (Mayar n.d.). Anak-anak biasanya mulai membentuk karakteristiknya pada saat mulai dalam proses belajar mengajar hingga seterusnya dimana anak-anak mulai menemukan jati dirinya kemana mereka akan berjalan dan menentukan arah kemana arah jalan baik maupun jalan yang buruk.

Dunia teknologi semakin canggih karena masyarakat menggunakannya. Teknologi awalnya dibuat untuk mempermudah kegiatan manusia. Ini berasal dari pemikiran manusia yang berusaha untuk mempermudah kegiatan-kegiatannya, yang kemudian digunakan dalam kehidupan. Sekarang semua orang berlomba-lomba untuk bisa memiliki gadget karena gadget pada masa kini bukan hanya digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi, namun sekaligus sebagai lifestyle (gaya hidup), tren, maupun prestise bagi beberapa orang. Gadget telah menjadi bagian integral dari kehidupan manusia, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Banyak anak usia dini bahkan memiliki gadget mereka sendiri. Meskipun gadget memiliki banyak manfaat, jika tidak dikontrol, mereka dapat menjadi gerbang bagi anak-anak usia dini untuk mengakses banyak hal. Ini dapat berdampak negatif karena anak-anak usia dini belum memiliki kemampuan untuk memahami dan menyaring informasi yang mereka terima, yang dapat mengganggu perkembangan mereka (Hidayat and Maesyaroh 2022).

Dalam keadaan seperti ini, sangat penting bagi orang tua untuk menemukan keseimbangan antara menetapkan batas untuk anak-anak Gen-Alpha dan membiarkan mereka mengeksplorasi. Oleh karena itu, orang tua perlu dengan cermat mengelola pendidikan teknologi di usia dini. Mengajarkan kemampuan literasi dan keterampilan digital dapat membantu mempertahankan ikatan emosional dengan dunia nyata. Di samping itu, menanamkan dasar etika dan moral yang kukuh harus menjadi fokus utama dalam membentuk karakter anak-anak Gen-Alpha. Menggunakan pendekatan pengasuhan yang menyeluruh sambil memperhatikan kebutuhan perkembangan anak-anak di zaman sekarang sangat penting untuk menentukan cara pengasuhan yang paling tepat bagi Gen-Alpha, yang merupakan kunci dalam membangun fondasi yang kuat untuk pertumbuhan mereka yang sehat (Sari et al. 2023). Anak- anak yang terlampau terlibat dengan permainan online bisa menghabiskan waktu berharga, yang mengakibatkan berkurangnya perhatian terhadap pendidikan mereka, yang pada akhirnya bisa menimbulkan masalah bagi mereka sendiri. Hal ini sejalan dengan pendapat Winsen Sanditaria bahwa para pemain yang kurang tidur akibat bermain game secara berlebihan atau mengabaikan tanggung jawab penting lainnya mengalami kesulitan (Angela 2013).

Bermain game online dapat memberikan efek buruk terhadap konsentrasi belajar baik di rumah maupun di sekolah. Sering terlibat dengan permainan daring dapat menimbulkan ketergantungan akibat daya tarik visual dan animasinya. Anak-anak yang sering bermain game online cenderung memiliki sistem imun yang melemah karena mereka lebih memilih untuk tidak berolahraga, duduk dalam waktu lama, makan di malam hari, dan terpapar radiasi dari layar serta

perangkat elektronik. Penelitian menunjukkan bahwa ketergantungan pada permainan daring semakin meningkat di masyarakat saat ini. Beberapa adegan dalam permainan online dapat memicu perilaku kriminal atau kekerasan, sementara game lain mendorong pengeluaran berlebihan karena mereka meminta pembelian item untuk mendapatkan fitur- fitur yang lebih menarik (Wiguna et al. 2020).

Tidak bisa dipungkiri di era digital sekarang kemajuan teknologi komunikasi dan informasi sedang berkembang pesat. Teknologi komunikasi dan informasi saat ini selalu bersinggungan dengan aktivitas masyarakat. Penggunaan gawai atau smartphone merupakan kemajuan dari teknologi komunikasi informasi. Dari penggunaan gawai tersebutlah yang ingin kami kaji mengenai dampaknya kepada anak-anak di kawasan Flamboyan Bawah dan G. Obos 12 Kota Palangka Raya. Melihat dari maraknya dampak yang terjadi akibat dari digitalisme khususnya pada pola interaksi sosial mereka dengan temannya, terlihat perbedaan antara anak-anak yang yang bermain langsung bersama teman-temannya dibanding dengan yang bermain gawai. Penggunaan gawai pada anak banyak menciptakan dampak negatif seperti membuat anak menjadi menutup diri dalam sosial atau pola interaksi yang tidak mau bersosialisasi. Dengan ini kami menulis kajian ini guna mendapatkan perbandingan 15:15 antara keduanya yang membuat penemuan baru serta menegetahui sikap yang ideal untuk anak-anak di era digital yang sedang berkembang secara pesat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Penelitian ini menyajikan keaslian dengan memanfaatkan metode One-Group Pretest-Posttest Design untuk mengevaluasi seberapa efektif data yang digunakan. Cara ini memungkinkan pengukuran angka terhadap perubahan sosial yang terjadi pada anak-anak. Maksud dari metode ini adalah untuk mengevaluasi keberhasilan. Penelitian ini menyajikan keaslian dengan memanfaatkan metode One-Group Pretest-Posttest Design untuk mengevaluasi seberapa efektif. Cara ini memungkinkan pengukuran angka terhadap perubahan sosial yang terjadi pada anak-anak. Maksud dari metode ini adalah untuk mengevaluasi keberhasilan (Ahmad Robi Ul'zikri 2024). Metode ini digunakan untuk meneliti fenomena sosial yang terjadi pada anak-anak dengan umur <12 tahun yang lebih berminat bermain game online daripada bermain bersama- sama secara langsung dengan anak-anak yang lain. Lokasi penelitian bertempat di kawasan Flamboyan Bawah dan G. Obos 12 Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.

Jumlah Informan yang akan diwawancara

1. anak-anak umur <12 tahun daerah flamboyan bawah sebanyak 15 anak-anak.
2. anak-anak umur <12 tahun daerah g obos 12 sebanyak 15 anak-anak.
3. Masyarakat sekitar yang terkena dampak perubahan sosial game online pada anak-anak daerah flamboyan bawah sebanyak 1 orang
4. Masyarakat sekitar yang terkena dampak perubahan sosial game online pada anak-anak daerah g obos 12 sebanyak 1 orang.

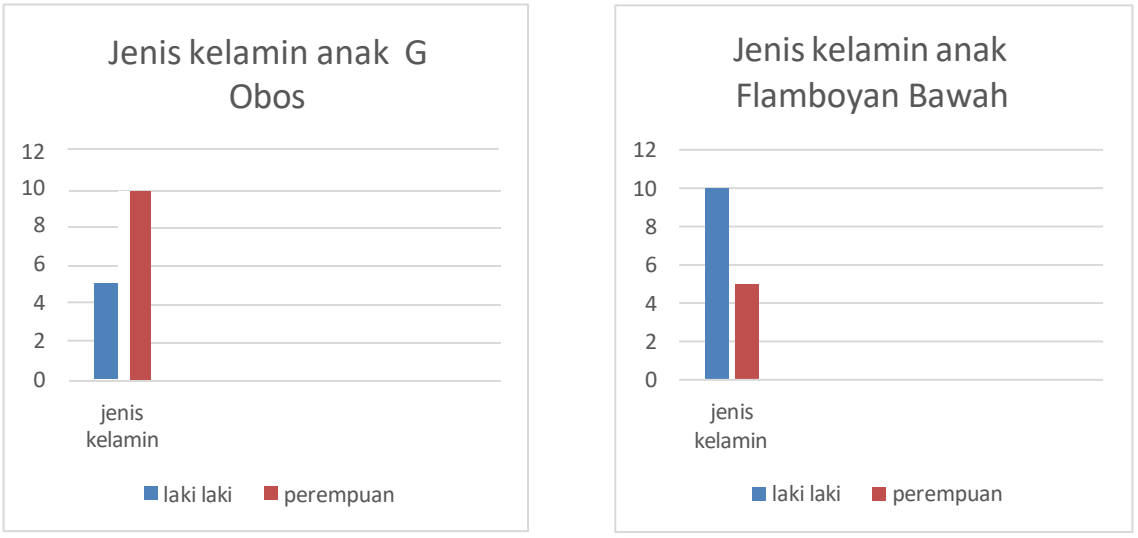
Panduan Wawancara

Wawancara kuantitatif biasanya terstruktur dengan pertanyaan tertutup dengan opsi jawaban yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini menjamin kemampuan untuk mengukur dan menganalisis data statistik yang dikumpulkan. Tujuan wawancara adalah untuk mendapatkan data khusus dari responden yang relevan dengan variabel penelitian. memastikan bahwa hasil wawancara dapat dibandingkan karena formatnya seragam.

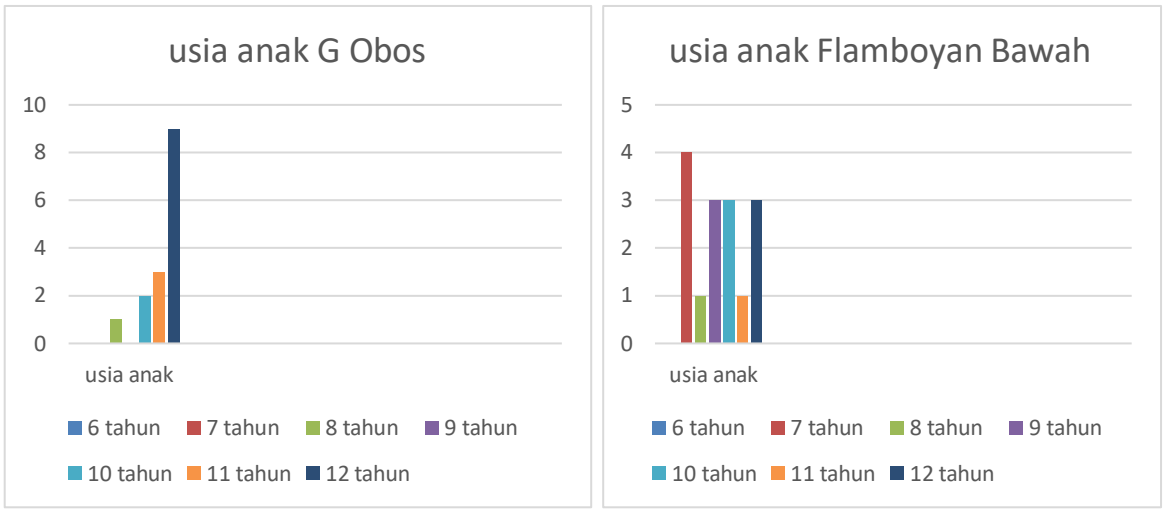
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian



Gambar 1. Tabel Distribusi balok (Jenis Kelamin anak)
Sumber: Data Diolah Penulis (2025)



Gambar 2. Tabel distribusi balok (usia anak)
Sumber: Data Diolah Penulis (2025)

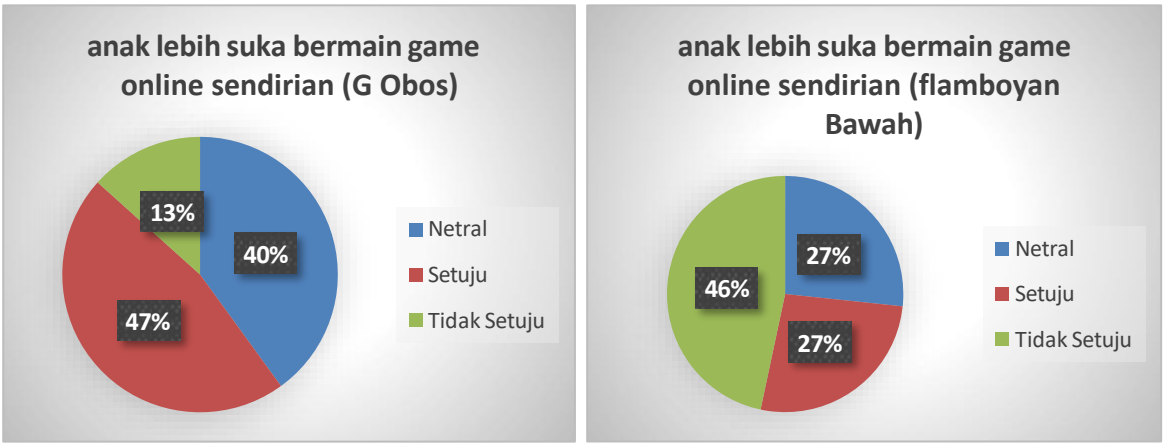
Hasil penelitian yang sudah dilakukan menunjukan bahwa responden dengan jenis kelamin anak laki-laki G Obos sebanyak 5 anak dan anak perempuan 10 anak. Berbanding terbalik dengan anak G Obos, anak Flamboyan Bawah lebih banyak anak laki-laki dengan sebanyak 10 anak laki-laki dan 5 anak perempuan yang menjadi responden penelitian ini. Yang kemudian dihitung dengan usia anak rata-rata dari kedua wilayah tersebut dengan anak usia 12 tahun lebih banyak berada di g Obos, sedangkan anak dengan usia 7 tahun yang banyak terdapat pada daerah Flamboyan bawah. Hal ini akan mempengaruhi pemilihan game online dan pengaruh tingkah laku pada anak dengan berdasarkan jenis kelamin dan usia anak tersebut.

Pembahasan

Perubahan Sosial

Perubahan sosial merujuk pada cara individu bertindak saat berinteraksi dengan orang lain, kelompok, atau komunitas terkait norma-norma dan nilai-nilai yang sudah ada, sebuah fenomena yang disebut perubahan sosial budaya. Hal ini terjadi karena manusia adalah makhluk sosial yang mampu melampaui batasan budaya yang dimilikinya. Ketika membahas mengenai struktur ekonomi, Karl Marx berpendapat bahwa penyebab utama perubahan berasal dari transformasi sosial dan kondisi ekonomi yang menjadi landasan seluruh aktivitas masyarakat. Sementara itu, Max Weber menekankan bahwa pemikiran rasional dan ambisi individu yang terlibat merupakan elemen kunci dalam tindakan atau perilaku sosial (Goa 2017).

Seperti yang dikatakan Heraklitus bahwa tidak ada yang pasti kecuali perubahan itu sendiri, perubahan sosial adalah proses alamiah yang bersifat pasti. Manusia selalu menghadapi perubahan sosial. Seperti yang disebutkan oleh Koenig sebelumnya, perubahan sosial terjadi pada sistem sosial desa dan struktur kelembagaan. Kehidupan masyarakat desa menjadi lebih dinamis, berkembang, dan berkembang sebagai organisme sosial (Marius 2006).



Gambar 3. Tabel distribusi pie (anak yang suka bermain game online sendirian)

Sumber: Data Diolah Penulis (2025)

Dari hasil penelitian dengan pertanyaan "saya lebih suka bermain game online sendirian" menunjukan bahwa daerah G obos lebih cenderung sendirian pada saat bermain game online dibandingkan dengan daerah Flamboyan Bawah yang lebih memilih "tidak setuju" dikarenakan lebih senang bermain bersama-sama. Mereka memang merasa lelah saat bermain game online, tetapi karena kenikmatan memainkan game tersebut, mereka tidak merasa lelah. Mereka merasakan keletihan saat bermain game daring, tetapi kesenangan yang diperoleh dari permainan itu dapat mengatasi rasa lelah yang mereka alami. Bahkan di saat timbulnya kelelahan, mereka tetap menemukan kebahagiaan dalam bermain. Permainan daring berperan sebagai sarana hiburan bagi anak-anak, membantu mereka untuk bersantai dari tuntutan belajar dan memberikan kepuasan tersendiri. Inilah yang membuat anak-anak sangat menyukai permainan online (Santoso 2022).

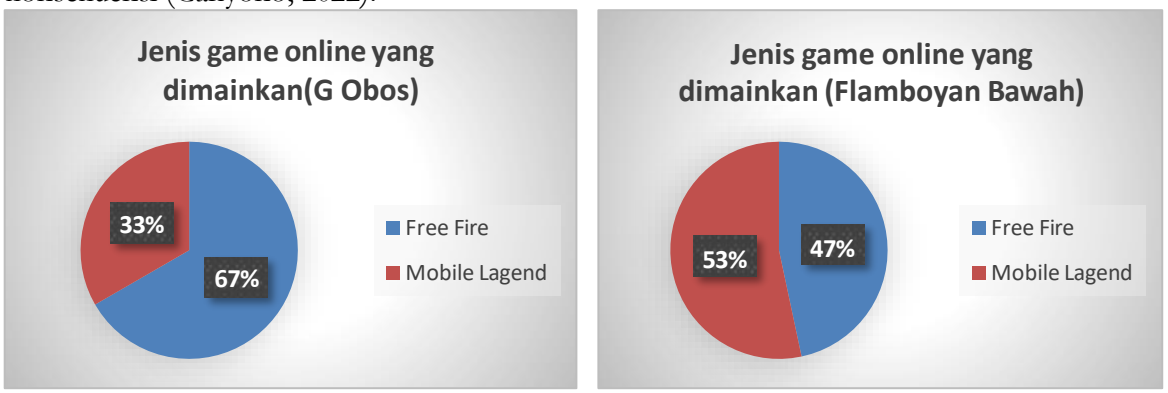
hasil penelitian menujukan bahwa anak G obos lebih senang bermain game online dibandingkan bermain offline/secara langsung, yang mana pada hal ini berbanding terbalik dengan anak yang berada di Flamboyan Bawah yang lebih suka bermain game offline setiap harinya. Hal ini terbukti pada saat peneliti melakukan penelitian dimana anak-anak di Flamboyan Bawah bermain bola dan lain sebagainya untuk mengisi waktu luang. Dengan hasil penelitian anak G Obos 53% lebih suka pada game online dibandingkan game offline,

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

sedangkan anak Flamboyan bawah tidak setuju dengan bermain game online dengan 80% anak flamboyan lebih suka bermain game offline dengan teman sebaya.

Pengaruh Game Online

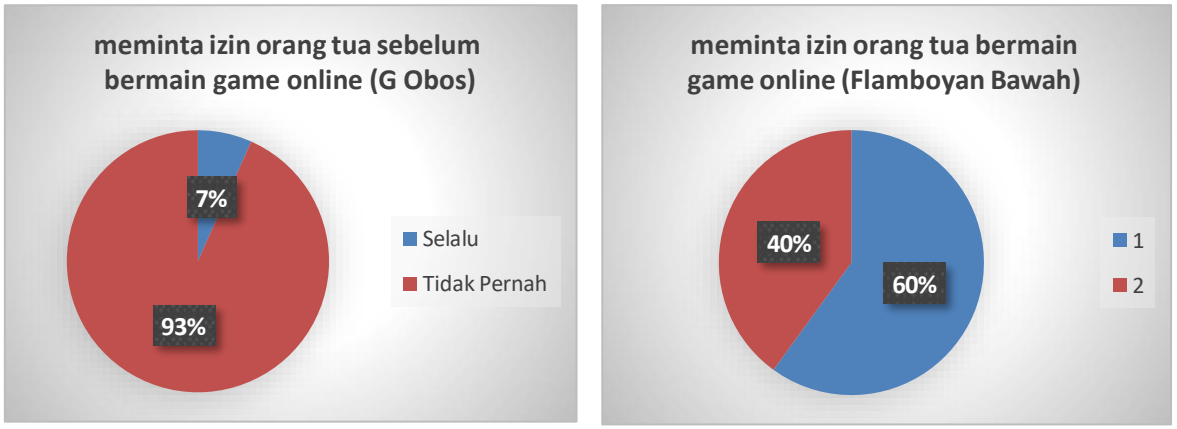
Pengaruh adalah keadaan di mana ada hubungan timbal balik, atau sebab akibat, antara apa yang dipengaruhi dan apa yang dipengaruhi. Kami harus menemukan hubungan antara dua hal ini. Pengaruh, di sisi lain, adalah kekuatan yang memiliki kemampuan untuk mendorong sesuatu untuk berubah, yang berarti bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan konsekuensi (Cahyono, 2022).



Gambar 4. Tabel distribusi pie (jenis game online yang dimainkan)

Sumber: Data Diolah Penulis (2025)

Banyak siswa menghabiskan waktu libur sekolah untuk bermain game online. Mereka biasanya bermain game online selama dua hingga tiga jam, atau bahkan lebih lama. Game online menjadi gaya hidup di berbagai belahan dunia saat ini sangat mengejutkan. Berbagai pendapat tentang dampak dari permainan online ini muncul sebagai akibat dari banyaknya permainan online ini. Meskipun ada beberapa orang yang berpendapat bahwa permainan online dapat membahayakan anak-anak dan remaja, ada juga yang mengatakan bahwa para penggemar dapat memperoleh manfaat dari permainan online (Henukh, Abolladaka, and Br Simanungkalit 2022).



Gambar 5. Tabel distribusi pie(meminta izin orang tua sebelum main game)

Sumber: Data Diolah Penulis (2025)

Free Fire merupakan permainan online yang memungkinkan pemain berkolaborasi dari berbagai tempat dan waktu. Komunikasi yang baik antara para pemain sangat penting untuk menyelesaikan misi permainan dengan sukses. Dalam Free Fire, terdapat fitur pesan suara yang

memungkinkan pemain berdiskusi dan bertukar informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan mereka. Kesuksesan dalam permainan ini sangat tergantung pada seberapa efektif para pemain dapat berkolaborasi. Kolaborasi tim ini dapat ditingkatkan melalui penggunaan pesan suara (Fathurrijal et al. 2023). Berbagai faktor turut menyumbang pada daya tarik permainan Mobile Legend, seperti variasi hero yang tersedia, gameplay yang seru, desain karakter yang menarik, dan sistem peringkat yang teratur. Semua aspek ini menarik minat pemain muda, membuat mereka terus berpartisipasi dalam permainan tanpa merasa bosan (Usoh, Buanasari, and Wowiling 2022). Dari hasil penelitian menunjukan jenis game online yang diminati anak-anak dimana pada daerah G Obos lebih ke Free Fire, sedangkan anak Flamboyan Bawah lebih ke Mobile Legend. Dimana anak yang bermain game online Free Fire lebih suka bermain dengan cara voice note pada saat ingin bekerjasama pada tim, sedangkan anak yang suka bermain game Mobile Legend lebih senang pada skin hero yang digunakan.

Seperti yang kita tahu bahwa peran orang tua dalam tumbuh kembang anak sangat penting dalam pertumbuhan anak tersebut yang membuat anak tersebut berada diluar jangkauan orang tuanya, dari penelitian anak G Obos kurang komunikasinya terhadap orang tua dengan bermain game tidak izin terlebih dahulu karena orang tua sudah memberikan gedget kepada anak. Menurut Ibu Endang "anak-anak yang tidak izin bermain game biasanya akan bermain hingga larut malam yang membuat anak tersebut menyendiri dikamar, anak tersebut lebih mengabaikan kesehatan, orang sekitar, dan kewajibannya sebagai anak sekolah. Hal ini yang menyebabkan anak-anak lebih memilih tidak izin sebelum main game online karena candu saat bermain game online membuat anak tersebut lupa segalanya. sedangkan jika anak tersebut tidak kita izinkan kadang dia menjadi anak yang tantrum karena sudah kecanduan bermain game online.

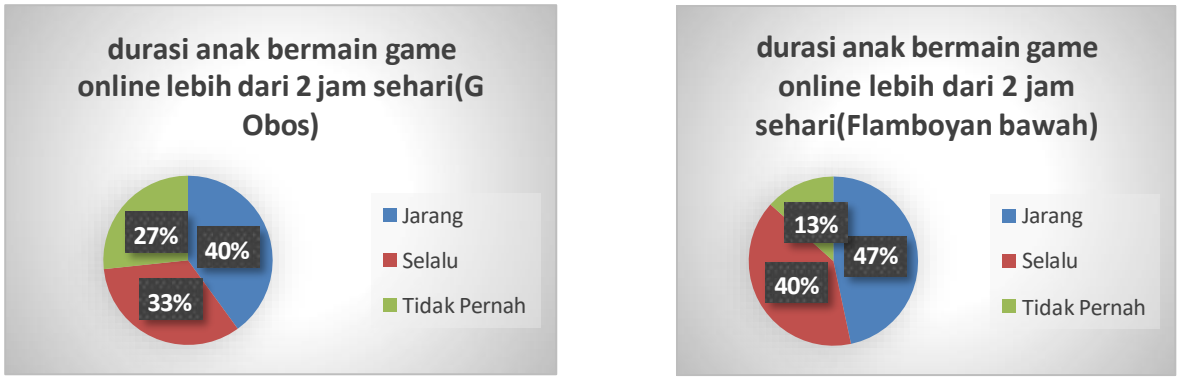
Perubahan Sosial Pada Anak-anak yang Bermain Game Online

Munculnya handphone yang berisi berbagai game. Fenomena ini menunjukkan betapa teknologi permainan telah masuk ke banyak bidang kehidupan. Aplikasi handphone dan media internet memungkinkan Anda memperoleh game dengan cepat. Game, yang menggunakan media elektronik sebagai media multimedia, dirancang dengan cara yang menarik agar pemain puas. Anak-anak yang banyak menghabiskan waktu dengan permainan selama masa pertumbuhan mereka mungkin akan mengurangi keterlibatan mereka dalam aktivitas positif seperti belajar dan bergaul. Karena permainan bisa membuat mereka terasing dari lingkungan sosial, anak-anak yang terlalu terikat pada permainan sering kali mengurangi waktu yang mereka gunakan untuk berinteraksi dengan teman- teman. Permainan yang sangat menarik perhatian dapat berdampak pada kesehatan mental anak- anak. Kecenderungan yang tinggi terhadap permainan online bisa mengakibatkan masalah seperti penghindaran (Ulya, Sucipto, and Fathurohman 2021).

Salah satu kemajuan teknologi yang signifikan adalah munculnya permainan daring. Khususnya dalam hal pendidikan dan hubungan sosial, kecanduan permainan daring dapat mengakibatkan konsekuensi negatif. Meskipun permainan daring dapat memfasilitasi interaksi sosial dengan orang lain, permainan daring juga secara signifikan memengaruhi pertumbuhan dan karakter remaja dan individu. Meskipun demikian, permainan ini sering kali menyebabkan pemain kehilangan kontak dengan pengalaman sosial di dunia nyata. Demografi pemain gim daring biasanya mencakup siswa sekolah dasar, menengah, dan atas, serta mahasiswa dan bahkan orang dewasa. Efek kecanduan mengakibatkan anak-anak sering terlibat dalam aktivitas permainan yang mengurangi kegiatan yang bermanfaat, seperti belajar dan bersosialisasi dengan teman-teman. Ketika siswa menghabiskan waktu yang berlebihan untuk bermain gim daring, hal itu dapat menyebabkan perilaku kompulsif. Dampak permainan

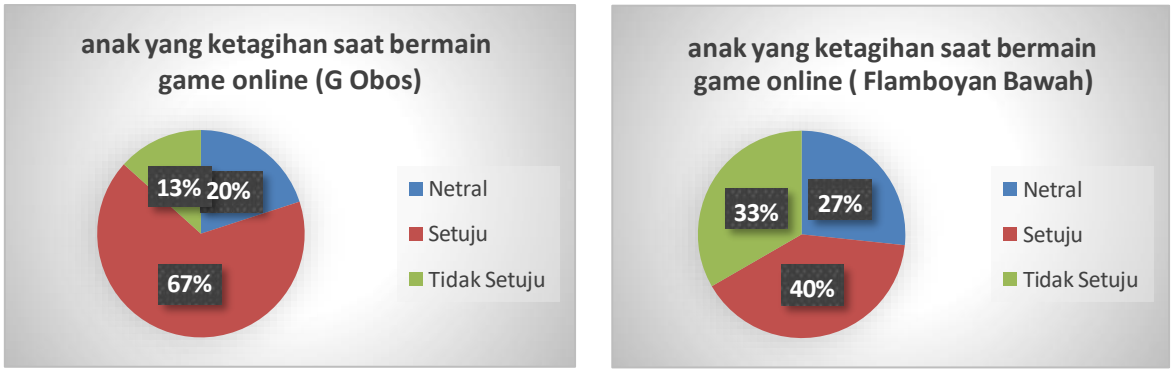
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

bervariasi bagi siswa sekolah dasar, khususnya selama tahap perkembangan mereka. (Cahyano, 2022).



Gambar 6. Tabel distribusi pie (durasi anak bermain game online lebih dari 2 jam sehari)
Sumber: Data Diolah Penulis (2025)

Dari hasil penelitian menunjukan jika anak Flamboyan bawah lebih sering menghabiskan waktu lebih dari 2 jam pada saat main game online, akantetapi jarang juga anak yang menghabiskan waktu luangnya bermain game online dikarenakan pada saat sore hari mereka lebih memilih bermain bersama dengan anak sebaya. Berbanding terbalik dengan anak G obos yang jarang memakai game online lebih dari 2 jam karena ada peran orang tua yang membatasi anaknya bermain game online. Menurut Ibu Silva (responden wawancara), game online menyebakan mereka tidak fokus lantaran kurang tidur dan tugas yang diberikan diabaikan. Kemudian juga secara perilaku sosialnya mereka akan menyendiri dan kurang komunikasinya dengan teman sebayanya, dan juga secara psikologis mereka lebih emosional, karena terbawa dari aktivitas bermain game onlinenya, bahkan juga dari pengalaman beliau pribadi, anak yang sedang bermain game biasanya tidak bisa diganggu. Secara kesehatan, rata-rata siswa beliau saat ini sudah mengenakan kacamata, dari hal ini tentu dapat kita lihat bagaimana dampak negatifnya dari game online yang dapat menyebabkan permasalah kesehatan mata dan mengingat mereka masih anak-anak. Dari hal tersebut beliau menjelaskan untuk perlunya peran orang tua dalam membatasi durasi bermain game online, selain durasi juga orang tua juga tentu perlu memantau dari kegiatan anak selama bermain game.



Gambar 7. Tabel distribusi pie (anak yang ketagihan saat bermain game online)

Permainan online merupakan kategori permainan visual yang dapat dimainkan di komputer atau perangkat lain yang terhubung ke jaringan, seperti internet atau melalui koneksi tanpa kabel. Dalam permainan ini, pemain akan menemui berbagai tantangan yang membuatnya

merasa terdorong untuk terus bermain. Ketika tantangan ini menjadi rutinitas, akan sulit untuk menghentikannya, yang mengakibatkan pemain kehilangan kesadaran akan waktu dan lingkungan di sekitarnya (Zahra 2022). Pengaruh game online terhadap perubahan individu sangat terlihat pada pertanyaan tersebut, dimana anak-anak G Obos lebih sering ketagihan pada saat main game online yang membuat mereka betah pada saat bermain game tersebut. Berbeda dengan anak Flamboyan bawah yang kurang berminat pada game online tersebut.

Kita bisa menggunakan teknologi dalam sektor pendidikan untuk berpartisipasi dalam pembelajaran digital melalui alat dan aplikasi, baik secara offline maupun online. Ini dirancang dengan cara yang teratur dan interaktif, bertujuan untuk mengubah cara mendapatkan dan menyebarkan informasi dengan memanfaatkan internet. Jadi, sangat jelas bahwa pendidikan online menekankan pemanfaatan teknologi internet sebagai sarana untuk menawarkan berbagai solusi yang dapat memperbaiki pemahaman dan keterampilan, sehingga memungkinkan pembelajaran materi pendidikan di mana saja dan kapan saja. Kita bisa menggunakan teknologi dalam sektor pendidikan untuk berpartisipasi dalam pembelajaran digital melalui alat dan aplikasi, baik secara offline maupun online. Ini dirancang dengan cara yang teratur dan interaktif, bertujuan untuk mengubah cara mendapatkan dan menyebarkan informasi dengan memanfaatkan internet. Jadi, sangat jelas bahwa pendidikan online menekankan pemanfaatan teknologi internet sebagai sarana untuk menawarkan berbagai solusi yang dapat memperbaiki pemahaman dan keterampilan, sehingga memungkinkan pembelajaran materi pendidikan di mana saja dan kapan saja (Arifin et al. 2023).

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukan bahwa game online memiliki dampak signifikan terhadap tumbuh kembang anak, khususnya pada perubahan sosial yang terjadi pada anak kota Palangka Raya (kawasan G Obos dan Flamboyan Bawah). Hasil penelitian ini menujukan anak-anak kawasan G obos lebih cenderung bermain game online dibandiingan anak-anak pada kawasan flamboyan bawah yang senang bermain bersama secara langsung. Penggunaan gedeget berdampak positif dan negatif, akantetapi anak yang haus akan pengetahuan mereka lebih menggali apa saja seperti website dan lain sebagainya untuk mengungkap rasa ingin tahu tersebut. Oleh karena itu, penting bagi orang tua membimbing anaknya untuk masa depan anak dengan membatasi penggunaan gedget yang bisa mengakses lebih luas dan mencegah anak agar lebih bijak dalam penggunaan gedget.

REFERENSI

Arifin, Muhammad Risal, Angelita, Nur Salmah, Ni Putu Indah Junita Lestari, and Saidi Naali. 2023. "Pemanfaatan DIGI-EDVOT (Digital Learning For Disabled Young Voters) Bagi Pemilih Disabilitas Di Pemilu 2024." *JIPOSSTER: Jurnal Ilmu Politik Dan Studi Sosial Terapan* 2(1):15–27.

Angela. 2013. "Pengaruh Game Online Terhadap Motivasi Belajar Siswa Sdn 015 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir." *EJournal Ilmu Komunikasi* 1(2):532–44.

Cahyono, Anang Sugeng. 2022. "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia." *Journal Marine Inside* 1(2):1–32. doi: 10.56943/ejmi.v1i2.9.

Fathurrijal, Fathurrijal, Hamudani Hamudani, Endang Rahmawati, Ishanan Ishanan, and M.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Zaki Abdillah. 2023. "Dampak Negatif Game Online Free Fire Terhadap Perilaku Komunikasi Anak Pemain Game Online Free Fire Di Dusun Bile Tepung Lombok Barat." *SOSIO EDUKASI Jurnal Studi Masyarakat Dan Pendidikan* 6(2):74–83. doi: 10.29408/sosedu.v6i2.22128.

Goa, Lorentius. 2017. "Perubahan Sosial Dalam Kehidupan Bermasyarakat." *SAPA - Jurnal Kateketik Dan Pastoral* 2(2):53–67. doi: 10.53544/sapa.v2i2.40.

Henukh, Liti Remildo, Jacob Abolladaka, and Erika Feronika Br Simanungkalit. 2022. "Pengaruh Game Online Terhadap Motivasi Belajar Siswa Kelas Xi Ips Sma Negeri 1 Lobalain." *Journal Economic Education, Business and Accounting* 1(1):1–6. doi: 10.35508/jeeba.v1i1.6412.

Hidayat, Arief, and Syarah Siti Maesyaroh. 2022. "Penggunaan Gadget Pada Anak Usia Dini." *JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 1(5):356. doi: 10.36418/syntax-imperatif.v1i5.159.

Marius, Jelamu Ardu. 2006. "Perubahan Sosial." *Jurnal Penyuluhan* 2(2). doi: 10.25015/penyuluhan.v2i2.2190.

Mayar, Farida. n.d. *PERKEMBANGAN SOSIAL ANAK USIA DINI SEBAGAI BIBIT UNTUK MASA DEPAN BANGSA*.

Santoso, Joko. 2022. "Ketertarikan Game Online Daripada Minat Membaca Bagi Anak." *Journal Of Elementary School Education (Jouese)* 2(2):105–10. doi: 10.52657/jouese.v2i2.1771.

Sari, Novita, Eha Julaeha, Endiyah Noventi, Ida Holida, Kamelia Anis Laudza, Siti Hadijah, Siti Nurhayati, Yuli Eka Sari, and Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. 2023. "Edukasi Pola Asuh Ideal Untuk Gen-Alpha." *Journal of Human And Education* 4(3):293–98.

Ulya, Latifatul, Sucipto Sucipto, and Irfai Fathurohman. 2021. "Analisis Kecanduan Game Online Terhadap Kepribadian Sosial Anak." *Jurnal Educatio FKIP UNMA* 7(3):1112–19. doi: 10.31949/educatio.v7i3.1347.

Ul'zikri, Ahmad Robi. 2024. "Mini Reserach : Pendidikan Politik Dan Demokrasi Lokal Melalui Kelas Online Menggunakan Pendekatan Model One-Group Pretest-Posttest Design Pada Mahasiswa Kabupaten Murung Raya." 3(4):50–57.

Usoh, Trivena, Andi Buanasari, and Ferdinand Wowiling. 2022. "Studi Kualitatif Eksplorasi Dampak Game Online: Mobile Legends Terhadap Perilaku & Emosi Remaja Di Kabupaten Minahasa." *Jurnal Keperawatan* 12(1):18–28.

Wiguna, Reza Indra, H. Menap, Deby Ayu Alandari, and Lalu Hersika Asmawariza. 2020. "Hubungan Kecanduan Bermain Game Online Dengan Motivasi Belajar Pada Anak Usia 10-12 Tahun." *Jurnal Surya Muda* 2(1):18–26. doi: 10.38102/jsm.v2i1.48.

Zahra, Annisa Dian. 2022. "DAMPAK PAPARAN GAME ONLINE PADA ANAK USIA

DINI." *Title. Jurnal Pendidikan Edukasi Anak* 2(1):156–66.

Vol. 4, No. 2, Juni 2025
e-ISSN: 2964-1322
p-ISSN: 2964-9595

JIPOSSTER: Jurnal Ilmu Politik dan Studi Sosial Terapan

Perubahan Makna Sungai Kahayan Bagi Masyarakat di Desa Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya

Kamelia Simamora [(1)*], Vanny Purba[(2)], Angga[(3)], Elia Damayanti [(4,)], Muhammad Zusanri Batubara[(5)], Saputra Adiwijaya[(6)]
[(1)]Sosiologi, Universitas Palangka Raya, Palangka Raya, 73112, Indonesia
Email : [(a*)]vannypurba04@email.com

A B S T R A K

Sungai Kahayan, yang dulunya menjadi makna keberkahan dan sumber kehidupan masyarakat, kini mengalami kerusakan akibat aktivitas manusia, terutama penambangan emas ilegal dan pembuangan sampah sembarangan. Perubahan fisik sungai, seperti pendangkalan dan pencemaran air, berdampak signifikan pada ekosistem serta aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat sekitar. Mata pencaharian utama, seperti nelayan dan pekerja tambang, terpengaruh oleh perubahan ini, sementara mitos budaya dan tradisi lokal mulai merosot. Kondisi sungai yang dulunya bersih kini berubah menjadi tercemar, dangkal, dan kehilangan fungsi utamanya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pencemaran sungai terhadap lingkungan, kesehatan, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan wawancara, observasi, dan studi literatur.

Kata kunci: Pemaknaan, Sungai Kahayan, Perubahan Sosial

A B S T R A C T

Kahayan River, which used to be a meaning of blessing and a source of community life, is now experiencing damage due to human activities, especially illegal gold mining and littering. Physical changes to the river, such as siltation and water pollution, have a significant impact on the ecosystem as well as the economic and social activities of the surrounding communities. Key livelihoods, such as fishermen and mine workers, are affected by these changes, while cultural myths and local traditions are beginning to decline. The once clean condition of the river has now become polluted, shallow and lost its main function. This research aims to analyze the impact of river pollution on the environment, health, and socio-economic life of the community. The research method uses a descriptive qualitative approach with interviews, observations, and literature studies.

Keywords: *Meaning, Kahayan River, Social Change*

Submit:	Revised:	Accepted:	Available online:
.2025	07.11.2022	07.12.2022	07.01.2023

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Perkembangan populasi di daerah aliran Sungai Kahayan, Provinsi Kalimantan Tengah, berlangsung dengan sangat cepat setiap tahun. Mayoritas penduduk di wilayah ini adalah suku Dayak yang telah lama mendiami sepanjang tepi sungai. Di area ini, masyarakat memanfaatkan air sungai untuk berbagai kebutuhan sehari-hari, seperti untuk minum, perikanan, transportasi, dan pertanian. Namun, kondisi lahan pertanian di bagian hilir, terutama di Kelurahan Bereng Bengkel, Saat ini mengalami penurunan dalam produktivitas akibat perubahan penggunaan lahan.saat ini mengalami penurunan produktivitas akibat perubahan tata guna lahan.. Dalam tulisannya yang lain, Hartatik (2017) merinci bagaimana penyebaran suku Dayak di bagian tenggara Kalimantan diizinkan oleh adanya Sungai Barito dan anak-anak sungainya.

Sungai Kahayan adalah sebuah sumber yang sangat rentan terhadap pencemaran karena daerah aliran sungainya menjadi tempat pembuangan akhir bagi limbah cair seperti limbah MCK, ditambah dengan banyaknya keramba ikan di sekitarnya. Pengurangan kualitas air, terutama disebabkan oleh aktivitas pertambangan batubara dan limbah dari masyarakat, membuat air sungai menjadi keruh. Hal ini berdampak pada penduduk yang tinggal di sekitar sungai, sehingga mereka tidak bisa memanfaatkan air sungai untuk mandi atau mencuci (Setyawan et al. 2012). Seiring dengan perkembangan wilayah, kegiatan di sungai tidak lagi menjadi aspek utama dalam kehidupan masyarakat Dayak. Pertambangan telah mengubah pola hidup warga, di mana mereka lebih memilih untuk menetap dekat atau di sekitar sungai. Dahulu, masyarakat lokal Kahayan menjadikan Sungai Kahayan sebagai pusat kegiatan ritual, namun kini berbagai upacara keagamaan sudah jarang diadakan di sungai tersebut. Ada perubahan yang cukup signifikan dalam pandangan orang Kahayan terhadap sungai yang dulunya menjadi sentra kehidupan mereka, baik dalam aspek pekerjaan maupun aktivitas sehari-hari.

Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap arti Sungai Kahayan bagi masyarakat Dayak yang memposisikan sungai sebagai pusat kehidupan mereka. Penelitian ini dilakukan di kalangan komunitas Dayak yang tinggal di tepi Sungai Kahayan, di Kota Palangka Raya, Kecamatan Pahandut. Keterikatan yang kuat antara masyarakat dan lingkungan sekitar tidak bisa dipandang sebelah mata. Sejak komunitas ini pertama kali menduduki wilayah tersebut, mereka tentu sudah mengenal dan mempelajari berbagai tanda serta karakteristik alam di sekeliling mereka. Terutama bagi komunitas tradisional, mereka adalah komunitas yang bergantung pada sungai dan tidak dapat menjalani hidup jauh darinya. Sungai menjadi pusat bagi kegiatan ritual, sosial, dan ekonomi mereka, dari awal kehidupan hingga akhir. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir, dengan berbagai faktor, kehidupan masyarakat telah mulai berubah dan pemanfaatan sungai semakin berkurang, kecuali untuk kepentingan ekonomi.

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka sebagai dasar utama dalam pengumpulan dan analisis data. Pendekatan kualitatif dipilih karena dinilai paling sesuai untuk menggali perspektif dan cara pandang masyarakat terhadap suatu fenomena, dalam hal ini, makna sungai. Kajian pustaka dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan, dan meninjau berbagai sumber yang terpercaya, seperti jurnal ilmiah, buku akademis, artikel riset, laporan lembaga, serta dokumen lain yang mengulas tema sejenis, baik dalam konteks lokal mau pun global. Tujuan dari ini untuk mendapatkan kerangka teoritis dan pemahaman yang menyeluruh tentang bagaimana masyarakat memberi makna pada sungai dalam kehidupan mereka.Selain dari kajian pustaka, pengumpulan data juga diperkaya dengan wawancara untuk triangulasi data guna meningkatkan keabsahan temuan.

Wawancara dilakukan secara mendalam kepada sejumlah informan yang diangga memiliki pengetahun dan pengalaman terkait hubungan masyarakat dengan sungai, khususnya penduduk

yang tinggal di sekitar lokasi penelitian. Metode ini dimanfaatkan untuk menggali persepsi, nilai, serta narasi lokal yang ada dalam kehidupan sehari-hari masyarakat mengenai fungsi dan peran sungai, baik dari sudut pandang ekologis, ekonomi, sosial, maupun budaya. Studi ini berfokus pada warga yang tinggal di Kecamatan Pahandut, khususnya dari Kelurahan Langkai, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Daerah ini dipilih karena memiliki kedekatan secara geografis dan historis dengan Sungai Kahayan, yang sejak lama menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat setempat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana masyarakat memberikan makna kepada sungai dari waktu ke waktu, serta bagaimana perubahan dalam aspek sosial, lingkungan, dan budaya memengaruhi pandangan masyarakat terhadap sungai sebagai unsur fundamental dalam hidup mereka. Dengan mengombinasikan pendekatan kualitatif, kajian pustaka, dan wawancara mendalam, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam memahami perubahan makna sungai secara menyeluruh, serta memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya pelestarian nilai-nilai lokal yang terkait dengan lingkungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini berangkat dari sebuah pemikiran bahwa terjadi pergeseran makna terhadap sungai di kalangan masyarakat Dayak yang menetap di sepanjang aliran Sungai Kahayan, khususnya di wilayah Kecamatan Pahandut. Pendekatan analisis makna dengan menganalisis perspektif subjek penelitian menjadi pendekatan yang relevan dalam studi sosial kontemporer (Ulzikri, 2020). Dalam konteks kehidupan masyarakat Dayak, sungai dipahami bukan hanya sebagai sumber daya alam yang menyediakan air kebutuhan sehari-hari, tetapi juga memiliki makna simbolik, sosial, budaya, bahkan spiritual. Sungai menjadi bagian integral dalam kehidupan mereka, menjadi lokasi bagi berbagai aktivitas ekonomi, seperti memancing dan transportasi sekaligus berfungsi sebagai ruang interaksi sosial dan praktik ritual adat. Namun, seiring berjalannya waktu, dengan arus modernisasi dan pembangunan kota Palangka Raya, terjadi perubahan signifikan dalam tata ruang, sistem nilai, dan pola hidup masyarakat., Hal ini berdampak langsung pada cara masyarakat memaknai serta berinteraksi dengan lingkungan sungai.Perubahan ini tercermin dalam berkurangnya ketergantungan masyarakat terhadap sungai sebagai sumber utama kehidupan, yang kini sering tergantikan oleh fasilitas modern, seperti pasokan air bersih dari PDAM, pasar modern, dan akses transportasi darat yang lebih cepat. Selain itu, perkembangan kawasan perkotaan di sekitar Sungai Kahayan juga berdampak pada degradasi lingkungan,pencemaran air, serta perubahan fungsi lahan yang mengancam ekosistem sungai. Perlahan, persepsi masyarakat terhadap sungai berubah, dari yang sebelumnya dianggap sebagai pusat kehidupan, menjadi sekadar bagian dari lanskap kota yang kurang diperhatikan nilai-nilai lokalnya.

Untuk memahami lebih dalam mengenai perubahan makna ini, penelitian ini akan menggabungkan studi pustaka dan kerja lapangan. Studi pustaka akan dilakukan dengan menelusuri literatur yang relevan tentang hubungan masyarakat adat dengan lingkungan, makna kultural sungai, serta dinamika sosial-budaya di era modern. Sementara itu, pengumpulan data lapangan akan dilakukan melalui wawancara mendalam dengan masyarakat Dayak yang tinggal di sekitar Sungai Kahayan, baik yang masih bergantung pada sungai maupun yang telah mengalami perubahan pandangan terhadap sungai. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran utuh mengenai perubahan makna sungai dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Dayak di Kecamatan Pahandut, serta faktor-faktor yang mendorong terjadinya pergeseran tersebut. (Wainarisi and Tumbol 2022) Di beberapa tempat pada zaman dahulu, sungai bahkan menjadi kebutuhan dasar bagi manusia. Sungai menjadi tempat untuk mendapatkan sumber air minum, makanan, mandi, mencuci, dll (Susilawati, 2009).

> *"Dulunya Sungai ini punya manfaat besar sebagai sumber kehidupan kami salah satunya tempat mencari ikan,Air,minum, mandi,mencuci dan jalur untuk menyebrang desa lain (jalur transportasi: Klotok,Perahu,Kapal),* (Bapak Cn,13 Maret 2025)

Pernyataan dari Bapak Cn, mengungkapkan bahwa sungai tersebut dulunya memiliki peran penting sebagai sumber kehidupan masyarakat setempat. Sungai Kahayan bukan hanya menjadi tempat mencari ikan dan sumber air untuk kebutuhan sehari-hari seperti minum,mandi, dan mencuci, tetapi juga berfungsi sebagai jalur transportasi utama yang menghubungkan antar desa menggunakan klotok, perahu, maupun kapal. Hal ini menunjukkan bahwa Sungai Kahayan dahulu merupakan elemen penting dalam system sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat sekitar. Lingkungan adalah suatu area di mana berbagai makhluk hidup tinggal. Lingkungan menjadi salah satu elemen penting bagi manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam suatu lingkungan, terjadi proses yang biasanya disebut adaptasi karena kondisi lingkungan tidak selalu stabil. Sungai Kahayan, yang menjadi fokus penelitian ini, merupakan simbol bagi masyarakat Kalimantan Tengah, khususnya bagi suku Dayak di wilayah Kahayan Tengah. Komunitas Kalimantan yang menetap di tepi sungai memandang sungai sebagai sumber kehidupan sekaligus sebagai bagian dari identitas mereka. Hal ini juga biasa terjadi di Kalimantan Tengah, sebagaimana dijelaskan oleh Dese dan tim dalam buku mereka berjudul Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Kalimantan Tengah. Setiap aliran sungai pada dasarnya terbentuk sebagai satu komunitas, di mana masing-masing kelompok memiliki rasa bangga terhadap sungai mereka, sehingga sering kali mereka mengenalkan identitas mereka dengan menyebutkan nama sungai tersebut.

> *"Iya, Sungai Kahayan dulu memang dianggap sebagai simbol keberkahan dan sumber kehidupan bagi masyarakat. Sebagian besar kebutuhan hidup, seperti makanan, diperoleh dari sungai—terutama ikan yang melimpah. Tapi sekarang ikan sudah sangat sulit ditemukan. Airnya sudah dangkal dan tercemar, jadi tidak memungkinkan lagi bagi ikan untuk hidup dan berkembang biak. Sungai ini rusak, salah satunya karena aktivitas tambang."* (wawancara Bapak Bg, 13 Maret 2025)

Pernyataan bapak Bg bahwa sungai kini dangkal dan tercemar merupakan indikator bahwa aktivitas manusia, khususnya pertambangan, telah mengubah karakteristik alami sungai. Hal ini sejalan dengan temuan-temuan dalam studi ekologi politik yang menunjukkan bahwa eksploitasi sumber daya alam untuk kepentingan industri kerap berdampak pada marginalisasi komunitas lokal dan hilangnya akses terhadap sumber daya yang dulunya bersifat komunal. Di masa lalu, aliran sungai ini menjadi inti kehidupan, tetapi berbagai permasalahan seperti pencemaran air, bencana banjir akibat penebangan hutan, pembangunan pemukiman, dan kemajuan teknologi, serta kebijakan pemerintah, menyebabkan banyak orang memutuskan untuk berpindah dari tepi sungai ke daerah atau desa yang lebih aman (Susilawati, 2009).

> *"Sudah tidak ada lagi masyarakat yang menggunakan air Sungai Kahayan untuk kebutuhan seharihari seperti minum atau memasak. Saat ini, air bersih diperoleh dari PDAM. Untuk keperluan rumah tangga, warga umumnya menggunakan mesin penyaring seperti Hitachi."* (Wawancara Bapak Ws, 13 Maret 2025).

Dulu air sungai dimanfaatkan secara langsung untuk kebutuhan seperti minum dan memasak. Namun, akibat menurunnya kualitas air sungai, masyarakat kini bergantung pada

sumber air alternatif, yakni air bersih dari PDAM serta penggunaan alat penyaring air seperti mesin Hitachi untuk keperluan rumah tangga.Hal ini menunjukkan pergeseran dari pemanfaatan sumber daya alam lokal menuju ketergantungan pada infrastruktur modern akibat degradasi lingkungan. Dalam konteks ini, pencemaran Sungai Kahayan telah menimbulkan tekanan ekologis yang memaksa masyarakat beradaptasi melalui substitusi teknologi dan layanan publik. Perubahan ini juga mencerminkan meningkatnya beban ekonomi rumah tangga akibat kebutuhan untuk membeli air bersih dan alat penunjang lainnya.

Perubahan Fisik Sungai Kahayan

Dahulu sungai mempunyai kedalaman yg memungkinkan perahu melintas menggunakan leluasa, sekarang sungai cenderung dangkal, sebagai akibatnya membatasi akses transportasi air. Sungai Kahayan pula dipenuhi sampah yang dibuang sembarangan.

> *"Kebiasaan warga membuang sampah ke sungai jadi solusi mudah lantaran arus sungai akan membawa sampah pergi, walaupun ini justru memperburuk pencemaran"* (Ujar Bapak Cy, 15 Maret 2025).

Salah satu informan menyatakan bahwa kebiasaan masyarakat membuang sampah langsung ke Sungai Kahayan masih sering terjadi. Hal ini dilakukan karena dianggap praktis, mengingat arus sungai akan membawa sampah menjauh. Informan juga menyadari bahwa praktik tersebut justru memperburuk kondisi pencemaran sungai,Namun ini adalah solusi dikarenakan tempat pembuangan sampah kurang atau bahkan tidak ada disekitar pemukiman.



Gambar 1. Dokumentasi Sungai Kahayan Dulu
Sumber: Observasi Lapangan Noor Hamidah Dkk,2015



Gambar 2. Dokumentasi Sungai Kahayan Sekarang
Sumber: Data Primer,2025

Kegiatan Ekonomi di Sekitar Sungai

Tipologi masyarakat di Kalimantan Tengah sangat bergantung pada sungai untuk kehidupan sehari-hari mereka. Sungai menjadi inti dari aktivitas ekonomi dan berpengaruh besar terhadap cara hidup masyarakat, menjadikannya sebagai sumber penghidupan serta jalur transportasi (Hamidah et al. 2014). Secara umum, sebagian besar masyarakat Dayak menjalankan sistem ekonomi subsisten yang mencakup berbagai kegiatan seperti perdagangan temporer (dengan cara berpindah-pindah), berburu, menangkap ikan secara tradisional, serta mengumpulkan hasil hutan yang tersedia di sekitar mereka (R. Bella. 2021).

> *"Dulu, Sungai Kahayan menjadi sumber utama penghasilan bagi masyarakat sekitar. Banyak warga yang bekerja sebagai nelayan, dan hasil tangkapan ikan dari sungai dijual ke pasar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sungai juga digunakan sebagai jalur transportasi antar kampung dengan menggunakan perahu atau klotok. Namun sekarang, kondisi sungai sudah jauh berbeda. Ikan semakin sulit ditemukan karena airnya dangkal dan tercemar akibat aktivitas tambang. Transportasi air pun (Klotok,Perahu) sudah tidak seaktif dulu karena alur sungai yang tidak lagi bisa dilewati dengan mudah."* Bapak S.

Pada kesempatan sebelumnya, narasumber menjelaskan bahwa menurut kepercayaan masyarakat Dayak, Sungai Kahayan memiliki makna simbolis sebagai sumber keberkahan dan kehidupan. Ia mengakui bahwa di masa lalu, sungai ini benar-benar menjadi simbol kehidupan karena seluruh aktivitas masyarakat berpusat di sana mulai dari tempat tinggal hingga sumber mata pencaharian. Sebelum banyak orang bermukim di daratan tinggi, semua kebutuhan hidup masyarakat berasal dari sungai ini. Namun, kondisi kini sudah berubah. Jika dilihat di sepanjang pinggiran Sungai Kahayan dan daerah atas kampung, suasana sudah mulai sepi. Penyebabnya, masyarakat banyak yang berpindah ke daratan karena akses darat sudah semakin mudah dan terhubung. Selain itu, tinggal di dekat sungai juga berisiko terkena dampak banjir. Meskipun masih terdapat beberapa kampung di pinggir sungai, penduduknya sudah banyak yang berpindah ke daerah yang lebih tinggi di daratanNamun, kondisi tersebut kini telah berubah akibat pencemaran dan pendangkalan sungai, terutama yang disebabkan oleh aktivitas pertambangan. Penurunan populasi ikan dan sulitnya akses transportasi air mencerminkan degradasi fungsi ekologis dan sosial sungai, yang berdampak langsung terhadap penghidupan masyarakat sekitar.

> *"Kalo sekarang ini masyarakat sudah kesulitan mencari pekerjaan. Dulu masih bisa menangkap ikan, tapi sekarang ikan sudah hampir tidak ada lagi. Maknaya, sebagian warga memilih bekerja di tambang. Mau bagaimana lagi, kondisi sungai sudah rusak, dan mencari ikan tidak bisa lagi dijadikan sumber penghasilan seperti dulu."* (Ujar Bapak Cy 15 Maret 2025)

Penambangan emas ilegal yang dinilai menguntungkan secara ekonomi menjadi daya tarik tersendiri. Sayangnya, dampak negatif terhadap lingkungan jauh lebih besar, termasuk rusaknya ekosistem sungai dan pencemaran air.

Aspek Sosial Budaya

Masyarakat yang tinggal di dekat sungai sering memanfaatkan sungai sebagai tempat menebarkan abu kremasi.Tradisi ini terus berlanjut, namun memerlukan persetujuan dan pelaporan kepada ketua RT setempat. Ada pula mitos di kalangan masyarakat tentang

keberadaan buaya putih yang hidup di Sungai Kahayan. Keyakinan ini membuat masyarakat selalu menunjukkan rasa hormat berupa izin ketika menyeberangi sungai, meski tidak ada yang melihatnya.Namun mitos tersebut berangsur-angsur hilang akibat modernisasi dan kerusakan sungai.

> *"Nggak pernah lihat langsung. Dulu waktu masih kecil memang pernah dengar cerita, katanya ada buaya putih di sungai ini. Tapi setelah dewasa, saya baru paham kalau itu sebenarnya cuma cerita orang tua untuk menakut-nakuti anak-anak agar tidak mandi terlalu lama atau berenang di sungai saat hari mulai gelap. Jadi, buaya putih itu lebih ke cerita untuk mendisiplinkan anak-anak, bukan sesuatu yang benar-benar ada."* (Bpk M,RT 02,13 Maret 2025).

Mitos buaya putih merupakan contoh bagaimana cerita rakyat mengalami pergeseran makna seiring waktu. Dari cerita yang digunakan untuk menanamkan disiplin dan rasa takut pada masa kecil, menjadi simbol budaya yang dimaknai secara lebih kritis dan rasional oleh generasi sekarang. Walaupun tidak lagi dipercaya secara literal, mitos ini tetap memiliki nilai penting dalam memahami cara masyarakat menjaga keamanan, mendidik anak-anak, dan merawat warisan budaya.

> *'Dulu Masyarakat juga sering berkumpul di pinggir sungai. Ada yang ngopi sambil cerita, anak-anak mandi bersama, ada rasa kebersamaan. Tapi sekarang sudah jarang. Orang sudah pada sibuk dan lebih sering pegang HP yang buat Interaksi kita jadi berkurang.*" (Bpk M,RT 02,13 Maret 2025).

Jika dilihat di sepanjang pinggiran Sungai Kahayan dan daerah atas kampung, suasana sudah mulai sepi. Penyebabnya, masyarakat banyak yang berpindah ke daratan karena akses darat sudah semakin mudah dan terhubung. Selain itu, tinggal di dekat sungai juga berisiko terkena dampak banjir. Meskipun masih terdapat beberapa kampung di pinggir sungai, penduduknya sudah banyak yang berpindah ke daerah yang lebih tinggi di daratan.

Upaya Pelestarian & Pengelolaan Sungai

Salah satu faktor yang menyebabkan pencemaran sungai adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan. Tindakan manusia yang turut menyebabkan pencemaran sungai di antaranya adalah kebiasaan mandi, mencuci, dan membuang sampah ke dalam sungai. (Kospa, 2018). Upaya membersihkan Sungai Kahayan bergantung dalam wahana transportasi. Ketika perahu tersedia, Masyarakat lebih bersemangat untuk terlibat pada aktivitas pembersihan. Hal ini memperlihatkan bahwa keterbatasan akses dan fasilitas sebagai keliru satu hambatan primer pada pengelolaan sungai.Selain itu, sosialisasi rakyat terhadap pentingnya menjaga kebersihan sungai perlu ditingkatkan. Pemerintah wilayah dan organisasi lingkungan wajib berkolaborasi pada menaruh edukasi pada rakyat mengenai efek negatif pencemaran dan pentingnya menjaga keberlanjutan Sungai.Perlu adanya komitmen beserta antara rakyat, pemerintah, dan pihak partikelir buat memulihkan sungai supaya bisa pulang sebagai asal kehidupan yang berguna bagi generasi mendatang.



Dokumetasi 3. Sungai kahayan yang Sudah tercemar Sampah Masyarakat
Sumber: data Primer,2025

KESIMPULAN

Sungai Kahayan, sebagai salah satu sungai utama di Kalimantan Tengah, memegang peran sentral dalam kehidupan masyarakat, terutama komunitas Dayak. Sungai ini bukan sekadar sumber air atau jalur transportasi tradisional, tetapi juga merupakan simbol identitas budaya dan ruang sosial yang melekat kuat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat lokal. Kehadiran Sungai Kahayan merepresentasikan keterikatan ekologis, sosial, dan spiritual masyarakat dengan alam sekitarnya. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, berbagai perubahan sosial, ek onomi, dan lingkungan telah menyebabkan pergeseran mendalam terhadap fungsi dan makna Sungai Kahayan. Aktivitas penambangan emas ilegal, peningkatan limbah rumah tangga, dan kebijakan pembangunan yang abai terhadap nilai ekologis sungai telah memberikan dampak serius terhadap kualitas ekosistemnya. Perubahan fisik seperti sedimentasi yang meningkat, penyempitan alur, hingga perubahan warna air, mencerminkan degradasi lingkungan yang nyata. Dampak ini turut dirasakan langsung oleh masyarakat yang sebelumnya menggantungkan hidup pada sungai, melalui aktivitas seperti perikanan tradisional, pengangkutan air, hingga pelaksanaan upacara adat dan kegiatan sosial lainnya.Modernisasi dan urbanisasi juga turut mempengaruhi pola relasi masyarakat dengan sungai. Ketergantungan terhadap sungai sebagai sumber kehidupan perlahan berkurang, tergeser oleh sistem penyediaan air bersih modern dan pergeseran gaya hidup masyarakat urban.

Hal ini memperlihatkan bagaimana transformasi sosial turut mengubah cara pandang dan hubungan manusia dengan alam.Merespon kompleksitas permasalahan ini, sejumlah rekomendasi strategis perlu dikedepankan. Pertama, pemerintah harus memperkuat regulasi dan penegakan hukum, khususnya terhadap aktivitas penambangan emas tanpa izin yang menjadi penyumbang utama pencemaran. Kedua, peningkatan kesadaran masyarakat menjadi hal krusial. Program edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan perlu dijalankan guna membangun kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian sungai. Ketiga, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta harus diperkuat melalui program revitalisasi sungai yang partisipatif dan berkelanjutan. Terakhir, setiap kebijakan pembangunan yang menyasar kawasan sungai harus mempertimbangkan aspek sosial-budaya lokal, agar tidak mengabaikan hak-hak masyarakat yang telah lama bergantung pada sungai. Pelestarian Sungai Kahayan tidak bisa dilakukan secara parsial. Upaya ini harus ditempatkan sebagai strategi jangka panjang yang

tidak hanya bersifat teknis-lingkungan, tetapi juga menyentuh aspek identitas budaya dan ketahanan sosial masyarakat terhadap perubahan zaman. Dengan komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan, Sungai Kahayan memiliki potensi besar untuk kembali menjadi sumber kehidupan yang berkelanjutan bagi generasi kini dan yang akan datang. Ia tidak hanya sungai dalam pengertian fisik, tetapi juga sebagai ruang hidup, simbol budaya, dan jantung ekologi Kalimantan Tengah yang harus dijaga bersama.

Ucapan Terima kasih

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kasihnya kami bisa menyelesaikan artikel penelitian di Kecamatan Langkai Kab.Pahandut, Kota Palangka Raya juga berterimakasih juga kepada dosen pembimbing penelitian kami yaitu Ibu Elia Damayanti, S.P.,M,SI dan kepada masyarakat yang meluangkan waktunya untuk kami wawancara dan memberikan informasi yang bermanfaat.

REFERENSI

(Wainarisi and Tumbol 2022) R. Bella, Stevany, A.I. Gujali, R.S. Dewi, E. Lion, and M. Mustika. 2021. "Sistem Masyarakat Dan Organisasi Suku Dayak Ngaju (Studi Kasus Di Desa Mandomai Kalimantan Tengah)." *Jurnal Kewarganegaraan"* .

Riady, Rendro Rismae. 2019. "Analisis Debit Aliran Sungai Kahayan Provinsi Kalimantan Tengah." *Jurnal Teknologi Berkelanjutan".*

Setyawan, Rezha, Achmad Rusdiansyah, and Hafiizh Prasetia. 2012. "Identifikasi Kualitas Perairan Di Sungai Kahayan Dari Keberadaan Sistem Keramba." *Jurnal Keilmuan dan Aplikasi Teknik"*

Wainarisi, Yane Octavia Rismawati, and Stynie Nova Tumbol. 2022. "Pergeseran Makna Sungai Kahayan Bagi Masyarakat Dayak Ngaju Di Desa Bukit Rawi Kabupaten Pulang Pisau." *Journal of Moral and Civic"*

R. Bella, Stevany, A.I. Gujali, R.S. Dewi, E. Lion, and M. Mustika. 2021. "Sistem Masyarakat Dan Organisasi Suku Dayak Ngaju (Studi Kasus Di Desa Mandomai Kalimantan Tengah)." *Jurnal Kewarganegaraan"*

Darmadi, Hamid, Jurnal Pendidikan Sosial Vol.3 No. 2 Desember 2016, Dayak Asal Usul dan Penyebarannya di Bumi Borneo. Pontianak

Dewantara, J. A., & Nurgiansah, T. H. (2021). Building Tolerance Attitudes Of PPKN Students Through Multicultural Education Courses. Jurnal Etika Demokrasi

Eviyanti, S. (2010). Taman Budaya Kalimantan Tengah. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya

Yogyakarta.

Kospa, H. S. D. (2018). Kajian Persepsi dan Perilaku Masyarakat Terhadap Air Sungai. *Jurnal Tekno Global UIGM Fakultas Teknik*, *7*(1). https://doi.org/10.36982/jtg.v7i1.509

Ulzikri, A. R. (2020). Perspektif Lembaga Swadaya Masyarakat Lokal dan Pemerintah Daerah Terhadap Sumberdaya Alam (Discourse Analisis dalam Kasus Eksploitasi Pasir di Perairan Krakatau Lampung Selatan). *Jurnal Public Policy*, *6*(2), 56. https://doi.org/10.35308/jpp.v6i2.1994

Aeni, Zahratul, and Weli Arjuna Wiwaha. 2022. "Kontribusi Ilmu Psikologi Dan Sosiologi Dalam Perilaku Organisasi Serta Implikasinya Terhadap Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam." JURNAL MAHASANTRI 2(2). doi:10.57215/pendidikanislam.v2i2.161.

Vol. 4, No. 2, Juni 2025
e-ISSN: 2964-1322
p-ISSN: 2964-9595

JIPOSSTER: Jurnal Ilmu Politik dan Studi Sosial Terapan

Tata Kelola Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung: Analisis Multi-Aspek terhadap Data, Kebijakan, dan Implementasi (2018-2024)

Ulfa Umayasari[(1)*], Goestyari Kurnia Amantha[(2)]
[(1)]Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 35141, Indonesia
Email : [(a*)]ulfaumayasari@fisip.unila.ac.id

A B S T R A K

Kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtP/A) di Provinsi Lampung merupakan tantangan tata kelola pemerintahan yang signifikan, ditandai dengan peningkatan jumlah kasus yang dilaporkan dan adanya kesenjangan implementasi yang sistemik. Dengan menggunakan pendekatan metode campuran yang mengombinasikan analisis data kuantitatif dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) dan Badan Pusat Statistik (BPS) dengan analisis kualitatif terhadap kebijakan dan kelembagaan, studi ini mengevaluasi efektivitas respons pemerintah provinsi. Temuan penelitian mengungkap adanya "paradoks pelaporan", di mana peningkatan jumlah kasus dapat mencerminkan membaiknya kepercayaan korban terhadap sistem, bukan semata-mata peningkatan insiden. Studi ini mengidentifikasi pola dominan kekerasan seksual terhadap korban remaja, disparitas geografis dalam distribusi kasus, serta kelemahan kritis dalam kerangka kelembagaan, termasuk keterbatasan sumber daya dan ketiadaan prosedur operasional terpadu untuk mendukung Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2021. Kolaborasi dengan organisasi non-pemerintah (LSM), meskipun ada, ditemukan masih terfragmentasi. Jurnal ini diakhiri dengan rekomendasi yang ditargetkan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan, menerbitkan peraturan turunan untuk memastikan implementasi yang terkoordinasi, dan mengorientasikan kembali strategi ke arah pencegahan yang berbasis data.

Kata kunci : Kekerasan Perempuan dan Anak, Kapasitas Kelembagaan, Implementasi Kebijakan.

A B S T R A C T

Violence against women and children (VAW/C) in Lampung Province presents a significant governance challenge, marked by an increasing number of reported cases and systemic implementation gaps. Using a mixed-methods approach that combines quantitative data analysis from the Online Information System for the Protection of Women and Children (SIMFONI-PPA) and the Central Bureau of Statistics (BPS) with a qualitative analysis of policies and institutions, this study evaluates the effectiveness of the provincial government's response. The findings reveal a "reporting paradox," where the rise in case numbers may reflect improved victim trust in the system rather than solely an increase in incidents. This study identifies a dominant pattern of sexual violence against adolescent victims, geographical disparities in case distribution, and critical weaknesses in the institutional framework, including resource limitations and the absence of integrated operational procedures to support Regional Regulation No. 2 of 2021. Collaboration with non-governmental organizations (NGOs), while present, is found to be fragmented. The journal concludes with targeted recommendations to strengthen institutional capacity, issue derivative regulations to ensure coordinated implementation, and reorient strategies toward data-driven prevention.

Keywords: *Violence Against Women and Children, Institutional Capacity, Policy Implementation.*

Submit:	Revised:	Accepted:	Available online:
29.06.2025	30.06.2025	30.06.2025	30.06.2025

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtP/A) merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang mendasar dan menjadi salah satu indikator kegagalan negara dalam melindungi warganya. Fenomena ini bukan sekadar persoalan kriminalitas individual, melainkan sebuah masalah kebijakan publik yang kompleks yang menguji kapasitas, responsivitas, dan akuntabilitas institusi negara. Pada tingkat nasional, Indonesia menghadapi tantangan serius dalam isu ini. Data dari berbagai sumber, termasuk Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan, secara konsisten menunjukkan tingginya prevalensi kekerasan, yang mendorong pemerintah untuk mengesahkan serangkaian instrumen hukum fundamental seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan yang paling mutakhir, Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, 2022; Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, 2022).

Provinsi Lampung menjadi sebuah studi kasus yang kritis dalam konteks ini. Data yang tersedia menunjukkan situasi darurat yang memerlukan perhatian serius dari perspektif ilmu pemerintahan. Laporan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas PPPA) Provinsi Lampung menunjukkan tren peningkatan jumlah korban kekerasan perempuan yang signifikan selama lima tahun terakhir, dengan angka yang meningkat lebih dari dua kali lipat dari 233 korban pada tahun 2017 menjadi 567 korban pada tahun 2022 (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, 2022). Data yang lebih baru mengonfirmasi persistensi masalah ini; pada paruh pertama tahun 2023 saja, tercatat 307 kasus kekerasan (Katadata, 2023), dan pada semester pertama tahun 2024, tercatat 296 kasus dengan 330 korban (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, 2024).

Angka-angka ini, meskipun sudah mengkhawatirkan, diyakini hanya merupakan puncak dari "fenomena gunung es" (*iceberg phenomenon*). Banyak studi dan laporan mengindikasikan bahwa data yang tercatat, bahkan melalui sistem canggih seperti Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, n.d.; Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, 2023), kemungkinan besar masih jauh di bawah angka kejadian sebenarnya. Faktor-faktor sosio-kultural, seperti budaya malu atau menganggap kekerasan sebagai "aib" keluarga, menjadi penghalang utama bagi korban untuk melapor (Suyanto, 2007).

Untuk menganalisis fenomena yang kompleks ini secara sistematis, penelitian ini menggunakan landasan konseptual dan teoretis yang terdefinisi dengan baik. Kerangka teoretis utama yang digunakan adalah Tata Kelola Kolaboratif. Teori ini relevan karena penanganan KtP/A adalah masalah "jahat" (*wicked problem*) yang tidak dapat diselesaikan oleh satu lembaga tunggal. Keberhasilannya menuntut sinergi antara berbagai aktor pemerintah dan non-pemerintah (Sinta, 2022; Pemerintah Provinsi Lampung, 2025). Menurut Ansell dan Gash (2008), tata kelola kolaboratif adalah sebuah proses di mana berbagai aktor dari sektor publik dan non-publik bekerja sama dalam forum bersama untuk membuat keputusan atau mengelola masalah publik. Sebagai kerangka pelengkap, penelitian ini mengadopsi Model Evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) yang dikembangkan oleh Stufflebeam untuk mengevaluasi program dan kebijakan pemerintah secara lebih terstruktur (Stufflebeam, 2003).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif tata kelola penanganan KtP/A di Provinsi Lampung, dengan menjawab pertanyaan berikut: (1) Bagaimana tren, skala, dan karakteristik kekerasan di Lampung dari 2018-2024? (2) Sejauh mana kerangka kebijakan dan kelembagaan yang ada efektif? (3) Bagaimana model kolaborasi antara pemerintah dan LSM berjalan? (4) Rekomendasi kebijakan apa yang dapat dirumuskan? Studi ini memiliki signifikansi teoretis dan praktis, dengan harapan dapat memberikan wawasan yang dapat ditindaklanjuti (*actionable insights*) bagi para pembuat kebijakan, praktisi layanan, serta akademisi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran (*mixed-methods approach*), yang mengombinasikan analisis data kuantitatif dan kualitatif untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai tata kelola penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Lampung.

Pengumpulan data kuantitatif bersumber dari data sekunder yang dipublikasikan oleh lembaga pemerintah. Data utama mengenai tren, skala, dan karakteristik kasus (profil korban, pelaku, jenis kekerasan, dan sebaran geografis) dari tahun 2018 hingga 2024 diperoleh dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) yang dikelola oleh Kementerian PPPA dan Dinas PPPA Provinsi Lampung (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, 2022, 2023, 2024). Data pendukung juga diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung untuk melengkapi konteks sosial-ekonomi (Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2018).

Pengumpulan data kualitatif dilakukan melalui studi dokumen (*document analysis*) atau studi pustaka. Sumber data kualitatif meliputi: (1) Dokumen regulasi, seperti Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung No. 2 Tahun 2021 (Pemerintah Provinsi Lampung, 2021) dan Perda di tingkat kabupaten/kota (Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, 2022; Pemerintah Kota Bandar Lampung, 2016) untuk menganalisis kerangka hukum yang berlaku; (2) Dokumen kelembagaan, seperti Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Rencana Kerja (Renja), dan dokumen anggaran dari Dinas PPPA Provinsi Lampung dan kabupaten/kota untuk mengevaluasi kapasitas institusional (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, 2022, 2024; Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung, 2024; Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP, dan PA Kabupaten Lampung Barat, 2024); dan (3) Literatur akademik, termasuk skripsi, tesis, dan jurnal ilmiah terdahulu yang relevan untuk mendapatkan temuan empiris mengenai implementasi kebijakan dan dinamika kolaborasi di lapangan (Sinta, 2022; Siregar, 2023; Pratiwi, n.d.; Islam, 2024; Anggraini, n.d.).

Teknik analisis data dilakukan secara terpisah namun saling melengkapi. Data kuantitatif dianalisis menggunakan statistik deskriptif untuk mengidentifikasi pola, tren, dan distribusi frekuensi. Data kualitatif dianalisis menggunakan analisis tematik yang dipandu oleh kerangka teoretis yang telah ditetapkan, yaitu Tata Kelola Kolaboratif untuk menilai sinergi antar pemangku kepentingan (Sinta, 2022) dan Model Evaluasi CIPP untuk mengevaluasi kebijakan dari aspek konteks, masukan, proses, dan produk (Stufflebeam, 2003). Validitas temuan diperkuat melalui teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan dan memverifikasi informasi dari berbagai jenis sumber data (data statistik, dokumen pemerintah, dan hasil penelitian akademik) untuk memastikan konsistensi dan keandalan kesimpulan (Putri & Ritonga, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lanskap Epidemiologis Kekerasan di Lampung

Analisis kuantitatif menunjukkan tren peningkatan jumlah kasus kekerasan yang dilaporkan secara signifikan. Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan meningkat dari 233 pada tahun 2017 menjadi 567 pada tahun 2022 (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, 2022). Pada semester pertama 2024, tercatat 296 kasus dengan 330 korban (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, 2024). Peningkatan ini dapat diinterpretasikan sebagai paradoks pelaporan, di mana kenaikan jumlah laporan mungkin tidak semata-mata mencerminkan eskalasi insiden, tetapi juga peningkatan keberanian dan kepercayaan korban untuk melapor kepada mekanisme yang disediakan negara, seiring dengan penguatan sistem pelaporan online SIMFONI-PPA dan peran aktif UPTD PPA (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, 2023; Siregar, 2023).

Data secara konsisten menunjukkan bahwa kekerasan seksual adalah bentuk yang paling dominan, mencakup 64.2% dari total korban pada semester I 2024 (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, 2024). Korban utama adalah anak dan remaja, dengan kelompok usia terbesar 13-17 tahun (139 korban) dan mayoritas berstatus pelajar (189 korban) (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, 2024). Pelaku kekerasan umumnya adalah orang-orang dalam lingkaran kepercayaan korban, seperti "Pacar/Teman" (89 pelaku), "Tetangga" (45 pelaku), dan "Orang Tua" (27 pelaku) (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, 2024). Mayoritas kekerasan terjadi di ranah domestik, dengan 58.5% insiden terjadi di dalam rumah tangga (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, 2024).

Distribusi kasus tidak merata, dengan konsentrasi tinggi di beberapa "hotspot" seperti Kota Bandar Lampung (94 kasus) dan Lampung Selatan (47 kasus) pada semester I 2024 (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, 2024). Tingginya angka di wilayah perkotaan dapat mengindikasikan bias pelaporan perkotaan, di mana infrastruktur layanan lebih baik dan lebih mudah diakses (Pratiwi, n.d.). Hal ini berisiko menciptakan titik buta kebijakan, di mana wilayah pedesaan yang diduga mengalami *under-reporting* terabaikan.

Tata Kelola Kelembagaan dan Kebijakan

Struktur kelembagaan di Lampung dipimpin oleh Dinas PPPA Provinsi Lampung sebagai koordinator kebijakan, dengan UPTD PPA sebagai unit layanan garis depan (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, 2022, 2024). Kinerja UPTD PPA dinilai baik dalam menangani kasus yang masuk (Siregar, 2023; Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, 2024). Secara normatif, landasan hukum utama adalah Perda Provinsi Lampung No. 2 Tahun 2021 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (Pemerintah Provinsi Lampung, 2021).

Namun, terdapat kesenjangan implementasi yang fundamental. Pemerintah Provinsi Lampung hingga kini belum menerbitkan kebijakan turunan seperti Peraturan Gubernur (Pergub) yang menjabarkan amanat Perda tersebut (Sinta, 2022). Ketiadaan Pergub ini

mengakibatkan tidak adanya Prosedur Operasional Standar (SOP) Terpadu yang mengikat semua lembaga, sehingga koordinasi di lapangan berjalan secara *ad hoc* dan tidak terstandarisasi.

Kelemahan ini diperparah oleh keterbatasan kapasitas institusional. Alokasi anggaran untuk program perlindungan inti pada tahun 2023 hanya sekitar Rp 1.26 miliar, angka yang sangat tidak memadai (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, 2023). Terdapat pula kekurangan SDM yang profesional dan terlatih (Anggraini, n.d.) serta ketiadaan fasilitas esensial seperti rumah aman (shelter) yang dikelola UPTD PPA provinsi (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat, 2022). Keterbatasan ini menciptakan lingkaran setan kurangnya sumber daya, di mana anggaran yang rendah menurunkan kualitas layanan, yang dapat mengikis kepercayaan publik dan menekan angka pelaporan.

Peran Masyarakat Sipil dan Dinamika Kolaborasi

Di tengah keterbatasan pemerintah, LSM seperti Lembaga Advokasi Perempuan Damar dan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Lampung memainkan peran krusial dalam menyediakan layanan alternatif dan advokasi (Pratiwi, n.d.; Kompas, 2024). Kolaborasi antara pemerintah dan LSM umumnya berbasis sistem rujukan melalui Nota Kesepahaman (MoU) (Sinta, 2022). Namun, kolaborasi ini dinilai belum berjalan optimal dan didorong oleh keterbatasan sumber daya masing-masing lembaga, bukan oleh desain strategis (Sinta, 2022). Model kolaborasi karena keterpaksaan ini bersifat rapuh, tidak berkelanjutan, dan cenderung reaktif terhadap kasus yang sudah terjadi.

Temuan ini menunjukkan adanya kemacetan sistemik: pintu pelaporan yang semakin terbuka tidak diimbangi dengan sistem layanan internal yang siap dan didukung sumber daya yang memadai. Sistem yang ada saat ini terfragmentasi, lambat, dan tidak terstandarisasi, berisiko mengikis kepercayaan yang telah dibangun. Lebih jauh, pendekatan pemerintah yang sangat berfokus pada penanganan reaktif belum cukup mengatasi akar masalah sosio-kultural, seperti budaya "aib" dan pandangan keliru tentang kekerasan sebagai alat pendisiplinan (Suyanto, 2007). Norma-norma ini menciptakan lingkungan yang permisif terhadap kekerasan.

Dibandingkan dengan provinsi lain di Sumatera seperti Sumatera Utara yang fokus pada peningkatan kapasitas SDM (Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, 2021) atau Sumatera Barat yang menonjol dalam akuntabilitas kinerja (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat, 2022), Lampung tampak tertinggal dalam formalisasi kerangka kerja kolaboratif dan komitmen alokasi sumber daya.

KESIMPULAN

Studi ini menyimpulkan bahwa tata kelola penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Lampung menghadapi tantangan sistemik yang serius. Meskipun terjadi peningkatan dalam pelaporan kasus yang dapat mengindikasikan membaiknya kepercayaan publik, sistem respons pemerintah masih lemah. Kelemahan utama terletak pada kesenjangan implementasi kebijakan, yang ditandai dengan tidak adanya peraturan turunan (Pergub) dan SOP Terpadu untuk melaksanakan Perda No. 2 Tahun 2021. Hal ini menyebabkan layanan yang terfragmentasi dan tidak terstandarisasi. Kelemahan ini diperburuk oleh kapasitas institusional

yang tidak memadai, termasuk anggaran yang minim, kekurangan SDM profesional, dan ketiadaan fasilitas vital seperti rumah aman. Kolaborasi dengan LSM, meskipun vital, berjalan secara *ad hoc* karena keterpaksaan, bukan berdasarkan desain strategis yang kokoh.

Untuk mengatasi kelemahan ini, direkomendasikan beberapa langkah kebijakan berbasis bukti:

1. Penguatan Tata Kelola: Pemerintah Provinsi Lampung harus segera menerbitkan Pergub pelaksana untuk Perda No. 2 Tahun 2021, yang mencakup SOP Terpadu yang mengatur alur rujukan, pembagian peran, dan mekanisme pembiayaan yang jelas antar lembaga.
2. Peningkatan Kapasitas Institusional: Diperlukan peningkatan alokasi anggaran yang signifikan untuk program perlindungan, perekrutan SDM profesional (psikolog, konselor), dan pembangunan rumah aman tingkat provinsi.
3. Formalisasi Kolaborasi: Mengubah model kolaborasi menjadi lebih strategis dengan membentuk Forum Koordinasi Lintas Sektor yang dilembagakan melalui SK Gubernur untuk memastikan koordinasi yang terstruktur dan proaktif.
4. Reorientasi ke Pencegahan: Menggeser fokus dari sekadar penanganan reaktif ke pencegahan primer berbasis data, dengan menargetkan kelompok rentan (remaja), mengintegrasikan pendidikan tentang hubungan sehat dan *consent* di sekolah, serta meluncurkan kampanye perubahan norma sosial yang masif untuk melawan budaya "aib" dan melibatkan laki-laki sebagai sekutu.

Implementasi rekomendasi ini secara terpadu diharapkan dapat mentransformasi sistem perlindungan di Lampung menjadi lebih strategis, responsif, dan akuntabel.

REFERENSI

Anggraini, R. (n.d.). *Analisis Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam Pengentasan Kasus Kekerasan Anak di Bawah Umur*. Universitas Lampung.

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, *18*(4), 543–571.

Antara News. (2024, March 25). *Dinas PPPA Lampung edukasi warga agar berani laporkan kasus kekerasan*.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung. (2021). *Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 48 Tahun 2021*.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung. (2022). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021*.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung. (2022). *Profil Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Tahun 2022*.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung. (2023). *Laporan Data Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung 2023*.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung. (2023). *Rencana Aksi Tahun Anggaran 2023*.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung. (2024). *Data Kasus Kekerasan pada Perempuan dan Anak Provinsi Lampung Semester I Tahun 2024*.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung. (2024). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023*.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung. (2024). *Profil UPTD PPA Provinsi Lampung*.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat. (2022). *Laporan Kinerja (LAKIP) Tahun 2021*.

Islam, R. D. (2024). *Evaluasi Kebijakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Bandar Lampung*. Universitas Lampung.

Katadata. (2023, August 11). *Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Lampung Capai 307 Kasus hingga Pertengahan 2023*.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (n.d.). *Ringkasan Data SIMFONI-PPA*. Diakses dari https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2022, March 15). *KemenPPPA Ajak Masyarakat Berani Melapor Jika Melihat dan Mendengar Kekerasan*.

Kompas. (2024, November 9). *Anak dan Remaja Perempuan di Lampung dalam Pusaran Kasus Kekerasan Seksual*.

Konsil LSM. (n.d.). *Women Crisis Centre (WCC) Palembang*. Diakses dari https://konsillsm.or.id/women-crisis-centre-wcc-palembang/.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat. (2022). *Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan*.

Pemerintah Kota Bandar Lampung. (2016). *Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak*.

Pemerintah Provinsi Lampung. (2021). *Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung*.

Pemerintah Provinsi Lampung. (2025, June 18). *Sinergi Lintas Sektor, Lampung Perkuat Perlindungan Perempuan dan Anak*.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. (2010). *Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan*.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. (2021, June 7). *Pemprov Sumut Terus Upayakan Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*.

Pratiwi, S. O. (n.d.). *Peran Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi Pada LSM Damar Provinsi Lampung)*. Universitas Lampung.

Putri, A. A., & Ritonga, F. U. (2024). Proses Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Berkebutuhan Khusus di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Medan. *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, *3*(1), 15-30.

Saeno. (n.d.). *Faktor-Faktor Penyebab Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Kota Bandar Lampung)*. Universitas Lampung.

Selvyana, A. (n.d.). *Strategi Pemerintah Dalam Menangani Tindak Kekerasan Pada Anak di Kota Bandar Lampung*. UIN Raden Intan Lampung.

Sinta. (2022). *Kolaborasi Antar Stakeholder dalam Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung*. Universitas Lampung.

Siregar, L. S. M. (2023). *Upaya UPTD PPA Provinsi Lampung dalam Memberikan Perlindungan Kepada Anak Korban Pelecehan Seksual*. Universitas Lampung.

Stufflebeam, D. L. (2003). The CIPP Model for Evaluation. In T. Kellaghan & D. L. Stufflebeam (Eds.), *International Handbook of Educational Evaluation* (pp. 31-62). Springer.

Suyanto, B. (2007). *Tindak Kekerasan Mengintai Anak-anak*. Lutfansyah Mediatama.